

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 0°59'-2° 28,6' Lintang Selatan, 100°19'-101°18' Bujur Timur, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu)
Sebelah Utara	: Kota Padang
Sebelah Timur	: Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi)
Sebelah Barat	: Samudera Indonesia

Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Otonom Provinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 serta Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terbagi kedalam 15 wilayah Kecamatan, yang terdiri dari:

1. Kecamatan Koto XI Tarusan;
2. Kecamatan Bayang;
3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
4. Kecamatan IV Jurai;
5. Kecamatan Batang Kapas;
6. Kecamatan Sutura;
7. Kecamatan Lengayang;
8. Kecamatan Ranah Pesisir;
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
10. Kecamatan Airpura;
11. Kecamatan Pancung Soal;
12. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
14. Kecamatan Lunang;
15. Kecamatan Silaut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2019-2024 terdiri dari 45 orang Anggota, dengan susunan Pimpinan DPRD sebagai berikut:

Ketua	: Ermizen, S.Pd
Wakil Ketua	: Hakim
Wakil Ketua	: H. Aprial Habas, SH., MH
Wakil Ketua	: Jamalul Yatim

Dari jajaran eksekutif, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 ditetapkan Susunan Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode 2016 – 2021 sebagai berikut:

Bupati	: H. Hendrajoni, SH., MH.
Wakil Bupati	: Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd

Tahun 2019 merupakan tahun keempat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, dengan visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri,

Unggul, Agamis, dan Sejahtera". Dalam melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Sekretaris Daerah, Ir. Erizon, MT., dan 45 orang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran (TA) 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2019. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 2) Untuk menyajikan informasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang akan tergambar dalam LRA TA 2019;
- 3) Untuk menyajikan informasi posisi aset, kewajiban, dan ekuitas periode 31 Desember 2019 yang dapat dilihat pada Neraca;
- 4) Untuk menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2019, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2019;
- 5) Untuk menyajikan informasi Pendapatan dan Beban berbasis akrual selama TA 2019;
- 6) Menyajikan informasi perubahan ekuitas yang berakhir pada 31 Desember 2019;
- 7) Untuk menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama TA 2019, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan Kabupaten Pesisir Selatan serta penjelasan pos-pos Laporan Keuangan (LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK).
- 8) Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama TA 2019.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara lebih lanjut dapat diuraikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------|--|---------|
| Bab I. | Pendahuluan | |
| | 1.1. Informasi Umum | |
| | 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan | |
| | 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan | |
| | 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan | |
| Bab II. | Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD | Kinerja |
| | 2.1. Ekonomi Makro | |
| | 2.2. Kebijakan Keuangan | |
| | 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD | |
| Bab III. | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan | |
| | 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan | |
| | 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja yang Ditetapkan | |
| Bab IV. | Kebijakan Akuntansi | |
| | 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah | |
| | 4.2. Asumsi Dasar | |
| | 4.3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | |
| | 4.4. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan | |
| | 4.5. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan | |
| | 4.6. Proses Penyusunan Laporan Keuangan | |
| Bab V. | Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan | |
| | 5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | |
| | 5.2. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | |

- 5.3. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Penjelasan pos-pos Neraca
- 5.6. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas
- Bab VI. Informasi Tambahan
 - 6.1 Informasi Terkait Relokasi RSUD dr. M. Zein
 - 6.2 Revaluasi Aset Tetap
 - 6.3 Penghapusan Piutang PBB-P2
 - 6.4 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - 6.5 Perubahan Kebijakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset tetap
- Bab VII. Penutup

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 berdasarkan angka sementara sebesar 4,81 persen turun sebesar 0,54 persen dibanding tahun 2018 sebesar 5,35 persen. Adapun perkembangan indikator makro pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Makro Ekonomi	Revisi			
		2016	2017	2018	2019
1.	PDRB Harga Konstan 2010 (Rp. 000.000)	8.230.190	8.678.867	9.142.697	9.582.867
2.	Tingkat Pertumbuhan ekonomi (%)	5,33	5,42	5,35	4,81
3.	Laju Inflasi (%)	5,02	2,11	2,00	1,72
4.	PDRB perkapita APBD (Rp./orang)	22.840.000	27.380.000	28.500.000	30.250.000
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,92	7,79	7,59	7,88
6.	Tingkat Pengangguran (%)	9,58	7,95	5,85	5,84

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan seperti terlihat pada tabel diatas menunjukkan peningkatan yang baik. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 memperlihatkan pertumbuhan ke arah yang positif yaitu dari sebesar Rp9.142.697 di tahun 2018 diperkirakan meningkat menjadi Rp9.582.867 tahun 2019. Tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu dari 5,35% pada tahun 2018 diperkirakan menjadi 4,81% pada tahun 2019.

Kemudian untuk laju inflasi diperkirakan sebesar 1,72% pada tahun 2019. Laju inflasi Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada laju inflasi Kota Padang. Angka kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 sebesar 7,59% meningkat menjadi 7,88% tahun 2019. Kemudian untuk tingkat pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 5,85% diperkirakan turun menjadi 5,84% pada tahun 2019.

2.2 Kebijakan Keuangan

Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen pembangunan daerah dan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Melalui beberapa peraturan telah diupayakan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yakni melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 yang

selanjutnya diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Implikasi perubahan peraturan ini telah berimbas pada sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a) Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan membayar daerah dan tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan daerah;
- d) Pengeluaran daerah;
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Pengertian Pendapatan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Bab I Pasal 1 ayat 50 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab I Pasal 1 ayat 15, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah dikelompokkan atas; Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam hal ini untuk peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4. Peraturan Daerah Nomor 122 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, PPJ, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian dari kebijakan pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah adalah melalui:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk tahun 2019 lebih difokuskan untuk mencari potensi pendapatan baru dengan target perolehannya serta meminimalisir kebocoran dalam pemungutan dengan berpedoman pada aturan perundangan serta

evaluasi perolehan pendapatan tahun lalu. Untuk mendukung dari kebijakan tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan.

(1) Intensifikasi dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain:

- (a) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak dan masyarakat dengan cara melakukan tatap muka, pertemuan dengan wajib pajak dan masyarakat; membuat selebaran, spanduk dan *billboard* dan sarana lainnya; membuat edaran ke media masa baik cetak maupun elektronik;
- (b) Meningkatkan Pelayanan dengan cara meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya aparatur; berpenampilan yang simpatik dan ramah tamah kepada wajib pajak; melaksanakan pelayanan yang tertib, cepat dan lancar; menumbuhkan dan membina kejujuran petugas untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur; serta menyediakan sarana dan prasarana operasional di kantor maupun sarana transportasi bagi petugas yang beroperasi di lapangan.

(2) Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- (a) Melakukan pendataan dan penyaringan wajib pajak baru;
- (b) Melakukan kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga;
- (c) Melakukan penggalan wajib pajak/wajib retribusi daerah baru, sesuai dengan aturan yang berlaku; Melakukan penggalan wajib pajak/wajib retribusi daerah baru yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- (d) Melakukan pendataan terhadap potensi riil penerimaan dari objek pajak/retribusi sehingga terdapat database yang akurat;
- (e) Mendata administrasi dan sistem pengelolaan pendapatan daerah;
- (f) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Unsur lainnya yang terkait serta
- (g) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula pada Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

b) Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan :

- Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun provinsi dalam meningkatkan penggalan sumber-sumber pendapatan.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai upaya penambahan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak (bonus PBB, PPh Pasal 21, dll), peningkatan bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 24,92% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata kontribusi per-tahun terhadap APBD sebesar 8,19%, secara umum dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal masih masuk dalam kategori rendah dari rata-rata nasional. Berdasarkan kondisi tersebut Kabupaten Pesisir Selatan masih tergantung pada penerimaan transfer dana dari Pemerintah Pusat seperti yang terlihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2019

TAHUN	PAD (Rp.)	PERTUMBUHAN
2014	86.699.821.743,-	52,04
2015	107.992.020.496,-	24,56
2016	108.915.294.628,-	0,85
2017	178.145.381.104,-	63,56
2018	123.906.524.443,-	30,45
2019	134.804.594.146,-	8,79
Rata-rata pertahun		24,89

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2019

Tabel 2.3
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 – 2019

TAHUN	PAD (Rp.)	PERTUMBUHAN (%)	APBD	KONTRIBUSI PAD (%)
2014	86.699.821.743,-	52,04	1.470.013.722.863,-	7,41
2015	107.992.020.496,-	24,56	1.364.126.655.860,-	7,92
2016	108.915.294.628,-	0,85	1.577.041.581.507,-	6,91
2017	178.145.381.104,-	63,56	1.539.542.108.506,-	11,57
2018	123.906.524.443,-	30,45	1.609.033.648.981,-	7,70
2019	134.804.594.146,-	8,79	1.772.707.595.258,-	7,60
RATA-RATA PERTAHUN		24,92		8,18

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2019

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

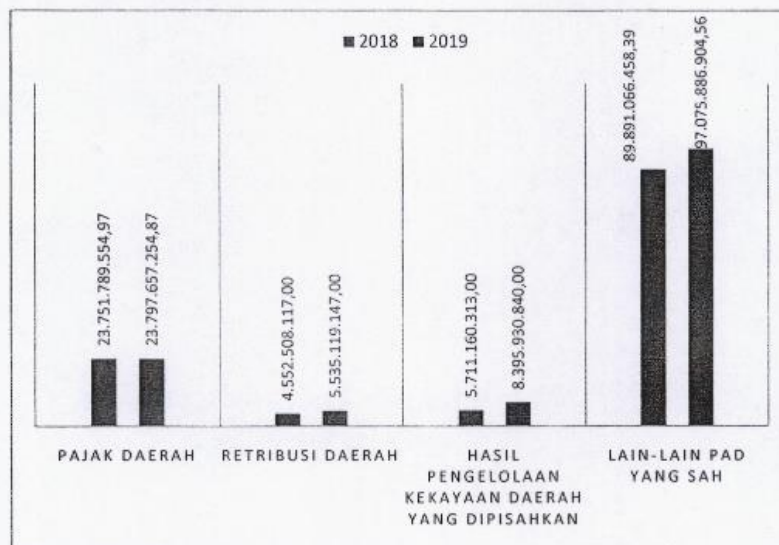
Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp134.804.594.146,43,- atau naik sebesar Rp10.898.069.703,07 di banding tahun 2018 yang berjumlah, Rp123.906.524.443, Kenaikan ini terjadi pada Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp7.184.820.446,17. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4
Pendapatan Asli Daerah T.A. 2018 dan 2019
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2018	2019	Bertambah/berkurang
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123.906.524.443,36	134.804.594.146,43	10.898.069.703,07
Pajak Daerah	23.751.789.554,97	23.797.657.254,87	45.867.699,90
Retribusi Daerah	4.552.508.117,00	5.535.119.147,00	982.611.030,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.711.160.313,00	8.395.930.840,00	2.684.770.527,00
Lain-lain PAD yang sah	89.891.066.458,39	97.075.886.904,56	7.184.820.446,17

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2019

Grafik 2.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2018 dan 2019



Sumber : BPKD, 2019

B. Pendapatan Transfer

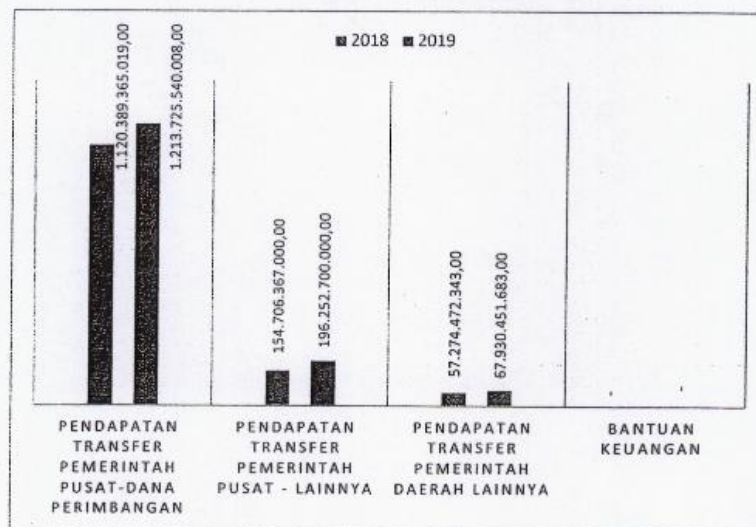
Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2019 sebesar Rp1.477.908.691.691,00 mengalami kenaikan sebesar Rp145.538.487.329,00,- dibanding tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
Pendapatan Transfer T.A. 2018 dan 2019
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2018	2019	Bertambah/Berkurang
Pendapatan Transfer	1.332.370.204.362,00	1.477.908.691.691,00	145.538.487.329,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.120.389.365.019,00	1.213.725.540.008,00	93.336.174.989,00
Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	154.706.367.000,00	196.252.700.000,00	41.546.333.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	57.274.472.343,00	67.930.451.683,00	10.655.979.340,00
Bantuan Keuangan			

Sumber : BPKD, 2019

Grafik 2.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2018 dan 2019



Sumber : BPKD, 2019

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2019 sebesar Rp86.297.776.271,00 naik sebesar Rp13.432.654.438,00 dibanding tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2018 dan 2019
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2018	2019	Bertambah/Berkurang
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72.865.121.833,00	86.297.776.271,00	13.432.654.438,00
Pendapatan Hibah	72.865.121.833,00	86.297.776.271,00	13.432.654.438,00
Pendapatan Dana Darurat			
Pendapatan Lainnya			

Sumber: BPKD, 2019

2.2.2 Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Penganggaran belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019, total Anggaran Belanja sebesar Rp1.582.144.698.309,49 naik sebesar Rp88.612.417.478,49 dari total belanja pada tahun 2018 sebesar Rp1.493.532.280.831,00. Anggaran belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.154.588.987.259,49, Belanja Modal sebesar Rp425.398.193.050,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.157.518.000,00.

Untuk lebih jelasnya tentang gambaran anggaran belanja tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat pada Tabel 2.7.

2.2.3 Kebijakan Umum pada Aspek Transfer

Pada tahun 2019, total anggaran Transfer sebesar Rp264.779.283.521,90, naik sebesar Rp20.869.103.556,90 dari total Transfer pada tahun 2018 sebesar Rp243.910.179.965,00. Anggaran Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp5.877.729.951,90 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp258.901.553.570,00.

Tabel 2.7
Anggaran Belanja Tahun 2018 dan 2019
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Tahun				Perubahan 2018-2019
	2018		2019		
BELANJA OPERASI	1.135.396.888.431,80	64,51	1.154.588.987.259,49	62,51	(2,84)
Belanja Pegawai	723.208.209.577,44	41,62	740.947.773.388,19	40,11	(1,51)
Belanja Barang dan Jasa	394.157.529.034,36	22,69	394.462.022.725,30	21,35	(1,34)
Belanja Bunga	3.160.399.820,00	0,18	1.371.872.644,00	0,07	(0,11)
Belanja Hibah	13.695.750.000,00	0,79	17.607.318.502,00	0,95	0,16
Belanja Bantuan Sosial	1.175.000.000,00	6,76	200.000.000,00	0,009	(6,75)
BELANJA MODAL	333.120.253.565,60	20,32	425.398.193.050,00	23,03	2,71
Belanja Tanah	4.702.530.169,00	0,27	9.011.448.023,00	0,49	0,22
Belanja Peralatan dan Mesin	42.118.442.498,50	2,42	89.354.778.599,00	4,84	2,06
Belanja Gedung dan Bangunan	169.205.692.850,50	9,74	175.900.547.836,00	9,52	(0,22)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.976.768.047,60	7,88	150.939.133.200,00	8,17	0,29
Belanja Aset Tetap Lainnya	116.820.000,00	0,01	192.285.392,00	0,01	-
BELANJA TAK TERDUGA	5.015.138.833,60	0,29	2.157.518.000,00	0,12	(0,17)
Belanja Tak Terduga	5.015.138.833,60	0,29	2.157.518.000,00	0,12	(0,17)
JUMLAH	1.499.532.280.831,00	85,96	1.582.444.698.309,49	85,66	(0,30)

Untuk lebih jelasnya tentang gambaran anggaran belanja tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Anggaran Transfer Tahun 2018 dan 2019
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Tahun				Persentase Tahun 2019 /Tahun 2018
	2018		2019		
TRANSFER	243.910.179.965,00	14,14	264.779.283.521,90	14,34	0,20
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	4.211.720.860,00	0,24	4.149.867.419,50	0,22	(0,02)
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	1.034.300.000,00	0,06	1.727.862.532,40	0,09	0,03
Bantuan Keuangan	238.664.159.105,00	13,74	258.901.553.570,00	14,02	0,28

2.2.4 Kebijakan Umum pada Aspek Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun anggaran 2019, anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp88.284.276.573,39 yang terdiri dari Penggunaan SiLPA sebesar Rp25.246.891.573,39 dan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp63.037.385.000,00. Pada tahun Anggaran 2018 anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp154.358.811.862,00 yang terdiri dari Penggunaan SiLPA sebesar Rp91.321.426.862 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.63.037.385.000,00.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun anggaran 2019, anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp14.067.890.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp4.650.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp9.417.890.000,00. Untuk tahun anggaran 2018, anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25.950.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp16.500.000.000 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp9.450.000.000,00.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam penyusunan APBD Tahun 2019, ditempuh pendekatan rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi atau pengalokasian anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pada Tahun Anggaran 2019, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merealisasikan Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.699.011.062.108,43 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp134.804.594.146,43, Pendapatan Transfer Rp1.477.908.691.691,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp86.297.776.271,00.

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1.431.684.077.296,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.105.164.932.412,00, Belanja Modal sebesar Rp324.875.576.584,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.643.568.300,00. Tahun Anggaran 2019 Transfer terealisasi sebesar Rp261.955.446.540,71 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp3.153.892.970,77 dan Transfer Bantuan Keuangan Rp258.801.553.569,94

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp25.325.559.546,89 Sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp13.746.890.000,00. Dalam hal ini Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp11.578.669.546,89.

Ikhtisar realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Pesisir Selatan TA 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2019**

No.	Urutan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	RASIO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3)x100
A.	PENDAPATAN:			
1	Pendapatan Asli Daerah	153.941.080.200,00	134.804.594.146,43	87,57
2	Pendapatan Transfer	1.516.188.955.658,00	1.477.908.691.691,00	97,48
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	102.577.559.400,00	86.297.776.271,00	84,13
	Jumlah Pendapatan (A)	1.772.707.595.258,00	1.699.011.062.108,43	95,84
B.	BELANJA			
1	Belanja Operasi	1.154.588.987.259,49	1.105.164.932.412,00	95,72
2	Belanja Modal	425.398.193.050,00	324.875.576.584,00	76,37
3	Belanja Tidak Terduga	2.157.518.000,00	1.643.568.300,00	76,18
	Jumlah Belanja (B)	1.582.144.698.309,49	1.431.684.077.296,00	90,49
C.	TRANSFER			
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.877.729.951,90	3.153.892.970,77	53,66
2	Transfer Bantuan Keuangan	258.901.553.570,00	258.801.553.569,94	99,96

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	RASIO
		Rp	Rp	
	Jumlah Transfer (C)	264.779.283.521,90	261.955.446.540,71	98,93
D.	Surplus/(Defisit) (A-B-C)	(74.216.386.573,39)	5.371.538.271,72	(7,23)
E.	PEMBIAYAAN			
1	Penerimaan	88.284.276.573,39	25.325.559.546,89	28,39
2	Pengeluaran	14.067.890.000,00	13.746.890.000,00	97,72
	Pembiayaan Netto (D)	74.216.386.573,39	11.578.669.546,89	15,60
F.	SILPA (D+E)		16.950.207.2818,61	

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan cukup baik dimana realisasi pendapatan dan belanja memiliki rasio yang cukup tinggi, dimana rasio pendapatan sebesar 95,84% dari anggaran dan rasio belanja sebesar 90,49% dari anggaran.

Secara lebih terinci, disajikan Ikhtisar APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 dalam Tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2019**

Uraian	APBD-P	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
URUSAN WAJIB	-	-	-	-
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	-	-	-	-
PENDIDIKAN	-	-	-	-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-
BELANJA	590.804.928.694,91	1.166.116.046.142,00	(575.311.117.447,09)	197,37
Belanja Pegawai	485.469.218.580,91	476.903.749.300,00	8.565.469.280,91	98,22
Belanja Barang dan Jasa	51.425.680.651,00	50.111.662.636,00	1.314.018.015,00	97,44
Belanja Modal	53.910.029.463,00	56.042.611.135,00	(2.132.581.672,00)	103,95
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-
BELANJA	127.042.993.410,00	-	127.042.993.410,00	-
Belanja Pegawai	21.707.283.296,00	-	21.707.283.296,00	-
Belanja Barang dan Jasa	51.425.680.651,00	-	51.425.680.651,00	-
Belanja Modal	53.910.029.463,00	-	53.910.029.463,00	-
KESEHATAN	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	-	-	-	-
PENDAPATAN	23.289.000.000,00	44.837.969.650,00	(21.548.969.650,00)	192,52
BELANJA	153.332.510.884,95	291.395.523.432,00	(138.063.012.547,05)	190,04
Belanja Pegawai	83.730.308.520,60	81.285.473.577,00	2.444.834.943,60	97,08
Belanja Barang dan Jasa	37.752.611.144,35	34.935.472.022,00	2.817.139.122,35	92,53
Belanja Modal	31.849.591.220,00	29.476.816.117,00	2.372.775.103,00	92,55
Dinas Kesehatan	-	-	-	-
PENDAPATAN	3.909.000.000,00	-	3.909.000.000,00	-
BELANJA	73.565.151.795,95	-	73.565.151.795,95	-
Belanja Pegawai	13.099.050.000,00	-	13.099.050.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	33.488.773.352,95	-	33.488.773.352,95	-
Belanja Modal	26.977.328.443,00	-	26.977.328.443,00	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN T.A. 2019

Uraian	APBD-P	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
PUSKESMAS BARUNG- BARUNG BELANTAI	-	-	-	-
PENDAPATAN	684.000.000,00	-	684.000.000,00	-
BELANJA	782.194.129,00	-	782.194.129,00	-
Belanja Pegawai	448.100.000,00	-	448.100.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	162.668.693,00	-	162.668.693,00	-
Belanja Modal	171.425.436,00	-	171.425.436,00	-
PUSKESMAS TARUSAN	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.080.000.000,00	-	1.080.000.000,00	-
BELANJA	1.197.498.093,00	-	1.197.498.093,00	-
Belanja Pegawai	704.100.000,00	-	704.100.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	211.830.996,00	-	211.830.996,00	-
Belanja Modal	281.567.097,00	-	281.567.097,00	-
PUSKESMAS PASAR BARU	-	-	-	-
PENDAPATAN	960.000.000,00	-	960.000.000,00	-
BELANJA	1.001.055.922,00	-	1.001.055.922,00	-
Belanja Pegawai	625.500.000,00	-	625.500.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	184.846.151,00	-	184.846.151,00	-
Belanja Modal	190.709.771,00	-	190.709.771,00	-
PUSKESMAS KOTO BERAPAK	-	-	-	-
PENDAPATAN	720.000.000,00	-	720.000.000,00	-
BELANJA	746.431.174,00	-	746.431.174,00	-
Belanja Pegawai	433.900.000,00	-	433.900.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	154.302.598,00	-	154.302.598,00	-
Belanja Modal	158.228.576,00	-	158.228.576,00	-
PUSKESMAS ASAM KUMBANG	-	-	-	-
PENDAPATAN	360.000.000,00	-	360.000.000,00	-
BELANJA	405.172.005,00	-	405.172.005,00	-
Belanja Pegawai	255.700.000,00	-	255.700.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	91.179.111,00	-	91.179.111,00	-
Belanja Modal	58.292.894,00	-	58.292.894,00	-
PUSKESMAS SALIDO	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.860.000.000,00	-	1.860.000.000,00	-
BELANJA	1.931.235.972,00	-	1.931.235.972,00	-
Belanja Pegawai	1.216.200.000,00	-	1.216.200.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	338.177.772,00	-	338.177.772,00	-
Belanja Modal	376.858.200,00	-	376.858.200,00	-
PUSKESMAS LUMPO	-	-	-	-
PENDAPATAN	432.000.000,00	-	432.000.000,00	-
BELANJA	454.811.864,00	-	454.811.864,00	-
Belanja Pegawai	281.400.000,00	-	281.400.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	87.832.737,00	-	87.832.737,00	-
Belanja Modal	85.579.127,00	-	85.579.127,00	-
PUSKESMAS PASAR KUOK	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.140.000.000,00	-	1.140.000.000,00	-
BELANJA	1.375.124.587,00	-	1.375.124.587,00	-
Belanja Pegawai	792.841.860,00	-	792.841.860,00	-
Belanja Barang dan Jasa	220.937.958,00	-	220.937.958,00	-
Belanja Modal	361.344.769,00	-	361.344.769,00	-
PUSKESMAS IV KOTO MUDIEK	-	-	-	-

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN T.A. 2019

Uraian	APBD-P	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
PENDAPATAN	312.000.000,00	-	312.000.000,00	-
BELANJA	360.005.146,00	-	360.005.146,00	-
Belanja Pegawai	191.250.000,00	-	191.250.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	75.630.343,00	-	75.630.343,00	-
Belanja Modal	93.124.803,00	-	93.124.803,00	-
PUSKESMAS SURANTIH	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.932.000.000,00	-	1.932.000.000,00	-
BELANJA	2.180.916.638,00	-	2.180.916.638,00	-
Belanja Pegawai	1.261.200.000,00	-	1.261.200.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	310.061.571,00	-	310.061.571,00	-
Belanja Modal	609.655.067,00	-	609.655.067,00	-
PUSKESMAS KAMBANG	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00	-
BELANJA	2.116.034.518,00	-	2.116.034.518,00	-
Belanja Pegawai	1.171.800.000,00	-	1.171.800.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	506.698.772,00	-	506.698.772,00	-
Belanja Modal	437.535.746,00	-	437.535.746,00	-
PUSKESMAS KOTO BARU	-	-	-	-
PENDAPATAN	720.000.000,00	-	720.000.000,00	-
BELANJA	807.567.546,00	-	807.567.546,00	-
Belanja Pegawai	470.199.999,60	-	470.199.999,60	-
Belanja Barang dan Jasa	134.028.607,40	-	134.028.607,40	-
Belanja Modal	203.338.939,00	-	203.338.939,00	-
PUSKESMAS BALAI SELASA	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.440.000.000,00	-	1.440.000.000,00	-
BELANJA	1.590.557.439,00	-	1.590.557.439,00	-
Belanja Pegawai	938.450.000,00	-	938.450.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	403.130.001,00	-	403.130.001,00	-
Belanja Modal	248.977.438,00	-	248.977.438,00	-
PUSKESMAS AIRHAJI	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.680.000.000,00	-	1.680.000.000,00	-
BELANJA	2.212.477.461,00	-	2.212.477.461,00	-
Belanja Pegawai	1.096.950.000,00	-	1.096.950.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	380.235.583,00	-	380.235.583,00	-
Belanja Modal	735.291.878,00	-	735.291.878,00	-
PUSKESMAS INDERAPURA	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.320.000.000,00	-	1.320.000.000,00	-
BELANJA	1.447.587.620,00	-	1.447.587.620,00	-
Belanja Pegawai	860.400.000,00	-	860.400.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	367.087.620,00	-	367.087.620,00	-
Belanja Modal	220.100.000,00	-	220.100.000,00	-
PUSKESMAS TAPAN	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.080.000.000,00	-	1.080.000.000,00	-
BELANJA	1.162.329.652,00	-	1.162.329.652,00	-
Belanja Pegawai	706.700.000,00	-	706.700.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	215.495.096,00	-	215.495.096,00	-
Belanja Modal	240.134.556,00	-	240.134.556,00	-
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN	-	-	-	-
PENDAPATAN	720.000.000,00	-	720.000.000,00	-
BELANJA	765.072.930,00	-	765.072.930,00	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2019

Uraian	APBD-P	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
Belanja Pegawai	468.900.000,00	-	468.900.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	153.274.918,00	-	153.274.918,00	-
Belanja Modal	142.898.012,00	-	142.898.012,00	-
PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR	-	-	-	-
PENDAPATAN	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-
BELANJA	670.469.732,00	-	670.469.732,00	-
Belanja Pegawai	391.650.000,00	-	391.650.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	134.499.732,00	-	134.499.732,00	-
Belanja Modal	144.320.000,00	-	144.320.000,00	-
PUSKESMAS AIRPURA	-	-	-	-
PENDAPATAN	360.000.000,00	-	360.000.000,00	-
BELANJA	360.000.000,00	-	360.000.000,00	-
Belanja Pegawai	196.800.000,00	-	196.800.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	86.134.310,00	-	86.134.310,00	-
Belanja Modal	77.065.690,00	-	77.065.690,00	-
PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN	-	-	-	-
PENDAPATAN	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-
BELANJA	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-
Belanja Pegawai	98.400.000,00	-	98.400.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	45.785.222,00	-	45.785.222,00	-
Belanja Modal	35.814.778,00	-	35.814.778,00	-
RSUD Muhammad Zein Painan	-	-	-	-
PENDAPATAN	73.757.169.257,00	137.243.179.612,00	(63.486.010.355,00)	186,07
BELANJA	117.460.342.130,00	217.624.159.280,00	(100.163.817.150,00)	185,27
Belanja Pegawai	55.335.181.615,00	54.339.170.150,00	996.011.465,00	98,20
Belanja Barang dan Jasa	31.173.509.269,00	29.529.815.847,00	1.643.693.422,00	94,72
Belanja Modal	30.951.651.246,00	24.943.093.643,00	6.008.557.603,00	80,58
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.387.700.000,00	504.278.000,00	883.422.000,00	36,33
BELANJA	233.228.529.711,00	322.000.472.208,00	(88.771.942.497,00)	138,06
Belanja Pegawai	10.481.905.039,00	10.202.676.267,00	279.228.772,00	97,33
Belanja Barang dan Jasa	27.479.912.341,00	26.763.032.769,00	716.879.572,00	97,39
Belanja Modal	195.266.712.331,00	124.034.527.068,00	71.232.185.263,00	63,52
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.900.000,00	3.800.000,00	(1.900.000,00)	200,00
BELANJA	42.877.907.856,00	77.348.280.462,00	(34.470.372.606,00)	180,39
Belanja Pegawai	6.917.220.975,00	6.838.651.889,00	78.569.086,00	98,86
Belanja Barang dan Jasa	8.385.015.220,00	8.069.158.423,00	315.856.797,00	96,23
Belanja Modal	27.575.671.661,00	23.766.329.919,00	3.809.341.742,00	86,18
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	-	-	-	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	-
BELANJA	54.847.809.010,00	76.107.778.130,00	(21.259.969.120,00)	138,76
Belanja Pegawai	4.223.932.225,00	4.055.013.852,00	168.918.373,00	96,00
Belanja Barang dan Jasa	28.729.513.540,00	18.982.238.531,00	9.747.275.009,00	66,07
Belanja Modal	21.894.363.245,00	15.016.636.682,00	6.877.726.563,00	68,58
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2019

Uraian	APBD-P	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
Dinas Satuan Polisi, Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	
BELANJA	9.832.313.482,00	19.067.449.446,00	(9.235.135.964,00)	193,92
Belanja Pegawai	6.189.681.604,00	6.112.839.172,00	76.842.432,00	98,75
Belanja Barang dan Jasa	3.385.781.878,00	3.170.885.551,00	214.896.327,00	93,65
Belanja Modal	256.850.000,00	250.000.000,00	6.850.000,00	97,33
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	
PENDAPATAN	35.000.000,00	70.400.000,00	(35.400.000,00)	201,14
BELANJA	5.580.974.430,00	10.881.003.980,00	(5.300.029.550,00)	194,96
Belanja Pegawai	3.579.408.382,00	3.497.358.306,00	82.050.076,00	97,70
Belanja Barang dan Jasa	1.052.444.989,00	1.011.165.184,00	41.279.805,00	96,07
Belanja Modal	949.121.059,00	931.978.500,00	17.142.559,00	98,19
SOSIAL	-	-	-	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	
PENDAPATAN	-	2.400.000,00	(2.400.000,00)	-
BELANJA	5.487.629.970,25	10.464.623.454,00	(4.976.993.483,75)	190,69
Belanja Pegawai	3.290.634.395,00	3.182.173.265,00	108.461.130,00	96,70
Belanja Barang dan Jasa	2.118.545.575,25	1.971.964.372,00	146.581.203,25	93,08
Belanja Modal	78.450.000,00	78.174.090,00	275.910,00	99,64
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	-	-	-	
TENAGA KERJA	-	-	-	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	
PENDAPATAN	13.200.000,00	16.200.000,00	(3.000.000,00)	122,72
BELANJA	8.874.821.198,00	15.955.042.516,00	(7.080.221.318,00)	179,77
Belanja Pegawai	2.964.073.598,00	2.914.212.114,00	49.861.484,00	98,31
Belanja Barang dan Jasa	1.355.542.300,00	1.289.756.944,00	65.785.356,00	95,14
Belanja Modal	4.555.205.300,00	3.773.552.200,00	781.653.100,00	82,84
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	
PANGAN	-	-	-	
Dinas Pangan	-	-	-	
BELANJA	4.381.629.882,00	8.610.369.096,00	(4.228.739.214,00)	196,51
Belanja Pegawai	2.493.015.904,00	2.458.201.190,00	34.814.714,00	98,60
Belanja Barang dan Jasa	1.848.943.503,00	1.807.312.883,00	41.630.620,00	97,74
Belanja Modal	39.670.475,00	39.670.475,00	-	100,00
PERTANAHAN	-	-	-	
LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	
BELANJA	5.245.262.263,00	8.880.602.092,00	(3.635.339.829,00)	169,30
Belanja Pegawai	2.400.729.422,00	2.350.111.690,00	50.617.732,00	97,89
Belanja Barang dan Jasa	1.697.537.341,00	1.609.276.438,00	88.260.903,00	94,80
Belanja Modal	1.146.995.500,00	480.912.918,00	666.082.582,00	41,92
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	
BELANJA	8.589.169.788,00	16.984.899.958,00	(8.395.730.170,00)	197,74
Belanja Pegawai	4.836.568.038,00	4.798.156.469,00	38.411.569,00	99,20
Belanja Barang dan Jasa	3.255.985.306,00	3.215.796.766,00	40.188.540,00	98,76
Belanja Modal	496.616.444,00	478.496.744,00	18.119.700,00	96,35

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN T.A. 2019

Uraian	APBD-P	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	
BELANJA	12.992.258.553,00	21.993.488.876,00	(9.001.230.323,00)	169,28
Belanja Pegawai	4.118.703.401,00	4.061.366.884,00	57.336.517,00	98,60
Belanja Barang dan Jasa	7.841.947.402,00	5.920.963.554,00	1.920.983.848,00	75,50
Belanja Modal	1.031.607.750,00	1.014.414.000,00	17.193.750,00	98,33
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	
PERHUBUNGAN	-	-	-	
Dinas Perhubungan	-	-	-	
PENDAPATAN	4.316.193.321,00	2.547.115.000,00	1.769.078.321,00	59,01
BELANJA	17.546.987.285,00	34.160.361.584,00	(16.613.374.299,00)	194,67
Belanja Pegawai	4.805.025.325,00	4.591.407.725,00	213.617.600,00	95,55
Belanja Barang dan Jasa	9.339.680.460,00	9.126.282.717,00	213.397.743,00	97,71
Belanja Modal	3.402.281.500,00	3.362.490.350,00	39.791.150,00	98,83
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	
Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	
PENDAPATAN	551.200.000,00	961.040.000,00	(409.840.000,00)	174,35
BELANJA	11.863.327.589,00	23.066.288.698,00	(11.202.961.109,00)	194,43
Belanja Pegawai	2.568.029.714,00	2.539.047.289,00	28.982.425,00	98,87
Belanja Barang dan Jasa	5.455.676.955,00	5.187.788.460,00	267.888.495,00	95,08
Belanja Modal	3.839.620.920,00	3.806.308.600,00	33.312.320,00	99,13
KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH	-	-	-	
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-	
PENDAPATAN	1.248.660.000,00	909.012.000,00	339.648.000,00	72,79
BELANJA	37.098.025.354,00	69.024.577.414,00	(31.926.552.060,00)	186,05
Belanja Pegawai	4.659.223.554,00	4.517.808.717,00	141.414.837,00	96,96
Belanja Barang dan Jasa	3.881.574.300,00	3.428.791.897,00	452.782.403,00	88,33
Belanja Modal	28.557.227.500,00	26.565.688.093,00	1.991.539.407,00	93,02
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN	-	-	-	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
PENDAPATAN	1.101.200.000,00	1.900.507.694,00	(799.307.694,00)	172,58
BELANJA	3.874.303.808,00	7.631.204.684,00	(3.756.900.876,00)	196,96
Belanja Pegawai	2.722.738.008,00	2.681.253.674,00	41.484.334,00	98,47
Belanja Barang dan Jasa	1.082.715.800,00	1.065.798.668,00	16.917.132,00	98,43
Belanja Modal	68.850.000,00	68.550.000,00	300.000,00	99,56
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	-	-	
PENDAPATAN	2.501.200.000,00	2.141.194.000,00	360.006.000,00	85,60
BELANJA	11.912.924.812,25	21.475.025.684,00	(9.562.100.871,75)	180,26
Belanja Pegawai	3.552.356.032,00	3.392.286.764,00	160.069.268,00	95,49
Belanja Barang dan Jasa	6.274.937.780,25	5.594.583.679,00	680.354.101,25	89,15
Belanja Modal	2.085.631.000,00	1.750.642.399,00	334.988.601,00	83,93
STATISTIK	-	-	-	
PERSANDIAN	-	-	-	
KEBUDAYAAN	-	-	-	
PERPUSTAKAAN	-	-	-	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN T.A. 2019

Uraian	APBD-P	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
KEARSIPAN	-	-	-	
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	
PENDAPATAN	600.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	200,00
BELANJA	4.690.372.580,00	9.107.641.286,00	(4.417.268.706,00)	194,17
Belanja Pegawai	3.125.551.580,00	3.076.554.077,00	48.997.503,00	98,43
Belanja Barang dan Jasa	1.026.177.000,00	953.510.816,00	72.666.184,00	92,91
Belanja Modal	538.644.000,00	523.755.750,00	14.888.250,00	97,23
URUSAN PILIHAN	-	-	-	
KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	
Dinas Perikanan	-	-	-	
PENDAPATAN	330.260.000,00	25.000.000,00	305.260.000,00	7,56
BELANJA	9.383.622.268,00	17.698.783.800,00	(8.315.161.532,00)	188,61
Belanja Pegawai	3.326.013.918,00	3.259.991.798,00	66.022.120,00	98,01
Belanja Barang dan Jasa	5.786.508.350,00	5.350.850.779,00	435.657.571,00	92,47
Belanja Modal	271.100.000,00	238.549.323,00	32.550.677,00	87,99
PARIWISATA	-	-	-	
PERTANIAN	-	-	-	
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	
PENDAPATAN	104.800.000,00	9.400.000,00	95.400.000,00	8,96
BELANJA	25.634.340.663,00	46.158.677.374,00	(20.524.336.711,00)	180,06
Belanja Pegawai	11.374.285.665,00	11.192.304.665,00	181.981.000,00	98,40
Belanja Barang dan Jasa	12.831.797.498,00	10.466.593.238,00	2.365.204.260,00	81,56
Belanja Modal	1.428.257.500,00	1.420.440.784,00	7.816.716,00	99,45
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	
PENDAPATAN	60.000.000,00	27.267.000,00	32.733.000,00	45,44
BELANJA	10.772.200.477,00	21.025.154.666,00	(10.252.954.189,00)	195,17
Belanja Pegawai	4.274.980.106,00	4.161.905.575,00	113.074.531,00	97,35
Belanja Barang dan Jasa	5.071.239.101,00	4.945.246.342,00	125.992.759,00	97,51
Belanja Modal	1.425.981.270,00	1.405.425.416,00	20.555.854,00	98,55
KEHUTANAN	-	-	-	
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	
Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	
PERDAGANGAN	-	-	-	
PERINDUSTRIAN	-	-	-	
TRANSMIGRASI	-	-	-	
PENUNJANG URUSAN	-	-	-	
PENDAPATAN	1.653.036.377.680,00	3.207.279.275.334,86	(1.554.242.897.654,86)	
BELANJA	338.563.550.682,68	399.954.919.720,71	(61.391.369.038,03)	
Belanja Pegawai	28.814.969.108,28	27.968.251.386,00	846.717.722,28	
Belanja Barang dan Jasa	21.733.318.413,50	20.507.296.163,00	1.226.022.250,50	
Belanja Modal	1.899.270.493,00	1.738.710.320,00	160.560.173,00	
Belanja Bunga	1.371.872.644,00	1.019.584.696,00	352.287.948,00	
Belanja Hibah	17.607.318.502,00	15.945.825.725,00	1.661.492.777,00	
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	176.500.000,00	23.500.000,00	
Belanja Bagi Hasil	5.877.729.951,90	3.153.892.970,77	2.723.836.981,13	
Belanja Bantuan Keuangan	258.901.553.570,00	258.801.553.569,94	100.000.000,06	
Belanja Tidak Terduga	2.157.518.000,00	1.643.568.300,00	513.949.700,00	
PENUNJANG URUSAN	-	-	-	

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2019

Uraian	APBD-P	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
INSPEKTORAT	-	-	-	
Inspektorat Daerah	-	-	-	
BELANJA	7.792.269.571,00	15.254.571.104,00	(7.462.301.533,00)	195,76
Belanja Pegawai	4.948.079.086,00	4.919.804.538,00	28.274.548,00	99,42
Belanja Barang dan Jasa	2.667.990.485,00	2.532.871.814,00	135.118.671,00	94,93
Belanja Modal	176.200.000,00	174.609.200,00	1.590.800,00	99,09
PERENCANAAN	-	-	-	
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	
PENDAPATAN	1.200.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	200,00
BELANJA	6.669.337.652,00	12.661.942.970,00	(5.992.605.318,00)	189,85
Belanja Pegawai	4.197.225.184,00	4.166.406.861,00	30.818.323,00	99,26
Belanja Barang dan Jasa	2.378.212.468,00	2.077.561.524,00	300.650.944,00	87,35
Belanja Modal	93.900.000,00	87.003.100,00	6.896.900,00	92,65
KEUANGAN	-	-	-	
PPKD	-	-	-	
PENDAPATAN	1.607.856.580.058,00	3.128.449.300.604,00	(1.520.592.720.546,00)	194,57
BELANJA	286.115.992.667,90	299.526.403.982,71	(13.410.411.314,81)	104,68
Belanja Bunga	1.371.872.644,00	1.019.584.696,00	352.287.948,00	74,32
Belanja Hibah	17.607.318.502,00	15.945.825.725,00	1.661.492.777,00	90,56
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	176.500.000,00	23.500.000,00	88,25
Belanja Bagi Hasil	5.877.729.951,90	3.153.892.970,77	2.723.836.981,13	53,65
Belanja Bantuan Keuangan	258.901.553.570,00	258.801.553.569,94	100.000.000,06	99,96
Belanja Tidak Terduga	2.157.518.000,00	1.643.568.300,00	513.949.700,00	76,17
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	
PENDAPATAN	17.247.130.840,00	26.542.421.970,06	(9.295.291.130,06)	153,89
BELANJA	22.459.316.961,78	43.055.120.018,00	(20.595.803.056,22)	191,70
Belanja Pegawai	10.897.298.701,28	10.533.394.975,00	363.903.726,28	96,66
Belanja Barang dan Jasa	10.501.531.792,50	10.082.258.944,00	419.272.848,50	96,00
Belanja Modal	1.060.486.468,00	911.906.090,00	148.580.378,00	85,98
Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	
PENDAPATAN	27.930.266.782,00	52.282.752.760,80	(24.352.485.978,80)	187,19
BELANJA	7.129.404.557,00	13.531.657.514,00	(6.402.252.957,00)	189,80
Belanja Pegawai	4.412.031.021,00	4.105.136.709,00	306.894.312,00	93,04
Belanja Barang dan Jasa	2.439.639.511,00	2.386.200.118,00	53.439.393,00	97,80
Belanja Modal	277.734.025,00	274.491.930,00	3.242.095,00	98,83
KEPEGAWAIAN	-	-	-	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	
PENDAPATAN	1.200.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	200,00
BELANJA	8.397.229.273,00	15.925.224.132,00	(7.527.994.859,00)	189,64
Belanja Pegawai	4.360.335.116,00	4.243.508.303,00	116.826.813,00	97,32
Belanja Barang dan Jasa	3.745.944.157,00	3.428.403.763,00	317.540.394,00	91,52
Belanja Modal	290.950.000,00	290.700.000,00	250.000,00	99,91
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	
URUSAN PENDUKUNG	-	-	-	
PENDAPATAN	100.000.000,00	35.800.000,00	64.200.000,00	
BELANJA	101.805.032.291,20	150.243.384.800,00	(48.438.352.508,80)	
Belanja Pegawai	38.721.979.307,00	36.039.915.396,00	2.682.063.911,00	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2019

Uraian	APBD-P	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
Belanja Barang dan Jasa	57.761.575.534,20	36.103.948.847,00	21.657.626.687,20	
Belanja Modal	5.321.477.450,00	2.977.828.157,00	2.343.649.293,00	
URUSAN PENDUKUNG	-	-	-	
SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	
Sekretariat Daerah	-	-	-	
PENDAPATAN	50.000.000,00	35.800.000,00	14.200.000,00	71,60
BELANJA	35.146.762.451,10	67.773.238.608,00	(32.626.476.156,90)	192,82
Belanja Pegawai	14.535.060.808,00	14.216.547.740,00	318.513.068,00	97,80
Belanja Barang dan Jasa	18.340.962.918,10	17.429.087.014,00	911.875.904,10	95,02
Belanja Modal	2.270.738.725,00	2.240.984.550,00	29.754.175,00	98,68
Sekretariat Daerah	-	-	-	
PENDAPATAN	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	
BELANJA	511.115.590,00	-	511.115.590,00	-
Belanja Pegawai	39.400.000,00	-	39.400.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	471.715.590,00	-	471.715.590,00	-
Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	
BELANJA	2.109.321.300,35	-	2.109.321.300,35	-
Belanja Pegawai	66.800.000,00	-	66.800.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	2.042.521.300,35	-	2.042.521.300,35	-
Bagian Hukum	-	-	-	
BELANJA	587.047.565,00	-	587.047.565,00	-
Belanja Pegawai	52.400.000,00	-	52.400.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	534.647.565,00	-	534.647.565,00	-
Bagian Perekonomian dan SDA	-	-	-	
BELANJA	439.829.050,00	-	439.829.050,00	-
Belanja Pegawai	73.200.000,00	-	73.200.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	366.629.050,00	-	366.629.050,00	-
Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	-	-	-	
BELANJA	448.155.758,00	-	448.155.758,00	-
Belanja Pegawai	61.200.000,00	-	61.200.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	384.955.758,00	-	384.955.758,00	-
Belanja Modal	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	
BELANJA	286.310.468,00	-	286.310.468,00	-
Belanja Pegawai	74.200.000,00	-	74.200.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	212.110.468,00	-	212.110.468,00	-
Bagian Umum	-	-	-	
BELANJA	13.595.590.567,00	-	13.595.590.567,00	-
Belanja Pegawai	853.950.000,00	-	853.950.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	10.526.801.842,00	-	10.526.801.842,00	-
Belanja Modal	2.214.838.725,00	-	2.214.838.725,00	-
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	-	-	-	
BELANJA	1.273.290.000,00	-	1.273.290.000,00	-
Belanja Pegawai	66.600.000,00	-	66.600.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	1.155.790.000,00	-	1.155.790.000,00	-
Belanja Modal	50.900.000,00	-	50.900.000,00	-
Bagian Organisasi	-	-	-	

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2019

Uraian	APBD-P	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
BELANJA	516.216.567,75	-	516.216.567,75	-
Belanja Pegawai	26.400.000,00	-	26.400.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	489.816.567,75	-	489.816.567,75	-
Bagian Keuangan	-	-	-	-
BELANJA	1.280.179.641,00	-	1.280.179.641,00	-
Belanja Pegawai	375.250.000,00	-	375.250.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	901.929.641,00	-	901.929.641,00	-
Belanja Modal	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
BELANJA	1.004.485.136,00	-	1.004.485.136,00	-
Belanja Pegawai	101.500.000,00	-	101.500.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	902.985.136,00	-	902.985.136,00	-
Staf Ahli	-	-	-	-
BELANJA	103.310.000,00	-	103.310.000,00	-
Belanja Pegawai	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	90.110.000,00	-	90.110.000,00	-
Asisten	-	-	-	-
BELANJA	270.450.000,00	-	270.450.000,00	-
Belanja Pegawai	9.500.000,00	-	9.500.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa	260.950.000,00	-	260.950.000,00	-
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-
BELANJA	770.363.594,00	1.540.727.188,00	(770.363.594,00)	200,00
Belanja Pegawai	770.363.594,00	770.363.594,00	-	100,00
SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
Sekretariat DPRD	-	-	-	-
BELANJA	25.648.614.492,00	46.275.837.376,00	(20.627.222.884,00)	180,42
Belanja Pegawai	3.788.964.794,00	3.726.213.248,00	62.751.546,00	98,34
Belanja Barang dan Jasa	21.079.649.698,00	18.674.861.833,00	2.404.787.865,00	88,59
Belanja Modal	780.000.000,00	736.843.607,00	43.156.393,00	94,46
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-
BELANJA	17.813.990.111,00	34.653.581.628,00	(16.839.591.517,00)	194,53
Belanja Pegawai	17.813.990.111,00	17.326.790.814,00	487.199.297,00	97,26
KEWILAYAHAN	-	-	-	-
PENDAPATAN	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-
BELANJA	31.758.572.811,25	62.344.763.414,00	(30.586.190.602,75)	-
Belanja Pegawai	25.082.322.631,00	24.627.297.798,00	455.024.833,00	-
Belanja Barang dan Jasa	5.977.195.732,25	5.855.110.008,00	122.085.724,25	-
Belanja Modal	699.054.448,00	689.973.901,00	9.080.547,00	-
KEWILAYAHAN	-	-	-	-
KECAMATAN	-	-	-	-
Kecamatan Koto XI Tarusan	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
BELANJA	3.033.635.639,00	6.010.031.788,00	(2.976.396.149,00)	198,11
Belanja Pegawai	2.557.622.859,00	2.535.971.425,00	21.651.434,00	99,15
Belanja Barang dan Jasa	449.212.780,00	442.485.469,00	6.727.311,00	98,50
Belanja Modal	26.800.000,00	26.559.000,00	241.000,00	99,10
Kecamatan Bayang	-	-	-	-
BELANJA	2.792.966.634,25	5.531.337.020,00	(2.738.370.385,75)	198,04
Belanja Pegawai	2.324.548.144,00	2.298.426.386,00	26.121.758,00	98,87
Belanja Barang dan Jasa	451.372.490,25	450.472.124,00	900.366,25	99,80

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2019

Uraian	APBD-P	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
Belanja Modal	17.046.000,00	16.770.000,00	276.000,00	98,38
Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
BELANJA	2.010.171.035,00	3.999.493.132,00	(1.989.322.097,00)	198,96
Belanja Pegawai	1.603.462.035,00	1.598.704.513,00	4.757.522,00	99,70
Belanja Barang dan Jasa	369.711.000,00	364.044.053,00	5.666.947,00	98,46
Belanja Modal	36.998.000,00	36.998.000,00	-	100,00
Kecamatan IV Jurai	-	-	-	-
BELANJA	2.340.897.772,00	4.570.790.604,00	(2.229.892.832,00)	195,25
Belanja Pegawai	1.898.154.168,00	1.861.481.839,00	36.672.329,00	98,06
Belanja Barang dan Jasa	378.443.604,00	360.941.872,00	17.501.732,00	95,37
Belanja Modal	64.300.000,00	62.971.591,00	1.328.409,00	97,93
Kecamatan Batang Kapas	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
BELANJA	2.091.699.032,00	4.071.135.964,00	(1.979.436.932,00)	194,63
Belanja Pegawai	1.686.109.532,00	1.653.023.158,00	33.086.374,00	98,03
Belanja Barang dan Jasa	361.089.500,00	338.124.824,00	22.964.676,00	93,64
Belanja Modal	44.500.000,00	44.420.000,00	80.000,00	99,82
Kecamatan Sutera	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
BELANJA	2.045.678.204,00	4.035.252.030,00	(1.989.573.826,00)	197,25
Belanja Pegawai	1.628.714.504,00	1.610.615.482,00	18.099.022,00	98,88
Belanja Barang dan Jasa	416.963.700,00	407.010.533,00	9.953.167,00	97,61
Kecamatan Lengayang	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
BELANJA	2.394.676.490,00	4.624.798.776,00	(2.230.122.286,00)	193,12
Belanja Pegawai	1.926.236.990,00	1.869.466.086,00	56.770.904,00	97,05
Belanja Barang dan Jasa	392.439.500,00	368.933.302,00	23.506.198,00	94,01
Belanja Modal	76.000.000,00	74.000.000,00	2.000.000,00	97,36
Kecamatan Ranah Pesisir	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
BELANJA	2.732.254.366,00	5.350.777.920,00	(2.618.523.554,00)	195,83
Belanja Pegawai	2.143.238.359,00	2.089.619.000,00	53.619.359,00	97,49
Belanja Barang dan Jasa	439.016.007,00	437.169.960,00	1.846.047,00	99,57
Belanja Modal	150.000.000,00	148.600.000,00	1.400.000,00	99,06
Kecamatan Linggo Sari Baganti	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
BELANJA	2.223.325.628,00	4.385.315.234,00	(2.161.989.606,00)	197,24
Belanja Pegawai	1.812.158.678,00	1.781.578.167,00	30.580.511,00	98,31
Belanja Barang dan Jasa	357.466.950,00	357.379.450,00	87.500,00	99,97
Belanja Modal	53.700.000,00	53.700.000,00	-	100,00
Kecamatan Pancung Soal	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
BELANJA	1.717.474.141,00	3.293.842.902,00	(1.576.368.761,00)	191,78
Belanja Pegawai	1.327.628.341,00	1.266.624.143,00	61.004.198,00	95,40
Belanja Barang dan Jasa	357.345.800,00	347.797.308,00	9.548.492,00	97,32
Belanja Modal	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00
Kecamatan Airpura	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
BELANJA	1.689.761.810,00	3.344.729.374,00	(1.654.967.564,00)	197,94

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2019

Uraian	APBD-P	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
Belanja Pegawai	1.270.547.950,00	1.258.858.166,00	11.689.784,00	99,07
Belanja Barang dan Jasa	392.213.860,00	386.506.521,00	5.707.339,00	98,54
Belanja Modal	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
BELANJA	1.610.615.826,00	3.164.570.976,00	(1.553.955.150,00)	196,48
Belanja Pegawai	1.221.196.226,00	1.204.189.234,00	17.006.992,00	98,60
Belanja Barang dan Jasa	330.933.522,00	320.770.454,00	10.163.068,00	96,92
Belanja Modal	58.486.078,00	57.325.800,00	1.160.278,00	98,01
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	-
BELANJA	1.531.844.669,00	3.033.541.648,00	(1.501.696.979,00)	198,03
Belanja Pegawai	1.097.495.205,00	1.087.883.774,00	9.611.431,00	99,12
Belanja Barang dan Jasa	373.258.079,00	370.377.550,00	2.880.529,00	99,22
Belanja Modal	61.091.385,00	58.509.500,00	2.581.885,00	95,77
Kecamatan Lunang	-	-	-	-
PENDAPATAN	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
BELANJA	1.729.258.254,00	3.384.398.362,00	(1.655.140.108,00)	195,71
Belanja Pegawai	1.264.897.029,00	1.231.606.159,00	33.290.870,00	97,36
Belanja Barang dan Jasa	430.748.250,00	426.993.022,00	3.755.228,00	99,12
Belanja Modal	33.612.975,00	33.600.000,00	12.975,00	99,96
Kecamatan Silaut	-	-	-	-
BELANJA	1.814.313.311,00	3.544.747.684,00	(1.730.434.373,00)	195,37
Belanja Pegawai	1.320.312.611,00	1.279.250.266,00	41.062.345,00	96,88
Belanja Barang dan Jasa	476.980.690,00	476.103.566,00	877.124,00	99,81
Belanja Modal	17.020.010,00	17.020.010,00	-	100,00
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-

Sumber: BPKD, 2019

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja yang ditetapkan.

a. Pendapatan

Secara umum capaian kinerja APBD Kabupaten Pesisir Selatan baik dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran dapat berjalan dengan baik. Pendapatan pada APBD Perubahan TA 2019 ditargetkan sebesar Rp1.772.707.595.258,00 dapat direalisasikan Rp1.699.011.062.108,43 atau 95,84%, sedangkan Belanja dari alokasi sebesar Rp1.582.144.698.309,49 realisasinya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.431.684.077.296,00 atau 90,49%. Walaupun secara umum capaian kinerja APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dapat tercapai namun dalam pelaksanaannya juga ditemui hambatan, antara lain terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2019 sebesar 95,84%, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2018 sebesar 95,75%. Kalau dilihat capaian masing-masing sumber pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar 87,57%, Pendapatan Transfer sebesar 97,48% dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 84,13%.

Capaian kinerja pendapatan tahun 2019 terlihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
PENDAPATAN	1.772.707.595.258,00	1.699.257.519.145,43	95,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.941.080.200,00	134.804.594.146,43	87,57
Pendapatan Pajak Daerah	27.337.210.782,00	23.797.657.254,87	87,05
Pendapatan Retribusi Daerah	13.505.569.321,00	5.535.119.147,00	40,98
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.395.930.840,00	8.395.930.840,00	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah	104.702.369.257,00	97.075.886.904,56	92,72
PENDAPATAN TRANSFER	1.516.188.955.658,00	1.477.908.691.691,00	97,48
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.241.343.355.079,00	1.213.725.540.008,00	97,78
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	196.252.700.000,00	196.252.700.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	70.274.416.579,00	67.930.451.683,00	96,66
Bantuan Keuangan	8.318.484.000,00	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	102.577.559.400,00	86.297.776.271,00	84,13
Pendapatan Hibah	102.577.559.400,00	86.297.776.271,00	84,13

Sumber: BPKD, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja pendapatan secara persentase yang tertinggi akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kinerja tertinggi adalah pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yakni sebesar 100%;
- 2) Kinerja tertinggi kedua adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya sebesar 100%.

Terkait dengan capaian kinerja di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan tetap terus berupaya untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, disamping tetap mengusahakan secara optimal pemanfaatan pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain kedua capaian kinerja tertinggi tersebut di atas sudah memadai perkiraan yaitu pendapatan bagi hasil pajak provinsi relatif stabil.

Kinerja pendapatan yang mengalami penurunan (tidak mencapai target) ada sebanyak tiga item yaitu Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Kinerja pendapatan secara persentase yang terendah akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kinerja terendah adalah Pendapatan Retribusi Daerah yakni hanya sebesar Rp5.535.119.147,00 (40,98%) dari target sebesar Rp13.505.569.321,00;
- 2) Kinerja terendah kedua adalah Pendapatan Hibah yang hanya sebesar Rp86.297.776.271,00 (84,13%) dari target sebesar Rp102.577.559.400,00.
- 3) Kinerja terendah ketiga adalah Pendapatan Pajak Daerah yang hanya sebesar Rp23.797.657.254,87 (87,05%) dari target sebesar Rp27.337.210.782,00.

Dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan terutama PAD, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

- 1) Ekstensifikasi penerimaan
Tindakan yang dilakukan antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi daerah, menghitung potensi dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat.
- 2) Menata proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam menata proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, menata pembukuan di wajib pajak, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD.
- 3) Meningkatkan pengawasan
Upaya yang dapat dilakukan antara lain: melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- 4) Penyederhanaan Mekanisme Penyetoran
Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain; penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.
- 5) Harmonisasi SKPD yang Berwenang
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh SKPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan PAD.

b. Belanja

Pada tahun 2019, dari total Anggaran Belanja sebesar Rp1.582.144.698.309,49 terealisasi sebesar Rp1.431.684.077.296,00. Komposisi realisasi belanja di tahun 2019 secara garis besar dibagi tiga, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2019**

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
BELANJA	1.582.144.698.309,49	1.431.684.077.296,00	90,49
BELANJA OPERASI	1.154.588.987.259,49	1.105.164.932.412,00	95,72
Belanja Pegawai	740.947.773.388,19	727.512.673.664,00	98,19
Belanja Barang dan Jasa	394.462.022.725,30	360.510.348.327,00	91,39
Belanja Bunga	1.371.872.644,00	1.019.584.696,00	74,32
Belanja Hibah	17.607.318.502,00	15.945.825.725,00	90,56
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	176.500.000,00	88,25
BELANJA MODAL	425.398.193.050,00	324.875.576.584,00	76,37
Belanja Modal Tanah	9.011.448.023,00	2.213.332.947,00	24,56
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.354.778.599,00	75.483.262.574,00	84,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.900.547.836,00	105.936.860.332,00	60,23
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.939.133.200,00	141.059.929.431,00	93,45
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	192.285.392,00	182.191.300,00	94,75
BELANJA TAK TERDUGA	2.157.518.000,00	1.643.568.300,00	76,18
Belanja Tak Terduga	2.157.518.000,00	1.643.568.300,00	76,18

Sumber: BPKD, 2019

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi menjelaskan tentang definisi, dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, beban, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi pada Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 48 entitas terdiri dari 1 KDH, 1 DPRD, 2 Sekretariat, 1 PPKD, 1 Inspektorat, 1 RSUD-BLUD, 5 Badan, 21 Dinas, dan 15 Kecamatan, sebagai berikut:

- 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Rumah Sakit Umum Daerah
- 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- 6 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 7 Dinas Satuan Polisi, Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 11 Dinas Pangan
- 12 Dinas Lingkungan Hidup
- 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 15 Dinas Perhubungan
- 16 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 17 Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
- 18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

- 19 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- 20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 21 Dinas Perikanan
- 22 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 24 Inspektorat Daerah
- 25 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 26 PPKD
- 27 Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 28 Badan Pendapatan
- 29 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 30 Sekretariat Daerah
- 31 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 32 Sekretariat DPRD
- 33 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 34 Kecamatan Koto XI Tarusan
- 35 Kecamatan Bayang
- 36 Kecamatan Bayang Utara
- 37 Kecamatan IV Jurai
- 38 Kecamatan Batang Kapas
- 39 Kecamatan Sutera
- 40 Kecamatan Lengayang
- 41 Kecamatan Ranah Pesisir
- 42 Kecamatan Linggo Sari Baganti
- 43 Kecamatan Pancung Soal
- 44 Kecamatan Air Pura
- 45 Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- 46 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- 47 Kecamatan Lunang
- 48 Kecamatan Silaut

4.2 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang ditetapkan.

b. Asumsi Kesenambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip Realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

4.4 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan Tahun 2019 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pesisir Selatan disusun berbasis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan pada kas umum daerah.

Rekening kas umum daerah (Kasda) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pos-pos yang terdapat pada LRA terdiri dari:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kasda, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

4. Surplus/defisit

Surplus/defisit merupakan selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.

5. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

6. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

7. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau selisih kurang antara realisasi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah selama satu periode pelaporan.

4.4.2 Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan lain-lain.

4.4.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi/pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- c. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;
- d. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4.4.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Daerah;
- b) Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
- c) Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.4.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi sumber, penggunaan, dan kenaikan atau penurunan kas selama satu periode akuntansi pada tanggal pelaporan serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.4.6 Neraca

Neraca Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pos-pos Neraca Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, *dividend* dan *royalty*, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu Permanen dan Nonpermanen.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

e. Aset Lainnya

Yang termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

7. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
8. Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
9. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.5 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing maka harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Kebijakan lebih terinci tentang perlakuan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.6 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. LKPD disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan Bendahara Umum Daerah, SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Pejabat yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Seluruh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang

Proses penyusunan Laporan Keuangan dilakukan melalui proses konsolidasi/penggabungan dokumen/catatan/pembukuan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan maupun penelaahan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018.

Dalam proses konsolidasi ini juga dipertimbangkan beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain; jenis laporan; basis akuntansi; pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan; struktur APBD; klasifikasi anggaran; aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah ini dilakukan secara terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Microsoft Office Excel.

Selanjutnya, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini telah dilampirkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Ikhtisar Laporan dana Desa sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)
5.1.1	PENDAPATAN	1.699.011.062.108,43	1.529.141.850.638,36
Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada TA 2019, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.772.707.595.258,00 dan terealisasi sebesar Rp1.699.011.062.108,43 yang terdiri dari:			
		Anggaran 2019	Realisasi 2019
a	Pendapatan Asli Daerah	Rp 153.941.080.200,00	Rp 134.804.594.146,43
b	Pendapatan Transfer - LRA	Rp 1.516.188.955.658,00	Rp 1.477.908.691.691,00
c	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	Rp 102.577.559.400,00	Rp 86.297.776.271,00
		Rp 1.772.707.595.258,00	Rp 1.699.011.062.108,43

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Target PAD pada TA 2019 adalah sebesar Rp153.941.080.200,00, dengan realisasi sebesar Rp134.804.594.146,43 atau 87,51%. Jika dibandingkan dengan TA 2018 yang sebesar Rp123.906.524.443,36 realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 8,79%.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pendapatan Pajak Daerah	Rp 23.797.657.254,87	Rp 23.751.789.554,97
Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp23.737.210.782,00 dan direalisasikan sebesar Rp23.795.320.529,87 atau sebesar 87,05%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yang sebesar Rp23.751.789.554,97, Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp43.867.699,90 atau 0,19%.		

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	%
1 Pajak Hotel	Rp 650.000.000,00	Rp 442.211.976,00	68,03%
2 Pajak Restoran	Rp 3.636.396.489,00	Rp 2.933.500.278,00	80,67%
3 Pajak Hiburan	Rp 115.000.000,00	Rp 31.768.700,00	27,62%
4 Pajak Reklame	Rp 500.000.000,00	Rp 456.452.875,00	91,29%
5 Pajak Penerangan Jalan	Rp 13.973.629.891,00	Rp 13.441.013.311,00	96,19%
6 Pajak Air Tanah	Rp 150.000.000,00	Rp 1.500.000,00	
7 Pajak Sarang Burung Walet	Rp 150.000.000,00	Rp -	
8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 2.500.000.000,00	Rp 3.173.576.647,87	126,94%
9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp 2.162.184.402,00	Rp 1.764.695.519,00	81,62%
10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 3.500.000.000,00	Rp 1.552.937.948,00	44,37%
Jumlah	Rp 27.337.210.782,00	Rp 23.797.657.254,87	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tertinggi pada TA 2019 adalah pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 126,94%. Sedangkan realisasi terendah adalah pada Pajak Hiburan sebesar 27,62%. Rendahnya realisasi Pajak Hiburan ini terutama disebabkan karena berkurangnya jumlah pertunjukan dan pagelaran hiburan, serta masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Hiburan karena masih kurangnya sosialisasi tentang Pajak Hiburan.

b) Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 5.535.119.147,00	Rp 4.552.508.117,00
Target Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp13.505.569.321,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.535.119.147,00 atau sebesar 40,98%. Bila dibandingkan dengan penerimaan retribusi daerah Tahun 2018 sebesar Rp4.552.508.117,00 penerimaan untuk Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp982.611.030,00 atau 21,58%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 adalah sebagai berikut:		

	Anggaran	Realisasi	%
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 1.187.000.000,00	Rp 895.712.300,00	75,46%
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp 1.457.500.000,00	Rp 401.232.000,00	27,53%
3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 1.141.193.321,00	Rp 349.547.000,00	30,63%
4 Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 423.500.000,00	Rp 33.050.000,00	
5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 1.650.000.000,00	Rp 482.100.500,00	29,22%
6 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Rp 220.000.000,00	Rp 34.800.000,00	15,82%
7 Retribusi Pengendaraan Menara Telekomunikasi	Rp 550.000.000,00	Rp 479.320.000,00	87,15%
8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 1.004.456.000,00	Rp 247.665.000,00	24,66%
9 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp 841.920.000,00	Rp 425.119.500,00	50,49%
10 Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 1.100.000.000,00	Rp 143.252.000,00	13,02%
11 Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp 55.000.000,00	Rp 9.970.000,00	18,13%
12 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	Rp 2.500.000.000,00	Rp 1.070.597.000,00	42,82%
13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rp 275.000.000,00	Rp 12.500.000,00	4,55%
14 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp 1.100.000.000,00	Rp 950.253.847,00	86,39%
Jumlah	Rp 13.505.569.321,00	Rp 5.535.119.147,00	

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TA 2019

Realisasi Retribusi Daerah yang tertinggi pada TA 2019 adalah pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 87,15%. Sedangkan realisasi terendah adalah pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 4,55%. Rendahnya penerimaan pada retribusi ini dikarenakan terjadinya peningkatan target yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu.

	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.395.930.840,00	5.711.160.313,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan realisasi dari bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah, Bank Nagari. Realisasi pada TA 2019 adalah sebesar Rp8.395.930.840,00. Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp5.711.160.313,00, penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp2.684.770.527,00 atau sebesar 31,98%.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	97.075.886.904,56	Rp	89.891.066.458,39
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada TA 2019 ditargetkan sebesar Rp104.702.369.257,00 dan direalisasikan sebesar Rp97.075.886.904,56 atau sebesar 92,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp89.884.837.911,39 terjadi kenaikan sebesar Rp7.184.820.446,17 atau 7,99%. Rincian Lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:				

	Anggaran	Realisasi	%
1 Hasil Penjualan Aset Daerah	Rp 850.000.000,00	Rp	0,00%
2 Penerimaan Jasa Giro	Rp 3.000.000.000,00	Rp 1.320.565.294,16	44,02%
3 Pendapatan Bunga	Rp 5.000.000.000,00	Rp 3.554.677.351,19	71,09%
4 Pendapatan BLUD	Rp 73.752.369.257,00	Rp 68.614.695.806,00	93,03%
5 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	Rp 22.100.000.000,00	Rp 23.585.948.453,21	106,72%
	Rp 104.702.369.257,00	Rp 97.075.886.904,56	

Penerimaan Jasa Giro dan Bunga berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah berupa giro dan deposito pada Bank Nagari Sumbang, BRI Cabang Paiman, BSM Cabang Paiman, dan BNI Kantor Kas Paiman. Untuk Pendapatan BLUD berasal dari BLUD RSUD M. Zein Paiman. Sedangkan Lain-lain PAD yang sah lainnya terdiri atas penerimaan daerah yang sifatnya tidak rutin dan berulang, diantaranya Denda Ketertambatan, Hasil Audit, Bunga K-per dan penerimaan lainnya, serta penerimaan daerah yang secara ketentuan penganggaran harus dicatat sebagai PAD Lainnya, yaitu berupa Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada Secara keseluruhan, kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Pendapatan Daerah adalah 7,94%. Nilai ini menurun dibandingkan TA 2018 yang sebesar 8,10%. Kontribusi masing-masing item PAD terhadap realisasi Pendapatan Daerah secara total dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

	Realisasi	% Kontribusi
1 Pendapatan Pajak Daerah	Rp 23.797.657.254,87	17,65%
2 Pendapatan Restribusi Daerah	Rp 5.535.119.147,00	4,11%
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 8.395.930.840,00	6,23%
4 Lain-lain PAD yang Sah	Rp 97.075.886.904,56	72,01%
Total PAD	Rp 134.804.594.146,43	

2) Pendapatan Transfer	Rp	1.477.908.691.691,00	Rp	1.332.370.204.362,00
Pendapatan Transfer merupakan realisasi pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan, Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan selama TA 2019 dan 2018. Pendapatan transfer Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.516.188.955.658,00 dan terealisasi sebesar 97,48% atau Rp1.477.908.691.691,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.332.370.204.362,00 penerimaan pendapatan transfer naik sebesar Rp145.538.487.329,00 atau 9,84%. Rincian realisasi penerimaan Pendapatan Transfer sebagai berikut:				

I Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Rp	1.213.725.540.008,00	Rp	1.120.389.365.019,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.241.343.355.079,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.213.725.540.008,00 atau 97,78%. Realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp93.336.174.989,00 atau 7,69% dibandingkan realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp1.120.389.365.019,00. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:				
a) Bagi Hasil Pajak	Rp	16.202.097.876,00	Rp	15.596.671.431,00
Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2019, jika dibandingkan dengan TA 2018, mengalami kenaikan sebesar Rp605.426.445,00 atau 3,73%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terbesar pada TA 2019 adalah pada Bagi Hasil dari PPH Pasar sebesar 2584,06%, sedangkan yang terendah adalah pada Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan yang diberikan kepada Kabupaten sebesar 82,58%. Rincian realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:				

Rincian	Anggaran	Realisasi	%
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	Rp 2.690.984.000,00	Rp 2.326.309.731,00	86,45%
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	Rp 6.543.159.000,00	Rp 5.403.531.693,00	82,58%
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	Rp 4.306.522.000,00	Rp 4.654.224.490,00	108,07%
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp 209.985.000,00	Rp 210.212.612,00	100,11%
Bagi Hasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Kabupaten	Rp 3.753.163.000,00	Rp 3.578.929.555,00	95,36%
Bagi Hasil dari PPH Pasar	Rp 1.118.000,00	Rp 28.889.795,00	2584,06%
Jumlah	Rp 17.504.931.000,00	Rp 16.202.097.876,00	

		Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)
b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		3.240.862.550,00	1.532.868.878,00
Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2019 mengalami kenaikan sejumlah Rp1.707.993.672,00 atau 52,70% bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2018. Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam tertinggi berasal dari Pertambangan Panas Bumi sebesar 114,35%, sedangkan terendah berasal dari Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) sebesar 60,00%. Rincian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebagai berikut:			

	Anggaran	Realisasi	%
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	Rp 298.913.000,00	Rp 179.347.800,00	60,00%
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	Rp 95.309.000,00	Rp 105.721.957,00	110,93%
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	Rp 2.860.966.079,00	Rp 2.315.016.633,00	80,92%
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	Rp 983.593.000,00	Rp 590.155.800,00	60,00%
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	Rp 44.267.000,00	Rp 50.620.360,00	114,35%
Total	Rp 4.283.048.079,00	Rp 3.240.862.550,00	

c) Pendapatan Dana Alokasi Umum	Rp 862.608.266.000,00	Rp 838.100.134.000,00
Penerimaan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum ditujukan untuk pelaksanaan kewenangan yang diimpikan kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Jumlah penerimaan Dana Alokasi Umum mencapai 100,01% dari jumlah yang disanggakan TA 2019 dan meningkat sebesar 2,84% dari tahun 2018.		

d) Pendapatan Dana Alokasi Khusus	Rp 331.674.313.582,00	Rp 265.159.690.710
Realisasi penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus TA 2019 dan 2018 dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pembangunan/pengadaan fisik sarana dan prasarana dasar di daerah yang menjadi prioritas nasional. Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp66.514.622.872,00 atau 20,05% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018. Jumlah penerimaan Dana Alokasi Khusus dirinci sebagai berikut:		

	Anggaran	Realisasi	%
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	Rp 53.431.450.000,00	Rp 53.423.697.000,00	99,99%
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	Rp 6.980.083.000,00	Rp 6.307.422.558,00	90,36%
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	Rp 10.623.267.000,00	Rp 10.359.069.000,00	97,51%
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	Rp 4.305.808.000,00	Rp 4.305.808.000,00	100,00%
DAK Bidang Keluarga Berencana	Rp 1.233.000.000,00	Rp -	-
DAK Bidang Kesehatan	Rp 41.412.744.000,00	Rp 40.562.044.634,00	97,95%
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 1.724.220.000,00	Rp 1.641.489.000,00	95,20%
DAK Bidang Transportasi Perdesaan	Rp 5.177.500.000,00	Rp 4.353.747.370,00	84,09%
DAK Bidang Perdagangan	Rp 17.433.132.000,00	Rp 16.551.427.843,00	94,94%
DAK Bidang Linekungan Hidro	Rp 848.465.000,00	Rp 193.318.200,00	22,78%
DAK Bidang Pertanian	Rp 3.527.814.000,00	Rp 3.522.012.000,00	99,84%
DAK Bidang Pendidikan	Rp 24.362.761.000,00	Rp 24.129.300.315,00	99,04%
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	Rp 6.177.600.000,00	Rp 6.120.600.000,00	99,08%
DAK Tunjangan Profesi Guru (DAK NON FISIK)	Rp 144.720.428.000,00	Rp 134.215.132.840,00	92,74%
DAK Tambahan Penghasilan Guru (DAK NON FISIK)	Rp 1.827.000.000,00	Rp 588.375.000,00	32,20%
DAK Bantuan Operasional Kesehatan (DAK NON FISIK)	Rp 14.970.171.000,00	Rp 14.897.969.932,00	99,52%
DAK Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)	Rp 1.515.058.000,00	Rp -	-
DAK Jamuan Persalinan (DAK NON FISIK)	Rp 1.870.000.000,00	Rp -	-
DAK Bantuan Operasional KB (DAK NON FISIK)	Rp 4.146.020.000,00	Rp 1.899.488.881,00	45,81%
DAK Pariwisata	Rp 1.900.813.000,00	Rp 1.696.558.989,00	89,25%
DAK Tunjangan Khusus Guru	Rp 3.851.752.000,00	Rp 1.936.371.920,00	50,27%
DAK Dana Pelayanan Administrasi Keperawatan	Rp 1.488.701.000,00	Rp 1.478.710.100,00	99,33%
DAK Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp 752.170.000,00	Rp 752.170.000,00	100,00%
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	Rp 2.739.600.000,00	Rp 2.739.600.000,00	100,00%
Total	Rp 357.019.557.000,00	Rp 331.674.313.582,00	

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp 196.252.700.000,00	Rp 154.706.367.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya merupakan dana penyesuaian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah TA 2019 dan 2018. Realisasi penerimaan dana penyesuaian pada TA 2019 adalah sebesar 100% dari anggaran. Penerimaan dana penyesuaian tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:		

	Anggaran	Realisasi	%
Dana Insentif Daerah - LRA	Rp 29.946.867.000,00	Rp 29.946.867.000,00	100,00%
Dana Desa	Rp 166.305.833.000,00	Rp 166.305.833.000,00	100,00%
Total	Rp 196.252.700.000,00	Rp 196.252.700.000,00	

		Realisasi Tahun 2019 (Rp)		Realisasi Tahun 2018 (Rp)	
3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		67.930.451.683,00		57.274.472.343,00	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan dana bagi hasil pajak dari provinsi TA 2019 dan 2018. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2018, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2019 naik sebesar Rp10.655.979.340,00 atau 15,68%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang tertinggi adalah dari Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 103,08%, sedangkan yang terendah adalah dari Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar 75,56%. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2019 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, yang dapat dirinci sebagai berikut:					
		Anggaran		Realisasi	%
Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	15.172.236.795,00	Rp	15.567.418.609,00	102,60%
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	8.998.231.677,00	Rp	9.275.468.547,00	103,08%
Bagi Hasil Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor	Rp	28.530.412.937,00	Rp	25.568.755.851,00	89,62%
Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp	157.461.384,00	Rp	118.980.919,00	75,56%
Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp	17.416.073.786,00	Rp	17.399.827.757,00	99,91%
Total	Rp	70.274.416.579,00	Rp	67.930.451.683,00	
4 Bantuan Keuangan		Rp -		Rp -	
Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya TA 2019 dan 2018. Pada TA 2019 dianggarkan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp8.318.484.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-313-2018 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2019. Per 31 Desember 2019 belum ada realisasi transfer dari Provinsi Sumatera Barat. Terhadap Bantuan Keuangan ini disajikan lebih lengkap pada BAB VI Informasi Tambahan.					
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		Rp 86.297.776.271,00		Rp 72.865.121.833,00	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019 dan 2018 terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah yang dianggarkan sebesar Rp102.577.599.400,00 dan terealisasi sebesar Rp86.297.776.271,00 (84,13%), terdiri dari:					
Pendapatan Hibah dari Pemerintah		Rp 86.297.776.271,00			
5.1.2 BELANJA		Rp 1.431.684.077.296,00		Rp 1.327.619.178.497,95	
Pada TA 2019 Belanja dianggarkan sebesar Rp1.582.144.698.309,49 dan direalisasikan sebesar Rp1.431.684.077.296,00 atau sebesar 90,49%. Sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp1.327.619.178.497,95 realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp104.064.898.798,05 atau 7,83%. Secara rinci realisasi belanja daerah TA 2019 dan 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:					
1) Belanja Operasi		Rp 1.105.164.932.412,00		Rp 1.066.115.766.705,95	
Belanja Operasi TA 2019 dianggarkan sebesar Rp1.154.588.987.259,49 dan direalisasikan sebesar Rp1.105.164.932.412,00 atau sebesar 95,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp1.066.115.766.705,95, realisasi Belanja Operasi tahun 2019 naik sebesar Rp39.049.165.706,05 atau 3,66%. Belanja Operasi terdiri dari:					
a Belanja Pegawai		Rp 727.512.673.664,00		694.513.936.934,00	
Belanja Pegawai Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp740.947.773.388,19 dan direalisasikan sebesar Rp727.512.673.664,00 atau 98,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp694.513.936.934,00 realisasi Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp32.998.736.730,00 atau 4,53%. Jumlah tersebut merupakan realisasi untuk pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2019 dan 2018. Jumlah Pegawai Negeri Sipil sendiri pada Tahun 2019 adalah 6.808 orang, menurun 0,27% dibandingkan Tahun 2018 yang sebanyak 6.827 orang. Penurunan ini disebabkan karena pegawai pensiun, meninggal, atau pindah ke daerah lain. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan Tambahan Penghasilan Pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018. Belanja Pegawai 2019 dapat dirinci sebagai berikut:					
		Anggaran		Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp	467.230.855.303,19	Rp	463.336.321.598,00	99,17%
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp	217.529.973.144,00	Rp	209.587.863.520,00	96,35%
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	Rp	12.719.875.000,00	Rp	12.440.000.000,00	97,80%
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Rp	1.366.860.539,00	Rp	1.121.004.172,00	82,01%
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp	675.278.466,00	Rp	212.432.823,00	31,46%
Uang Lembur	Rp	13.000.000,00	Rp	11.825.000,00	90,96%
Belanja Pegawai BLUD	Rp	32.437.747.640,00	Rp	31.934.600.485,00	98,45%
Belanja Pegawai BOS	Rp	8.866.183.296,00	Rp	8.760.626.066,00	98,81%
Insentif Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	108.000.000,00	Rp	108.000.000,00	100,00%
	Rp	740.947.773.388,19	Rp	727.512.673.664,00	
b Belanja Barang dan Jasa		Rp 360.510.348.327,00		Rp 356.413.519.143,95	
Belanja Barang dan Jasa pada TA 2019 dan 2018 merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 mencapai 91,39% dan 90,42% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp394.462.022.725,30 dan Rp394.157.529.034,00. Dalam hal ini penyerapan anggaran Tahun 2019 meningkat sebesar 0,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar Rp4.096.829.183,05 atau 1,14%. Anggaran dan realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut:					
		Anggaran		Realisasi	%
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp	15.068.326.392,80	Rp	13.680.281.941,00	90,79%
Belanja Bahan/Material	Rp	9.364.524.655,40	Rp	8.169.397.683,00	87,24%
Belanja Jasa Kantor	Rp	31.314.340.329,00	Rp	28.386.088.659,00	90,65%
Belanja Premi Asuransi	Rp	10.442.715.700,00	Rp	10.226.788.605,00	97,93%
Belanja Perawatan Kendaraan	Rp	8.761.121.441,00	Rp	8.243.596.158,00	94,09%
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp	9.954.861.205,50	Rp	9.017.582.294,00	90,58%
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Partir	Rp	2.593.443.650,00	Rp	2.158.480.117,00	83,23%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp	3.180.459.000,00	Rp	2.721.367.500,00	85,57%

Belanja Sewa Perleengkapan dan Peralatan Kantor	Rp	1.333.187.000,00	Rp	1.087.474.410,00	81,57%
Belanja Makanan dan Minuman	Rp	18.035.336.210,00	Rp	16.204.152.855,00	89,85%
Belanja Pakaian Dinas dan Atribotnya	Rp	1.111.688.000,00	Rp	1.097.316.945,00	98,71%
Belanja Pakaian Kerja	Rp	910.255.000,00	Rp	893.621.775,00	98,17%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Rp	585.600.000,00	Rp	553.134.950,00	94,46%
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	49.111.717.198,00	Rp	45.239.353.710,00	92,12%
Belanja Pemeliharaan	Rp	15.740.357.459,00	Rp	15.177.803.792,00	96,43%
Belanja Jasa Konsultansi	Rp	5.471.481.248,00	Rp	5.409.287.400,00	98,86%
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Rp	58.107.893.827,00	Rp	46.152.638.787,00	79,43%
Belanja Basiswa Pendidikan PNS	Rp	71.900.000,00	Rp	33.350.000,00	46,38%
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	Rp	1.823.079.000,00	Rp	1.512.195.455,00	82,95%
Belanja Honorarium Non Pegawai	Rp	12.027.849.520,00	Rp	10.375.395.359,00	86,26%
Honorarium PNS	Rp	9.345.005.150,00	Rp	8.960.125.250,00	95,88%
Honorarium Non PNS	Rp	36.971.786.250,00	Rp	35.888.467.500,00	97,07%
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp	1.534.908.800,00	Rp	1.413.364.200,00	92,08%
Insentif Tim Pemadam Kebakaran	Rp	52.800.000,00	Rp	52.800.000,00	100,00%
Insentif Search and Rescue (SAR)	Rp	76.500.000,00	Rp	76.384.000,00	99,85%
Insentif Jasa Pelayanan Medis/Paramedis	Rp	19.907.491.839,60	Rp	18.556.728.575,00	93,21%
Belanja Barang Dana BOS	Rp	37.170.082.961,00	Rp	36.804.923.699,00	99,02%
Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	30.573.509.269,00	Rp	28.932.152.158,00	94,63%
Belanja Bausos Barang	Rp	3.819.801.600,00	Rp	3.486.094.550,00	91,26%
Total	Rp	394.462.022.725,30	Rp	360.510.348.327,00	91,39%

	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)
c Belanja Bunga	Rp 1.019.584.696,00	Rp 1.926.710.628,00

Belanja bunga merupakan pembayaran bunga atas pinjaman daerah kepada PT. SMI selama Tahun 2019 dan 2018. Pinjaman Daerah ini digunakan untuk kegiatan relokasi RSUD M. Zein Paiman dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. Jumlah pinjaman daerah untuk proyek relokasi ini adalah sebesar Rp 99.000.000.000,00, yang dibagi atas pekerjaan konstruksi Rp96.000.000.000,00 dan Pengadaan Alat Kesehatan senilai Rp3.000.000.000,00, jangka waktu 5 (lima) Tahun, dan bunga 9,5% per Tahun. Pinjaman daerah ini disahkan melalui akta notaris Ujang Iskandar tanggal 23 Juli 2014. Pinjaman daerah ini mulai dicairkan pada bulan Juni 2015. Dalam hal ini pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, dengan sisa pokok hutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.708.945.000. Penjelasan lebih rinci tentang bunga dan pinjaman daerah ini dijelaskan dalam BAB VI.

Rincian pembayaran bunga Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

	Realisasi
1. 25 Februari 2019	Rp 342.968.161,00
2. 22 Mei 2019	Rp 276.487.014,00
3. 26 Agustus 2019	Rp 228.645.441,00
4. 25 November 2019	Rp 171.484.080,00
Total	Rp 1.019.584.696,00

	Anggaran	Realisasi	%
d Hibah	Rp 15.945.825.725,00	Rp 12.137.850.000,00	

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 sebesar Rp15.945.825.725,00 atau 90,562% dari anggaran sebesar Rp17.607.318.502,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018, realisasi 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp3.807.975.725,00 atau 31,37%. Realisasi belanja hibah dalam Tahun 2019 terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah kepada Pemerintah	Rp 591.782.000,00	Rp 477.782.000,00	80,74%
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	Rp 4.070.000.000,00	Rp 3.632.500.000,00	89,25%
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp 12.945.536.502,00	Rp 11.835.543.725,00	91,43%
Jumlah	Rp 17.607.318.502,00	Rp 15.945.825.725,00	

	Anggaran	Realisasi	%
e Bantuan Sosial	Rp 176.500.000,00	Rp 1.123.750.000,00	

Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018 direalisasikan sebesar Rp176.500.000,00 dan sebesar Rp1.123.750.000,00 atau 90,56% dan 70,55% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp1.123.750.000,00. Belanja Bantuan Sosial merupakan realisasi belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan, diantaranya bantuan pengobatan untuk keluarga miskin, bantuan untuk keluarga miskin yang mendapat musibah seperti kebakaran, dan lain-lain. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp947.250.000,00 dibandingkan realisasi TA 2018.

	Anggaran	Realisasi	%
2) Belanja Modal	Rp 324.875.576.584,00	Rp 257.286.726.595,00	

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Pada TA 2019, sebagaimana tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah tetap melakukan penertiban akun anggaran, khususnya untuk Belanja Modal, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini belanja yang merupakan penunjang pengadaan aset dianggarkan pada akun belanja modal. Belanja penunjang tersebut meliputi perencanaan, honorarium, pengawasan, dan lain-lain yang bertribusi terhadap pengadaan aset tetap sampai dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Namun pada TA 2019 masih terdapat realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sehingga dicatat sebagai aset ekstrakomptabel. Rincian mutasi tambah dan kurang per item aset per SKPD disajikan pada lampiran. Dalam realisasi Belanja Modal Tahun 2019 juga telah dicatat realisasi yang berasal dari transaksi non RKUD (tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah), termasuk dari Dana BOS SD dan SMP.

Realisasi belanja modal Tahun 2019 adalah sebesar Rp324.875.576.584,00 dari anggaran sebesar Rp425.398.193.050,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp257.286.726.595,00, Belanja Modal Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp67.588.849.989,00 (26,26%). Rincian realisasi belanja modal sebagai berikut:

		Realisasi Tahun 2019 (Rp)		Realisasi Tahun 2018 (Rp)	
a Belanja Modal Tanah		Rp 2.213.332.947,00		Rp 2.951.541.480,00	
Belanja Modal Tanah dianggarkan pada Tahun 2019 sebesar Rp9.011.448.023,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.213.332.947,00 atau 24,56%. Rendahnya realisasi Belanja Modal Tanah terutama disebabkan belum selesainya pengadaan tanah untuk pelebaran jalan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp2.951.541.480,00, realisasi 2018 mengalami penurunan sebesar Rp738.208.533,00 atau 25,01%. Rincian Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut:					
	Anggaran		Realisasi		%
BM Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	Rp 3.967.902.403,00	Rp	1.690.725.967,00		42,61%
BM Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	Rp 5.043.545.620,00	Rp	522.606.980,00		10,36%
Jumlah	Rp 9.011.448.023,00	Rp	2.213.332.947,00		
b Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp 75.483.262.574,00		Rp 31.894.874.951,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan pada Tahun 2019 sebesar Rp89.354.778.599,00 dan direalisasikan sebesar Rp75.483.262.574,00 atau 84,84%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp31.894.874.951,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp43.588.387.623,00 atau 136,66%. Realisasi Modal Peralatan dan Mesin dapat dirinci sebagai berikut:					
	Anggaran		Realisasi		%
BM Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	Rp 30.400.000,00	Rp	30.140.000,00		99,14%
BM Pengadaan Alat-alat Bantu	Rp 283.000.000,00	Rp	273.400.000,00		96,61%
BM Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 3.818.550.570,00	Rp	3.457.598.269,00		90,55%
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp 165.000.000,00	Rp	164.600.000,00		
BM Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	Rp 90.517.500,00	Rp	89.573.000,00		98,96%
BM Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	Rp 10.500.000,00	Rp	10.050.000,00		95,71%
BM Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp 23.956.000,00	Rp	23.956.000,00		100,00%
BM Pengadaan Alat Ukur	Rp 41.000.000,00	Rp	36.530.000,00		89,10%
BM Pengadaan Alat Pengolahan	Rp 8.000.000,00	Rp	8.000.000,00		100,00%
BM Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	Rp 59.700.000,00	Rp	53.750.000,00		90,03%
BM Pengadaan Alat Kantor	Rp 2.138.995.853,00	Rp	2.021.240.391,00		94,49%
BM Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp 8.280.034.851,00	Rp	8.013.614.710,00		96,78%
BM Pengadaan Komputer	Rp 9.070.996.601,02	Rp	8.845.670.088,00		97,52%
BM Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp 528.246.993,00	Rp	513.321.249,00		97,17%
BM Pengadaan Alat Studio	Rp 623.183.625,00	Rp	595.198.775,00		95,51%
BM Pengadaan Alat Komunikasi	Rp 46.050.000,00	Rp	44.245.500,00		96,08%
BM Pengadaan Alat Kedokteran	Rp 6.857.946.396,98	Rp	5.695.953.854,00		83,06%
BM Pengadaan Alat Kesehatan	Rp 16.812.973.351,00	Rp	16.167.890.061,00		96,16%
BM Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	Rp 261.294.500,00	Rp	260.266.500,00		99,61%
BM Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	Rp 1.129.000.000,00	Rp	988.605.675,00		87,56%
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	Rp 32.000.000,00	Rp	13.611.000,00		42,53%
Belanja Modal BOS	Rp 27.485.154.463,00	Rp	21.951.403.920,00		79,87%
Belanja Modal BLUD	Rp 11.558.277.895,00	Rp	6.224.643.582,00		53,85%
Jumlah	Rp 89.354.778.599,00	Rp	75.483.262.574,00		
c Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Rp 105.936.860.332,00		Rp 99.453.363.095,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp175.900.547.836,00, direalisasikan sebesar Rp105.936.860.332,00 atau sebesar 60,23%. Rendahnya realisasi Belanja Gedung dan Bangunan pada 2019 diantaranya disebabkan tidak terlaksananya pengerjaan Relokasi RSUD M. Zein Paingan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp99.453.363.095,00 realisasi 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp6.483.497.237,00 atau 6,51%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut:					
	Anggaran		Realisasi		%
BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 169.421.241.158,00	Rp	99.531.763.802,00		58,75%
BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp 3.294.186.678,00	Rp	3.256.487.700,00		98,86%
BM Pengadaan Rambu-Rambu	Rp 3.185.120.000,00	Rp	3.148.608.830,00		98,85%
Jumlah	Rp 175.900.547.836,00	Rp	105.936.860.332,00		
d Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		Rp 141.059.929.431,00		Rp 122.876.995.494,00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp150.939.133.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp141.059.929.432,00 atau 93,45%. Rendahnya realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terutama karena tidak terealisasinya kegiatan yang penganggannya berasal dari alokasi dana Bantuan Bersifat Khusus dari Provinsi. Dalam hal ini, untuk kegiatan yang telah memiliki kontrak kerja, pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan walaupun belum ada pencairan keuangan. Penjelasan tentang BKK disampaikan juga dalam Bab VI. Penjabaran anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan sebagai berikut:					

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN TA 2019

	Anggaran	Realisasi	%
BM Pengadaan Jalan	Rp 89.756.958.435,00	Rp 86.089.680.294,00	95,91%
BM Pengadaan Jembatan	Rp 9.375.182.061,00	Rp 8.997.282.657,00	95,97%
BM Pengadaan Bangunan Air Irigasi	Rp 19.523.582.661,00	Rp 16.758.496.569,00	85,84%
BM Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	Rp 726.102.500,00	Rp 605.742.450,00	83,42%
BM Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp 3.417.003.400,00	Rp 3.263.821.200,00	95,52%
BM Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Rp 8.000.000,00	Rp 7.208.600,00	90,11%
BM Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	Rp 3.849.698.400,00	Rp 3.451.502.650,00	89,66%
BM Pengadaan Bangunan Air Kotor	Rp 16.223.974.019,00	Rp 14.666.307.350,00	90,40%
BM Pengadaan Bangunan Air	Rp 160.931.000,00	Rp 65.400.000,00	94,24%
BM Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	Rp 69.400.000,00	Rp 65.400.000,00	94,24%
BM Pengadaan Instalasi Air Kotor	Rp 5.939.985.000,00	Rp 5.308.410.000,00	89,37%
BM Pengadaan Jaringan Listrik	Rp 291.500.000,00	Rp 252.002.742,00	86,45%
BM Pengadaan Jaringan Telepon	Rp 1.596.815.724,00	Rp 1.594.074.919,00	99,83%
Jumlah	Rp 150.939.133.200,00	Rp 141.059.929.431,00	

	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)
e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	182.191.300,00	109.951.575,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp192.285.392,00 dan direalisasikan sebesar Rp182.191.300,00 atau sebesar 94,75%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp109.951.575,00, realisasi 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp72.239.725,00 atau 65,70%. Rincian Belanja Modal Aset Tetap lainnya dapat dilihat dibawah ini:		

	Anggaran	Realisasi	%
BM Pengadaan Buku	Rp 55.042.500,00	Rp 51.996.300,00	94,47%
BM Pengadaan Terbitan	Rp 5.400.000,00	Rp 5.400.000,00	100,00%
BM Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	Rp 68.708.800,00	Rp 64.165.000,00	93,39%
BM Alat Olahraga Lainnya	Rp 50.000.000,00	Rp 47.500.000,00	95,00%
BM Pengadaan Tanaman	Rp 13.134.092,00	Rp 13.130.000,00	99,97%
Jumlah	Rp 192.285.392,00	Rp 182.191.300,00	94,75%

f Belanja Aset Lainnya	Rp	Rp
Belanja Modal Aset Lainnya tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan pada Tahun 2019 dan 2018.		

3) Belanja Tak Terduga	1.643.568.300,00	4.216.685.197,00
Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.		
Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2019 sebesar Rp1.643.568.300,00 atau 76,18% dari anggaran sebesar Rp2.157.518.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp4.216.685.197,00, Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp2.573.116.897,00 atau 61,02%.		

Rincian Belanja Tak Terduga dapat dilihat dibawah ini:

Rehabilitasi Jalan	Rp 305.877.000,00
Pengamanan tebing sungai Batang Tapan	Rp 406.903.050,00
Operasional Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Rp 47.162.250,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pelangai Kaciak	Rp 319.772.000,00
Rehabilitasi Bendungan Batang Jelamu	Rp 245.184.000,00
Rehabilitasi Jembatan Timbaru	Rp 293.670.000,00
Bantuan Alat dan pemasangan geobag untuk abrasi pantai Karang Labunag	Rp 25.000.000,00
Jumlah	Rp 1.643.568.300,00

5.1.3 TRANSFER	Rp 261.955.446.540,71	Rp 241.401.772.091,90
-----------------------	------------------------------	------------------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi transfer untuk Tahun anggaran 2019 dan 2018. Realisasi belanja transfer Tahun 2019 adalah Rp261.955.446.540,71 atau 98,93% dari anggaran sebesar Rp264.779.283.521,90. Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp20.553.674.449,71 atau 8,51% dari Tahun 2018 yang sebesar Rp241.401.772.091,00. Belanja transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan		Rp	3.153.892.970,77	Rp	3.445.112.986,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 182 nagari yang dapat diringkas sebagai berikut:					
	Anggaran		Realisasi		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Rp	4.149.867.419,50	Rp	2.739.891.708,68	%
					66,02%
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Rp	1.727.862.532,40	Rp	414.001.262,09	
					23,96%
Jumlah	Rp	5.877.729.951,90	Rp	3.153.892.970,77	

		Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2018	
		(Rp)		(Rp)	
b Transfer Bantuan Keuangan		258.801.553.569,94		237.956.659.105,00	
Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp258.901.553.570,00 dan terealisasi sebesar 99,96% atau Rp258.801.553.569,94. Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya yang dapat dirinci sebagai berikut:					
Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota	Rp	Anggaran 254.460.119.308,00	Rp	Realisasi 254.460.119.307,94	% 100%
Bantuan Keuangan Kepada Desa	Rp	3.470.000.000,00	Rp	3.370.000.000,00	97%
Bantuan Keuangan Kepada Partai	Rp	971.434.262,00	Rp	971.434.262,00	100%
Jumlah	Rp	258.901.553.570,00	Rp	258.801.553.569,94	

Untuk belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dirinci sebagai berikut:

		Anggaran		Realisasi	%
Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Rp	105.070.298,00	Rp	105.070.298,00	100%
Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Rp	83.483.106,00	Rp	83.483.106,00	100%
Belanja Bantuan Kepada Partai Bulan Bintang (PBB)	Rp	50.250.346,00	Rp	50.250.346,00	100%
Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Rp	53.765.848,00	Rp	53.765.848,00	100%
Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Rp	77.336.598,00	Rp	77.336.598,00	100%
Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Rp	58.930.793,00	Rp	58.930.793,00	100%
Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya (Golkar)	Rp	113.398.584,00	Rp	113.398.584,00	100%
Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Rp	108.575.923,00	Rp	108.575.923,00	100%
Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	Rp	90.423.512,00	Rp	90.423.512,00	100%
Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	Rp	104.380.618,00	Rp	104.380.618,00	100%
Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Rp	86.075.967,00	Rp	86.075.967,00	100%
Belanja Bantuan Kepada Partai Berkarya	Rp	19.983.727,00	Rp	19.983.727,00	100%
Belanja Bantuan Kepada Partai Perindo	Rp	19.758.942,00	Rp	19.758.942,00	100%
	Rp	971.434.262,00	Rp	971.434.262,00	

5.1.4 PEMBIAYAAN

Anggaran Pembiayaan pada TA 2019 adalah Rp74.216.386.573,39 dan terealisasi sebesar Rp11.578.669.546,89, atau 15,60%. Rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dirinci sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp88.284.276.573,39 dan direalisasikan sebesar Rp25.325.559.546,89 atau 28,69%. Rendahnya realisasi penerimaan pembiayaan ini terutama disebabkan oleh tidak terealisasinya penerimaan pinjaman daerah dari PT SMI untuk kegiatan relokasi RSUD M. Zein Painsa. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp91.043.881.523,98 realisasi 2019 mengalami penurunan sebesar Rp65.718.321.977,09 atau 72,18%. Penerimaan pembiayaan Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

a Penggunaan SILPA

Jumlah tersebut merupakan realisasi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu yang direncanakan untuk menutup defisit belanja Tahun 2019 dan 2018.

b Pinjaman Dalam Negeri

Pada Tahun 2019, Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp63.037.385.000,00, dan terealisasi sebesar Rp0,00 (tidak ada realisasi). Hal ini disebabkan oleh perintah penghentian sementara proyek relokasi RSUD M. Zein Painsa, yang menjadi peruntukan penerimaan pinjaman daerah pada Tahun 2015. Penjelasan lebih lanjut tentang pinjaman ini disajikan pada Bab Informasi Tambahan.

c Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jumlah tersebut merupakan pengembalian Penyertaan Modal pada PDAM TA 2018 ke Kas Daerah pada bulan Januari 2019.

d Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

Jumlah tersebut merupakan setoran pengembalian atas pokok dana K-PER sebagaimana disajikan pada Lampiran Investasi Non Permanen.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp13.746.890.000,00 atau 97,72% dari anggaran yang sebesar Rp14.067.890.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp25.917.890.000,00, Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp12.171.000.000,00 atau 46,95%. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019 terdiri atas penyertaan modal pada PDAM Pesisir Selatan (rincian dapat dilihat pada Lampiran Investasi Permanen Pemerintah Daerah), serta Pembayaran Pokok Pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp9.417.890.000,00. Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN TA 2019

	Anggaran	Realisasi	%
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	Rp 4.650.000.000,00	Rp 4.329.000.000,00	93%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	Rp 9.417.890.000,00	Rp 9.417.890.000,00	100,00%
Jumlah	Rp 14.067.890.000,00	Rp 13.746.890.000,00	

	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)
3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	16.950.207.818,61	25.246.891.573,39

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan nilai dari pendapatan dikurangi belanja ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan selama satu periode. Si LPA diatas merupakan SiLPA Tahun 2019 dan 2018. SiLPA 2019 terdapat pada Kas Daerah, Kas pada Bendahara BLUD, Kas JKN, dan Kas pada Bendahara BOS yang dapat dirinci sebagai berikut:

Kas Daerah	Rp 4.403.792.838,78
Kas di Bendahara BLUD	Rp 6.340.714.371,83
Kas di Bendahara BOS	Rp 6.187.897.108,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 17.803.500,00
Jumlah	Rp 16.950.207.818,61

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, dan Koreksi SAL Akhir. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 25.246.891.573,39	Rp 91.321.426.861,98
---------------------------------	----------------------	----------------------

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2019 merupakan SAL akhir per 31 Desember 2018. SAL Awal ini terdiri dari: Kas Daerah senilai Rp18.898.553.146,06, Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp163.084.740,00, Kas pada Bendahara BLUD sebesar Rp4.817.165.547,83, Kas di Bendahara Bos sebesar Rp1.349.825.073,00 dan koreksi tambah kas bos dan BLUD senilai Rp.18.263.066,50.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 25.246.810.846,89	Rp 91.043.881.523,98
---	----------------------	----------------------

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2019 pada Tahun 2018. Penggunaan SiLPA sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp25.246.810.846,89. SAL ini digunakan untuk mendanai defisit anggaran pada Tahun 2019.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp 16.950.207.818,61	Rp 25.246.891.573,39
---	----------------------	----------------------

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan Surplus/(Defisit) Pendapatan dan Belanja sebesar Rp5.371.538.271,72 dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp11.578.669.546,89. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Daerah	Rp 1.699.011.062.108,43
- Belanja Daerah	Rp 1.431.684.077.296,00
- Transfer	Rp 261.955.446.540,71
Surplus/defisit	Rp 5.371.538.271,72
- Penerimaan Pembiayaan	Rp 25.325.559.546,89
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp 13.746.890.000,00
Pembiayaan neto	Rp 11.578.669.546,89

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp 16.950.207.818,61
---------------------------------------	----------------------

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Pesir Selatan menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2019 dengan nilai Aset sebesar Rp2.119.482.060.722,09. Kewajiban sebesar Rp66.837.847.630,20 dan Ekuitas sebesar Rp2.052.644.213.091,89. Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
5.3.1 ASET	Rp 2.304.431.919.180,21	Rp 2.119.482.060.722,09
1) Aset Lancar	Rp 90.644.697.507,60	Rp 83.897.018.079,03

Aset lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah	Rp 4.403.792.838,78
b) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -
c) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 17.803.500,00
d) Kas di Bendahara BLUD	Rp 6.340.714.371,83
e) Kas di Bendahara BOS	Rp 6.187.897.108,00
f) Kas Lainnya	Rp 624.308,00
g) Piutang Pajak Netto	Rp 3.567.717.655,75
h) Piutang Retribusi Netto	Rp 412.276.120,00
i) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Netto	Rp -
k) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	Rp 17.783.500.742,16
l) Piutang Dana Bagi Hasil Netto	Rp 9.568.616.789,00
m) Piutang Kepada Pihak Ketiga	Rp -
n) Piutang Lainnya	Rp 119.686.894,43
o) Beban Dibayar Dimuka	Rp -
p) Persediaan	Rp 42.242.067.179,65
q) Aset Lancar Lainnya	Rp -
Jumlah Aset Lancar Per 31 Desember 2019	Rp 90.644.697.507,60

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
a) Kas di Kas Daerah	4.403.792.838,78	18.898.553.146,06
Kas di Kas Daerah terdiri dari Kas pada Rekening Giro, Kas pada sertifikat Deposito berjangka 1 (satu) bulan, dan saldo dana pada rekening FKTP sebagai pengelola dana JKN, dengan rincian sebagai berikut:		
Kas pada Rekening Giro:		
(1) Bank Nagari 0400.0101.00144-4	Rp 2.526.209.492,73	
(2) Bank Nagari 0400.0101.00285-1	Rp -	
(3) Bank Rakyat Indonesia 00270.01.000271-30-3	Rp 80.965.454,00	
(4) Bank Syariah Mandiri 7027480025	Rp 119.833.125,35	
(5) Bank Negara Indonesia 8126643000	Rp 71.672.562,00	
(6) JKN Puskesmas dan RSU Tapan	Rp 1.605.112.204,70	
Jumlah	Rp 4.403.792.838,78	
Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan Bank Nagari, terdapat perbedaan pencatatan saldo giro pada rekening 0400.0101.00144-4. Perbedaan saldo tersebut adalah sebagai berikut:		
Saldo Menurut Pemerintah Daerah	Rp 2.526.209.492,73	
Saldo Menurut Bank Nagari	Rp 2.526.189.492,73	
Selisih	(20.000,00)	
Perbedaan tersebut disebabkan kurang bayar sebesar Rp20.000,00 oleh Bank Nagari dan telah disetorkan pada tanggal 8 Januari 2020.		
Sedangkan pada BNI, terdapat perbedaan pencatatan saldo sebagai berikut :		
Saldo Menurut Pemerintah Daerah	Rp 71.672.562,00	
Saldo Menurut BNI	Rp 71.642.562,00	
Selisih	(30.000,00)	
Perbedaan tersebut disebabkan kesalahan pada otomatisasi sistem RTGS BNI dan telah disetorkan kembali ke rekening kasda pada tanggal 16 Januari 2020.		
b) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp 163.084.740,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 2019 dan 2018. Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019. Sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 telah disetorkan keseluruhannya ke rekening kas daerah pada Januari dan Februari 2019.		
c) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 17.803.500,00	Rp -
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan 2019 dan 2018. Saldo tersebut merupakan Saldo Kas pada Bendahara Puskesmas Dinas Kesehatan dan telah disetorkan pada Januari 2020.		
d) Kas di Bendahara BLUD	Rp 6.340.714.371,83	Rp 4.817.165.547,83
Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas pada BLUD per 31 Desember 2019 dan 2018. Untuk pengakuan saldo kas, terdapat perbedaan pencatatan menurut rekening Bank dengan BLUD sebesar Rp16.685.710,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:		
Saldo menurut catatan BLUD	Rp 6.340.714.371,83	
Saldo menurut Rekening Koran	Rp 6.324.028.661,83	
Selisih	Rp 16.685.710,00	
Selisih tersebut terdiri atas:		
Lebih setor pajak	Rp 3.000,00	
Pengembalian potongan pajak April s/d Juli 2019	Rp 16.652.711,00	
Kurang transfer	Rp (1,00)	
Lebih setor	Rp 30.000,00	
	Rp 16.685.710,00	
e) Kas di Bendahara BOS	Rp 6.187.897.108,00	Rp 1.349.825.073,00
Kas di Bendahara BOS merupakan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019 dan 2018. Saldo Kas di Bendahara BOS merupakan saldo sisa Dana BOS pada SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Pesisir Selatan yang penerimaannya langsung ke rekening sekolah dan tidak melalui rekening Kas Daerah (non rekening).		
Sisa Kas di Bendahara BOS SD (384 sekolah)	Rp 3.274.438.645,00	
Sisa Kas di Bendahara BOS SMP (74 sekolah)	Rp 2.913.458.463,00	
Jumlah	Rp 6.187.897.108,00	
Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran Kas.		
e) Kas Lainnya	Rp 624.308,00	Rp -
Kas Lainnya merupakan saldo setara kas per 31 Desember 2019 dan 2018. Kas lainnya 31 Desember 2019 sebesar Rp624.308,00 dengan rincian sebagai berikut:		
RSUD (bunga giro Desember 2019)	Rp 298.233,00	
Kas Lainnya di Bendahara BOS	Rp 284.220,00	
Dinas Kesehatan (bunga giro Desember 2019 Puskesmas Airpura)	Rp 41.855,00	
Jumlah	Rp 624.308,00	

	Tahun 2019 (Rp)		Tahun 2018 (Rp)	
g) Piutang Pajak Netto	Rp	3.567.717.655,75	Rp	4.489.646.854,59

Piutang pajak merupakan piutang pajak Tahun 2019 dan 2018. Dasar untuk penetapan piutang Pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah. Atas setiap piutang yang ditetapkan, dilakukan penyesihan piutang tidak tertagih sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 03 Akun Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Piutang pajak per 31 Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Bruto)		Penyesihan		Piutang Netto
Pajak Restoran-2011	Rp	33.670.000,00	-Rp	33.670.000,00	Rp -
PBB P2	Rp	6.803.395.101,00	-Rp	3.385.358.155,26	Rp 3.418.036.945,75
2019	Rp	441.881.011,00	-Rp	2.209.405,06	Rp 439.671.605,95
2018	Rp	838.475.903,00	-Rp	83.847.590,30	Rp 754.628.312,70
2017	Rp	928.652.914,00	-Rp	92.865.291,40	Rp 835.787.622,60
2016	Rp	1.542.166.005,00	-Rp	154.216.600,50	Rp 1.387.949.404,50
2015	Rp	1.563.593.592,00	-Rp	1.563.593.592,00	Rp -
2014	Rp	1.488.625.676,00	-Rp	1.488.625.676,00	Rp -
2003-2013	Rp	-	-Rp	-	Rp -
Pajak Reklame 2019	Rp	150.432.875,00	-Rp	752.165,00	Rp -
Pajak Reklame-2016	Rp	315.500,00	-Rp	315.500,00	Rp 149.680.710,00
JUMLAH	Rp	6.987.813.476,00	-Rp	3.420.095.820,26	Rp 3.567.717.655,75

Piutang Pajak Restoran sebesar Rp33.670.000,00 ditetapkan pada Tahun 2011. Piutang ini sudah tidak dapat ditelusuri subjek pajak nya namun masih dicatat dalam laporan keuangan karena Pemerintah Daerah belum menetapkan berita acara atau surat keputusan untuk penghapusan piutang tidak tertagih. Piutang ini telah dikelompokkan kedalam golongan kualitas macet dan dilakukan penyesihan 100%, sehingga saldo piutang pajak restoran netto adalah Rp0,00.

Terhadap Piutang PBB P2 Tahun 2003-2013 telah dilakukan penghapusan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 970/29/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penghapusan Nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penjelasan lebih lanjut mengenai penghapusan Piutang PBB-P2 disajikan pada Bab VI Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

Piutang Pajak Reklame ditetapkan pada Tahun 2016 dengan saldo Rp9.315.500,00 yang merupakan piutang pajak atas reklame PT Semen Padang dan telah ditagih sebesar Rp9.000.000,00, sehingga bersaldo Rp315.500,00 per 31 Desember 2018 dan 2019. Piutang ini telah dikelompokkan kedalam golongan kualitas macet dan dilakukan penyesihan 100%, sehingga saldo piutang pajak reklame netto adalah Rp0,00.

Piutang Pajak Reklame tahun 2019 merupakan Pajak Reklame yang telah ditetapkan di TA 2019 namun belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2019, terhadap piutang ini dilakukan penyesihan 0,5% sehingga saldo piutang pajak netto adalah Rp149.680.710,00

g) Piutang Retribusi Netto	Rp	412.276.120,00	Rp	333.331.600,00
----------------------------	----	----------------	----	----------------

Piutang Retribusi merupakan Piutang Retribusi Tahun 2019 dan Tahun 2018. Piutang retribusi tahun 2019 terdapat pada SKPD Dinas Koperasi, Dinas Kominfo, dan Dinas Pariwisata dengan nilai bruto dan penyesihan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Bruto)		Penyesihan		Piutang Netto
Dinas Koperasi, Retribusi sewa petak	Rp	368.292.000	-Rp	16.015.080	Rp 352.276.920
Dinas Kominfo, Retribusi Sewa Menara Telekomunikasi	Rp	12.160.000	-Rp	60.800	Rp 12.099.200
Dinas Pariwisata, Retribusi Objek Wisata tahun 2018	Rp	9.000.000	-Rp	900.000	Rp 8.100.000
Dinas Pariwisata, Retribusi Objek Wisata tahun 2019	Rp	40.000.000	-Rp	200.000	Rp 39.800.000
	Rp	429.452.000	-Rp	17.175.880	Rp 412.276.120

h) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	Rp	-	Rp	-
--	----	---	----	---

Merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019 dan 2018.

i) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah Netto	Rp	-	Rp	-
---	----	---	----	---

Merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018.

j) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	Rp	17.783.500.742,16	Rp	15.000.548.384,88
---	----	-------------------	----	-------------------

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019 sebesar Rp17.872.865.068,00 berada pada RSUD M Zein, yang terdiri atas piutang klaim terhadap BPJS bulan Oktober sampai dengan Desember 2018 dan 2019, klaim ambulance BPJS dari bulan Maret hingga Desember 2019, dan klaim obat BPJS. Kemudian Atas Piutang PAD Lainnya dilakukan penyesihan piutang sebesar 0,5% atau Rp89.364.325,84 sehingga Piutang PAD Lainnya Netto menjadi sebesar Rp17.783.500.742,16.

k) Piutang Dana Bagi Hasil Netto	Rp	9.568.616.789,00	Rp	5.508.269.926,00
----------------------------------	----	------------------	----	------------------

Merupakan saldo Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2019 dan 2018. Piutang Dana Bagi Hasil provinsi tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

PKB	1.855.270.626,00
BBNKB	788.182.566,00
PBBKB	2.132.775.577,00
PAP	9.571.661,00
Pajak Rokok	
Jumlah	4.785.800.430,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TA 2019

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sesuai PMK No.20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada TA 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

DBH PBB	1.449.017.107,00
DBH Cukai Hasil Tembakau	5.392.833,00
DBH SDA Perikanan	3.677.289,00
DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29	35.668.384,00
Pajak Rokok	1.493.755.613,00

Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sesuai PMK No.36/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Dalam Rangka Pandemi COVID-19 dapat dirinci sebagai berikut:

DBH Pasal 21 dan Pasal 25/29	838.968.059,00
DBH PBB	2.051.154.313,00
DBH SDA Kehutanan	59.782.717,00
DBH SDA Mineral dan Batubara	163.271.337,00
DBH SDA Panas Bumi	5.256.417,00
DBH SDA Perikanan	170.627.903,00
Pajak Rokok	3.289.060.746,00

Sesuai dengan Buletin Teknis 16 tentang Akuntansi Piutang berbasis Akrua dan Buletin Teknis 21 tentang Akuntansi Transfer berbasis Akrua, terhadap Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi tidak dilakukan penyisihan piutang.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
l) Piutang kepada Pihak Ketiga	Rp -	Rp -
Merupakan saldo Piutang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018.		
m) Piutang Lainnya Netto	Rp 119.686.894	Rp 433.531.222,15
Jumlah ini merupakan Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018. Piutang Lainnya tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:		

	Uraian	Jumlah (Bruto)	Penyisihan	Piutang Netto
a.	PPKD, jasa giro rekening RSUD Tapan (BPD Tapan)	Rp 1.281.903	-Rp 128.190	Rp 1.153.713
b.	PPKD, bunga rekening BOS yang masuk ke Kasda Provinsi (Provinsi)	Rp 22.143.568	-Rp 2.214.357	Rp 19.929.211
c.	PPKD, keterlaksanaan gaji pegawai pensiun (PT Taspen)	Rp 109.472.912	-Rp 10.947.291	Rp 98.525.621
d.	Dinas Pendidikan, Pajak atas Bunga Giro Rekening BOS	Rp 70.372	-Rp 352	Rp 70.020
e.	Dinas Kesehatan, Pajak atas Bunga Giro Rekening Puskesmas	Rp 8.371	-Rp 42	Rp 8.329
	Jumlah	Rp 132.977.126	-Rp 13.290.232	Rp 119.686.894

n) Beban Dibayar Dimuka	Rp -	Rp -
Merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018.		
o) Persediaan	Rp 42.242.067.179,65	Rp 32.903.061.584,53
Jumlah tersebut merupakan persediaan Tahun 2019 dan 2018. Pencatatan saldo persediaan dilakukan berdasarkan laporan setiap SKPD dan Laporan Hasil Pemeriksaan Persediaan per 31 Desember 2019 oleh Inspektorat. Dalam hal ini SKPKD tidak melakukan stock opname terhadap persediaan SKPD. Persediaan 2019 terdiri atas persediaan ATK, obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, dan BMD yang dibangun dengan tujuan untuk dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga namun per 31 Desember 2019 belum diserahkan. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 per SKPD disajikan pada Lampiran Persediaan.		
r) Aset Lancar Lainnya	Rp -	Rp -
Merupakan Saldo Aset Lancar Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 2018.		
2) Investasi Jangka Panjang	Rp 111.021.097.493,24	Rp 106.658.061.541,84
Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:		
1) Investasi Non Permanen	Rp -	Rp -
2) Investasi Permanen	Rp 111.021.097.493,24	Rp 106.658.061.541,84
Jumlah Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2019	Rp 111.021.097.493,24	Rp 106.658.061.541,84
a) Investasi Non Permanen	Rp -	Rp -
Merupakan saldo investasi dana bergulir yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 dan 2018. Program dana bergulir ini disebut Kredit Modal Penguatan Ekonomi Rakyat (K-PER) yang dilaksanakan pada Tahun 2002, 2003, 2006, 2007, dan 2008. Penyaluran Kredit Modal Penguatan Ekonomi Rakyat (K-PER) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyelenggara, yaitu BPD Cabang Painan, BPD Cabang Tapan dan BPR Samudra serta koperasi-koperasi.		

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN TA 2019

Penyaluran K-PER pada BPD (Cabang Painan dan Tapan) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 500/26/Perek/2007, PKS/001/PN/PD/06-2007 dan PKS/001/TP/PD/06-2007 tanggal 29 Mei 2007. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan berakhir pada Tahun 2010. Pengembalian pokok investasi Dana K-PER dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan, sedangkan setoran bunga dari rekening penampungan K-PER dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesir Selatan, Kebijakan Nomor 07 tentang Akun Investasi Jangka Panjang khususnya paragraf 13 Menyatakan bahwa penyisihan Investasi Non Permanen dan bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dan bergulir dengan persentase penyisihan 100% untuk investasi yang berumur lebih dari 9 bulan. Dalam hal ini atas seluruh saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 telah disisihkan keuangannya tidak tercais sebesar 100%. Rincian penyaluran dana K-PER disajikan dalam Lampiran Investasi Non Permanen, sedangkan ringkasannya dapat dilihat dibawah ini:

Investasi Non Permanen	Rp	1.836.747.527,00	Rp	1.921.246.067,00
Investasi Non Permanen yang Diragukan Ketertagihannya	-Rp	1.836.747.527,00	-Rp	1.921.246.067,00
Investasi Non Permanen Netto	Rp	-	Rp	-

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
b) Investasi Permanen	111.021.097.493,05	106.658.061.541,84
Investasi Permanen merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesir Selatan pada perusahaan daerah dan lembaga keuangan posisi per 31 Desember 2019 dan 2018. Investasi Permanen berada pada PT Bank Nagari, PDAM Pesir Selatan, Perusa Kabupaten Pesir Selatan, PT BPR Samudra, dan PT Balaicung Citra Jaya, dengan saldo per 31 Desember 2019 sebagai berikut:		
PT Bank Nagari	Rp 58.608.000.000,00	
PDAM Pessel	Rp 45.694.082.228,93	
Perusa Kab. Pessel	Rp 259.000.000,00	
BPR Samudra	Rp 5.460.015.264,30	
Balaicung	Rp 1.000.000.000,00	
Jumlah	Rp 111.021.097.493,24	

Perbedaan nilai pada lembar muka (on face) LK dan rincian disebabkan karena pembulatan angka dibelakang koma. Rincian Investasi Permanen disajikan dalam Lampiran Investasi Permanen.

- **PT Bank Nagari**
Rp 58.608.000.000,00 Rp 58.608.000.000,00
Pencatatan dan pelaporan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesir Selatan pada PT. Bank Nagari menggunakan metode biaya karena hanya memiliki hak minoritas dengan persentase kepemilikan kecil dari 20% serta tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas manajemen perusahaan. Nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Pesir Selatan di PT. Bank Nagari per 31 Desember 2019 adalah sebesar nilai rupiah APBD yang telah dicairkan. Penyertaan modal PT Bank Nagari dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Jumlah saham (Lembar)	Nomor Seri	Nominal (Rp)	Tahun Penyertaan
1.	3.484	184.093 - 187.576	3.484.000.000,00	20-Sep-07
2.	343	352.984 - 353.326	343.000.000,00	03-Sep-09
3.	4.656	392.445 - 397.100	4.656.000.000,00	06-Sep-10
4.	6.637	511.416 - 513.811	6.637.000.000,00	Penyertaan 2012 dan 2013
		573.557 - 573.656		
		683.948 - 687.263		
		739.672 - 740.496		
5.	4.826	858.921 - 863.746	4.826.000.000,00	Penyertaan 2014
6.	6.489	998.701 - 1.005.189	6.489.000.000,00	Penyertaan 2015
7.	9785	1.241.829 - 1.250.912	9.785.000.000,00	Penyertaan 2016
		1.294.393 - 1.295.093		
8.	10.388	1.449.715 - 1.460.102	10.388.000.000,00	Penyertaan 2017
9.	12.000	1.562.986 - 1.574.985	12.000.000.000,00	Penyertaan 2018
	Total		58.608.000.000,00	

- **PDAM Pesir Selatan**
Rp 45.694.082.228,93 Rp 41.702.741.809,59
Pada Tahun 2019, Pemerintah daerah melakukan tambahan investasi permanen pada PDAM Pesir Selatan sebesar Rp4.329.000.000,00,- sesuai dengan ketetapan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesir Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015. Penyertaan modal pada PDAM juga berdasarkan Laporan Keuangan PDAM TB 2019 yang telah diaudit KAP berdasarkan Laporan Nomor 000282.0775/AU.2/02/0667-1/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020. Pengakuan investasi permanen pada PT PDAM Pesir Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

... 2015	Rp	18.941.704.715,07	
2016	Rp	9.000.000.000,00	
Bagian Laba 2016	Rp	38.218.167,56	
2017	Rp	9.000.000.000,00	
Bagian Laba 2017	Rp	222.818.926,96	
2018	Rp	4.500.000.000,00	
Koreksi Penyertaan Modal 2018	-Rp	42.000.000,00	
Bagian Rugi 2018	-Rp	299.745.280,66	
2019	Rp	4.329.000.000,00	
Koreksi bagian laba tahun-tahun sebelumnya	-Rp	155.070.370,00	
Bagian Laba 2019 LK audited	Rp	159.156.070,00	
Jumlah	Rp	45.694.082.228,93	

- **Perusa Kabupaten Pesir Selatan**
Rp 259.000.000,00 Rp 259.000.000,00
Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesir Selatan pada Perusahaan Daerah sebarunya dicatat dan dilaporkan menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Daerah merupakan investor mayoritas, namun sampai dengan laporan keuangan ini terbit perusahaan tersebut tidak/belum menyusun laporan keuangan yang dapat dijadikan dasar penghitungan penyertaan. Sesuai dengan Hasil Kerja/ Rumusan Tim Koordinasi Cek Fisik Perusahaan Daerah Kabupaten Pesir Selatan Tahun 2007, diketahui perusahaan ini sudah tidak beroperasi lagi sejak Tahun 1999. Dengan keterbatasan hal tersebut, maka pelaporan nilai penyertaan pada Perusahaan Daerah hanya berdasarkan jumlah realisasi rupiah/setoran tunai dana APBD yang disalurkan dan nilai sarana yang diserahkan pada saat pendirian perusahaan sebesar Rp259.000.000,00.

Penyajian nilai penyertaan modal sebesar Rp259.000.000,00 pada Perusahaan Daerah ini telah menjadi temuan BPK pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2010 dan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2011. Namun nilai ini tetap disajikan karena belum ada peraturan yang menyatakan tentang pelepasan investasi tersebut.

Pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013, BPK merekomendasikan agar Sekretaris Daerah memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan Pemeriksaan Khusus untuk menentukan kelangsungan hidup (going concern) Perusa. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut maka telah dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat dengan hasil pemeriksaan tertuang dalam LHP Nomor 304/LHP.KS/IDK-PS/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014. Pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusa sesuai Surat Bupati Nomor 180/Huk-IV/2015 tanggal 13 April 2015 dan Bupati telah menyampaikan Nota Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pencabutan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.

	Tahun 2019 (Rp)		Tahun 2018 (Rp)	
	Rp		Rp	
- PT BPR Samudra		5.460.015.264,30		5.088.319.732,26
Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada PT. BPR Samudra dalam bentuk kepemilikan saham posisi per 31 Desember 2019 dan 2018. Pada Tahun 2017 tambahan penyertaan modal pada PT BPR Samudra adalah sebesar Rp1.945.650.000,00. Pemerintah Daerah memiliki 88.913 lembar saham PT BPR Samudra dari total sebanyak 120.000 lembar. Investasi permanen pada PT BPR Samudra dapat dijelaskan sebagai berikut:				
2006	Rp	585.000.000,00		
2016	Rp	2.000.000.000,00		
Bagian Laba 2016	Rp	117.200.407,26		
2017	Rp	1.945.650.000,00		
Bagian Laba 2017	Rp	201.850.415,18		
Bagian Laba 2018	Rp	238.618.909,82		
Bagian Laba 2019	Rp	371.695.532,05		
Jumlah	Rp	5.460.015.264,30		

Per 31 Desember 2019, total investasi permanen Pemerintah Daerah pada BPR Samudra adalah Rp5.460.015.264,31 dengan porsi kepemilikan 74,09%. Pada Laporan Keuangan Tahun 2019 PT BPR Samudra *unaudited*, terdapat laba bersih Tahun berjalan senilai Rp501.681.106,83 sehingga diakui bagian laba pemerintah daerah sebesar Rp371.695.532,05 sebagai penambah saldo investasi permanen.

	Rp		Rp
- PT Balaiung Citrajaya Sumbar		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada PT. Balaiung Citrajaya Sumbar posisi per 31 Desember 2019 dan 2018.

Sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini selesai disusun, Laporan Keuangan PT. Balaiung Citrajaya Sumbar belum diterima oleh Pemerintah Daerah, sehingga tidak bisa diakui bagian laba pemerintah daerah di tahun 2019 dan tidak dapat dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini telah mengirim surat permintaan laporan keuangan perusahaan kepada PT. Balaiung Citrajaya Sumbar tertanggal 13 Desember 2019.

3) Aset Tetap	Rp	2.103.759.914.536,78	Rp	1.924.974.869.914,25
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan 2018. Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perencanaan, perolehan atau konstruksi, sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.				
Jenis dan jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:				
(a) Tanah	Rp	211.630.550.449,52		
(b) Peralatan dan Mesin	Rp	389.153.067.727,64		
(c) Gedung dan Bangunan	Rp	928.577.700.018,66		
(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.779.949.738.847,47		
(e) Aset Tetap Lainnya	Rp	89.659.582.872,75		
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	118.743.485.431,52		
Jumlah Aset Tetap Sebelum Penyusutan	Rp	3.517.714.125.347,56		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2019	Rp	(1.413.954.210.810,78)		
Jumlah Aset Tetap Tahun 2019	Rp	2.103.759.914.536,78		

Rincian aset tetap per kelompok aset per SKPD disajikan pada Lampiran. Secara umum terdapat sejumlah perbedaan nilai aset tetap pada Neraca dibandingkan dengan rincian pada lampiran yang disebabkan oleh pembulatan.

a) Tanah	Rp	211.630.550.449,52	Rp	210.370.463.469,52
Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tanah Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:				
Saldo awal	Rp	210.370.463.469,52		
Realisasi Belanja Modal (+)	Rp	2.213.332.947,00		
Biaya Pemunjang (+)	Rp	-		
Mutasi antar SKPD (+)	Rp	592.022.374,00		
Lain-lain (+)	Rp	75.000.000,00		
Reklasifikasi (+)	Rp	734.445.750,00		
Hibah (-)	Rp	(287.000.000,00)		
Mutasi antar SKPD (-)	Rp	(592.022.374,00)		
Reklasifikasi (-)	Rp	(539.631.717,00)		
Penghapusan (-)	Rp	(57.400.000,00)		
Lain-lain (-)	Rp	(878.660.000,00)		
Saldo Per 31 Des 2019	Rp	211.630.550.449,52		

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah berasal dari pengadaan tanah, baik yang berasal dari rekening belanja modal maupun dari rekening belanja barang/jasa. Didalam Aset Tanah terdapat tanah tukar guling di Nagari Punggasan untuk Pembangunan Rumah Khusus Nelayan. Pengakuan dan pencatatan Aset Tetap Tanah berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap.

Dalam saldo aset tetap Tanah terdapat Tanah yang saat ini dalam proses tukar guling antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat. Tanah tersebut berada di Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti dan diperuntukkan untuk rumah khusus nelayan.

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah per SKPD disajikan pada Lampiran Aset Tetap.

	Tahun 2019		Tahun 2018	
	(Rp)		(Rp)	
b) Peralatan dan Mesin	Rp	389.153.067.727,64	Rp	354.195.010.524,64

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	354.195.010.524,64
Realisasi Belanja Modal (+)	Rp	75.483.262.574,00
Biaya Pemunjang (+)	Rp	80.590.000,00
Hibah/Bantuan Diterima (+)	Rp	5.670.591.320,00
Mutasi antar SKPD (+)	Rp	4.969.884.448,00
Lain-lain (+)	Rp	-
Reklasifikasi (+)	Rp	1.707.527.458,43
Hibah/Bantuan diberikan (-)	Rp	(125.008.516,00)
Mutasi Antar SKPD (-)	Rp	(4.295.962.129,00)
Reklasifikasi (-)	Rp	(14.784.393.022,81)
Lain-lain (-)	Rp	(31.942.709.731,59)
Penghapusan (-)	Rp	(1.805.725.198,00)
Saldo Per 31 Des 2019	Rp	389.153.067.727,68

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD disajikan pada Lampiran Aset Tetap. Perbedaan nilai pada lembar muka (on face) LK dan rincian disebabkan karena pembulatan angka dibelakang koma.

Pada tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dilakukan perubahan batas kapitalisasi minimum untuk pengakuan per unit satuan peralatan dan mesin dari sebelumnya Rp300.000 menjadi Rp500.000. Penjelasan lebih lanjut tentang perubahan kebijakan ini disajikan dalam Bab IV Informasi Tambahan.

c) Gedung dan Bangunan	Rp	928.577.700.018,66	Rp	788.516.402.151,15
------------------------	----	--------------------	----	--------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	788.516.402.151,15
Realisasi Belanja Modal (+)	Rp	105.936.860.332,00
Biaya Pemunjang (+)	Rp	115.838.798,06
KDP Siap (+)	Rp	734.839.962,00
Hibah/Bantuan Diterima (+)	Rp	21.283.369.356,00
Mutasi antar SKPD (+)	Rp	42.616.491.222,00
Lain-lain (+)	Rp	1.000.000.000,00
Reklasifikasi (+)	Rp	26.019.478.987,68
Mutasi Antar SKPD (-)	Rp	(36.263.819.330,00)
Hibah/Bantuan diberikan (-)	Rp	-
Reklasifikasi (-)	Rp	(14.773.852.445,98)
Ekstrakontabel (-)	Rp	(906.588.753,19)
Penghapusan (-)	Rp	(5.397.042.210,00)
Lain-lain (-)	Rp	(304.278.050,00)
Saldo Per 31 Des 2018	Rp	928.577.700.019,73

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD disajikan pada Lampiran Aset Tetap. Perbedaan nilai pada lembar muka (on face) LK dan rincian disebabkan karena pembulatan angka dibelakang koma.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.779.949.738.847,47	Rp	1.641.742.730.851,68
--------------------------------	----	----------------------	----	----------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	1.641.742.730.851,68
Realisasi Belanja Modal (+)	Rp	141.059.929.431,00
Biaya Pemunjang (+)	Rp	71.109.458,00
Mutasi Antar SKPD (+)	Rp	29.915.000,00
Hibah/Bantuan Diterima (+)	Rp	2.374.387.000,00
Reklasifikasi (+)	Rp	11.638.022.592,79
Mutasi Antar SKPD (-)	Rp	(29.915.000,00)
Reklasifikasi (-)	Rp	(16.897.271.187,88)
Lain-lain (-)	Rp	(39.169.297,44)
Saldo Per 31 Des 2019	Rp	1.779.949.738.848,15

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD disajikan pada Lampiran Aset Tetap. Perbedaan nilai pada lembar muka (on face) LK dan rincian disebabkan karena pembulatan angka dibelakang koma.

e) Aset Tetap Lainnya	Rp	89.659.582.872,75	Rp	78.570.263.113,22
-----------------------	----	-------------------	----	-------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Ringkasan penambahan dan pengurangan aset tetap Lainnya Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	78.570.263.113,22
Realisasi Belanja Modal (+)	Rp	182.191.300,00
Biaya Penunjang (+)	Rp	-
Mutasi antar SKPD (+)	Rp	-
Reklasifikasi (+)	Rp	10.954.628.460,19
Reklasifikasi (-)	Rp	(47.500.000,00)
Saldo Per 31 Des 2019	Rp	89.659.582.873,42

Nilai dan rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD disajikan pada Lampiran Aset Tetap. Perbedaan nilai pada lembar muka (on face) LK dan rincian disebabkan karena pembulatan angka dibelakang koma.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
d) Konstruksi Dalam Pengerjaan	118.743.485.431,52	124.132.669.916,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	124.132.669.916,00
Mutasi Tambah	Rp	26.007.895.499,87
Mutasi Kurang	Rp	(31.397.079.985,09)
Saldo Per 31 Des 2019	Rp	118.743.485.430,78

Nilai dan rincian KDP per SKPD (termasuk tahun pembentukan dan rencana kelanjutannya) disajikan pada Lampiran Aset Tetap. Perbedaan nilai pada lembar muka (on face) LK dan rincian disebabkan karena pembulatan angka dibelakang koma. Saldo KDP tersebut diantaranya sebesar Rp83.165.803.217,74 merupakan kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Paiman yang dibentengi sementara sejak Tahun 2016 karena belum selesainya dokumen analisa dampak lingkungan. Urutan atas hal tersebut terdapat pada Bab VI Informasi-informasi Tambahan Terkait Laporan Keuangan.

g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	1.413.954.210.810,78	Rp	1.272.552.679.111,97
------------------------------------	----	----------------------	----	----------------------

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Daerah yang terkumulasi sampai Tahun pelaporan. Dalam hal ini penghitungan penyusutan dilakukan secara tahunan.

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD disajikan dalam Lampiran Penyusutan.

4) Dana Cadangan	Rp	-	Rp	-
Merupakan saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2019 dan 2018.				
5) Aset Lainnya	Rp	3.789.026.001,78	Rp	3.952.120.186,97
Merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Terjadi kenaikan Nilai Aset Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp84.612.949.302,68. Kenaikan ini terjadi karena adanya realisasi aktiva tidak berwujud, dan penambahan pada Aset lainnya-lainnya yang merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang sudah tidak digunakan untuk operasional karena kondisi rusak berat dan telah diusulkan oleh SKPD pengguna untuk penghapusan serta reklasifikasi aset terkait Relokasi RSUD M Zein Paiman yang sebelumnya dicatat di KDP (penjelasan lebih lanjut terkait hal ini disajikan dalam bab informasi tambahan). Ringkasan Aset Lainnya Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:				
(a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	Rp	-	Rp	-
(b) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Rp	-	Rp	-
(c) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Rp	111.726.013,00	Rp	110.300.775,00
(d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	126.000.000,00	Rp	126.000.000,00
(e) Aset Tidak Berwujud	Rp	3.548.080.824,86	Rp	2.175.460.858,05
(f) Akumulasi Amortisasi	-Rp	2.148.951.492,25	-Rp	1.879.435.858,05
(g) Aset Lain-lain	Rp	3.754.347.907,55	Rp	3.419.794.411,97
(h) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-Rp	1.602.177.251,38	Rp	-
Jumlah	Rp	3.789.026.001,78	Rp	3.952.120.186,97
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Rp	111.726.013,00	Rp	110.300.775,00
Tagihan tuntutan ganti rugi daerah 2019 merupakan sisa saldo TGR 2013 sebesar Rp116.725.546,00. Sisa TGR 2013 merupakan TGR yang ditetapkan berdasarkan LHP BPK Nomor 06/C/LHP/XVII/DPG/04/2013 tanggal 25 April 2013 terdapat ketekoran kas sebesar Rp273.390.413,00 pada sekretariat DPRD yang dianggap sebagai tuntutan ganti rugi (TGR) sehingga masing-masing pihak terkait harus menyetorkan ke Kas Daerah. Sesuai dengan buletin teknis PSAP No. 06 tentang Akuntansi Piutang, atas TPTGR dapat disajikan pada piutang sebagai bagian lancar tagihan tuntutan ganti kerugian daerah dan/atau aset lainnya pada tagihan tuntutan ganti kerugian jika ditempuh cara damai dengan dukungan dokumen surat keterangan tanggung jawab mutlak. Sedangkan jika yang bersangkutan memilih jalur pengadilan, hingga perkara ditetapkan, hanya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Pada TA 2019 tidak terdapat setoran TGR, namun berdasarkan hasil laporan inspektorat terdapat koreksi jumlah TGR sebesar Rp1.425.238,- sehingga saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2019 sebesar Rp111.726.013,00. Rincian nilai pada Lampiran.				
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	126.000.000,00	Rp	126.000.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini merupakan kerja sama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan PT.Pincuran Boga. Perjanjian Kerjasama dimulai pada Tahun 2005 dan akan berakhir pada Tahun 2025 (20 Tahun). Dalam hal ini PT.Pincuran Boga menggunakan tanah Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan mengoperasikan pabrik pembuatan es balok. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dicatat adalah sebesar harga				
- Aset Tidak Berwujud	Rp	3.548.080.824,86	Rp	2.175.460.858,05
Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2019 dan 2018. Penambahan Aset Tidak Berwujud terdapat pada Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Sipil, serta BPKD. Penambahan dan pengurangan Aset Tidak Berwujud 2019 disajikan sebagai berikut:				
Saldo Awal	Rp	2.175.460.858,05		
Mutasi Tambah	Rp	1.507.127.766,81		
Mutasi Kurang	Rp	134.507.800,00		
Saldo Akhir	Rp	3.548.080.824,86		

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Akumulasi Amortisasi	(2.148.951.492,50)	(1.879.435.858,05)
Jumlah tersebut merupakan jumlah akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018. Atas Aset Tidak Berwujud telah dilakukan amortisasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penambahan dan pengurangan akumulasi amortisasi per SKPD disajikan pada lampiran.		
Aset Lain-lain	Rp 3.754.347.907,55	Rp 3.419.794.411,97
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018. Terdapat peningkatan nilai aset lain-lain akibat reklasifikasi dari aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan untuk operasional karena kondisi rusak berat dan telah diusulkan oleh SKPD pengguna untuk penghapusan, yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bappedalitbang.		
Rincian Aset Lainnya per SKPD per masing-masing kelompok Aset Lainnya disajikan pada Lampiran Aset Lainnya.		
6) Kewajiban	Rp 65.150.384.373,07	Rp 66.837.847.630,20
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Daerah terdiri dari:		
1) Kewajiban Jangka Pendek	Rp 65.150.384.373,07	
2) Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	
Jumlah kewajiban per 31 Desember 2019	Rp 65.150.384.373,07	
1) Kewajiban Jangka Pendek	Rp 65.150.384.373,07	Rp 62.128.902.630,20
Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.		
Kewajiban Jangka Pendek mencakup Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang Belanja, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga rincian sebagai berikut:		
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp -	
b) Utang Bunga	Rp 42.896.553,77	
c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp 4.708.945.000,00	
d) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 180.895.252,00	
e) Utang Pada Pihak ketiga	Rp 59.490.707.338,30	
f) Utang Beban	Rp -	
g) Utang Transfer	Rp -	
h) Utang Jangka Pendek lainnya	Rp -	
Jumlah	Rp 726.940.229,00	
	Rp 65.150.384.373,07	
Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2019 berjumlah Rp65.150.384.373,07. Dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember Tahun 2018 sebesar Rp62.128.902.630,20 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2019 naik sebesar Rp3.021.481.742,86. Kewajiban Jangka Pendek dapat dirinci sebagai berikut:		
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp -	Rp 80.727,00
Jumlah tersebut merupakan saldo PFK per 31 Desember 2019 dan 2018. Saldo PFK per 31 Desember 2019 merupakan PFK pada SKPD RSUD.		
b) Utang Bunga	Rp 42.896.553,77	Rp 131.910.831,15
Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Bunga per 31 Desember 2019 dan 2018. Pembayaran bunga ini merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah kepada PT SMI terkait Kewajiban Jangka Panjang Kegiatan Relokasi RSUD M. Zein, dengan tingkat suku bunga 9,5% per Tahun. Penjelasan lebih rinci terkait pinjaman daerah ini disajikan pada Bab IV Informasi Tambahan Kewajiban pembayaran bunga ini dibayarkan setiap periode 3 (tiga) bulan.		
Utang Bunga per 31 Desember 2019 sebesar Rp42.896.553,77 merupakan bunga bulan November dan Desember 2019 yang dibayar pada Februari 2020.		
c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp 4.708.945.000,00	Rp 9.417.890.000,00
Jumlah tersebut merupakan Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019 dan 2018. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun 2019 merupakan bagian utang jangka panjang kepada PT SMI yang akan jatuh tempo pada tahun 2020. Penjelasan lebih rinci terkait pinjaman daerah ini disajikan pada Bab VI Informasi Tambahan Lainnya.		
Saldo Awal		9.417.890.000
Mutasi Tambah (reklasifikasi dari utang jk panjang)		4.708.945.000
Mutasi Kurang (pembayaran selama tahun 2019)		9.417.890.000
		9.417.890.000
Monday, 25 February 2019	2.354.472.500	
Wednesday, 22 May 2019	2.354.472.500	
Monday, 26 August 2019	2.354.472.500	
Monday, 25 November 2019	2.354.472.500	
Saldo Akhir		4.708.945.000
d) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 180.895.252,00	Rp 55.109.078,00
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018. Untuk tahun 2019, pendapatan diterima dimuka berasal dari pajak reklame pada Badan Pendapatan yang kontrak sewanya melewati 31 Desember 2019 (jatuh tempo pada 2020). Rincian pendapatan diterima dimuka ini disajikan pada lampiran.		
e) Utang pada Pihak Ketiga	Rp 59.490.707.338,30	Rp 48.512.345.865,55
Jumlah tersebut merupakan Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018. Pengakuan Utang pada Pihak Ketiga dilakukan berdasarkan perbandingan persentase pembayaran kegiatan dengan persentase penyelesaian fisik kegiatan, serta konfirmasi dari pihak ketiga terkait. Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut:		

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN TA 2019

SKPD		Jumlah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	38.553.075.168,30
RSUD	Rp	17.622.604.027,00
Dinas Pertanian	Rp	1.455.550.000,00
Dinas PSDA	Rp	1.706.713.343,00
BPBD	Rp	152.764.800,00
Jumlah	Rp	59.490.707.338,30

Rincian Utang pada pihak ketiga ini termasuk utang terkait pekerjaan 2018 yang sumber dananya dianggarkan dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi. Sampai dengan laporan ini disajikan belum ada realisasi penerimaan BKK ini dari provinsi. Penjelasan lebih lanjut tentang BKK ini disajikan pada bab informasi tambahan. Rincian utang pada pihak ketiga disajikan pada Lampiran.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
f) Utang Bebas	Rp	Rp
Jumlah tersebut merupakan Utang Bebas per 31 Desember 2019 dan 2018.	-	-
g) Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	Rp
Jumlah tersebut merupakan Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018. Pada tahun 2019 utang jangka pendek lainnya terdiri atas utang gaji, tagihan air dan listrik SKPD bulan Desember 2019. Rincian utang jangka pendek lainnya per SKPD disajikan dalam lampiran.	726.940.229,00	4.011.566.128,50
2) Kewajiban Jangka Panjang	Rp	Rp
Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi (satu Tahun). Kewajiban jangka panjang terdiri dari :	-	4.708.945.000,00
Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	Rp
Jumlah tersebut merupakan Utang Jangka Dalam Negeri kepada PT SMI per 31 Desember 2019 dan 2018. Pembayaran pokok utang dilakukan per 3 (tiga) bulan sesuai perjanjian pinjaman daerah. Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:	-	4.708.945.000,00
Saldo Awal	Rp	4.708.945.000
Mutasi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang	Rp	4.708.945.000
- Bagian Lancar (Reklas ke Utang jangka pendek)	Rp	4.708.945.000
Saldo Akhir	Rp	-
Penjelasan lebih rinci mengenai Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya dalam dilampirkan pada Bab VI.		
7) Ekuitas	Rp	Rp
Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Daerah atas aset dengan kewajibannya.	2.244.064.351.166,14	2.052.644.213.091,89

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban-LO, dan Surplus/Defisit Operasional.

5.3.1 Pendapatan Laporan Operasional

Pendapatan Daerah pada Laporan Operasional di Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.540.256.562.616,17. Pada Laporan Realisasi Anggaran nilai Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp1.669.011.062.108,43 sehingga pendapatan daerah pada LO lebih kecil dibanding pendapatan daerah pada LRA sebesar Rp158.754.499.492,26. Rincian Pendapatan-LO dan perbedaan saldo dengan Pendapatan LRA dapat diringkas sebagai berikut:

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Varians
1) Pendapatan Asli Daerah	Rp 138.713.108.222,17	Rp 134.804.594.146,43	Rp 3.908.514.075,74
2) Pendapatan Transfer	Rp 1.315.227.495.783,00	Rp 1.477.908.691.691,00	-Rp 162.681.195.908,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Rp 1.217.350.177.100,00	Rp 1.213.735.540.008,00	Rp 3.624.637.092,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Rp 29.946.867.000,00	Rp 196.252.700.000,00	-Rp 166.305.833.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 67.930.451.683,00	Rp 67.930.451.683,00	Rp -
3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp 86.315.958.611,00	Rp 86.297.776.271,00	Rp 18.182.340,00
Total	Rp 1.540.256.562.616,17	Rp 1.699.011.062.108,43	-Rp 158.754.499.492,26
1) Pendapatan Asli Daerah	Rp	Rp	Rp
a) Pendapatan Pajak Daerah LO	Rp	Rp	Rp
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2019 dan 2018. Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2019 naik sebesar Rp727.219.712,90 atau 3,09% dibandingkan Tahun 2018. Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2019 diakui lebih besar dari Pendapatan Pajak Daerah LRA TA 2019 sebesar Rp436.293.963,00. Hal ini disebabkan karena perbedaan pengakuan pendapatan, dimana pengakuan pendapatan pada LO berbasis akrual, sedangkan pada LRA berbasis kas. Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:	138.713.108.222,17	24.233.951.217,87	108.654.612.800,36
			23.506.731.504,97

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Varians
Pendapatan Pajak Daerah-LO	Rp 24.233.951.217,87	Rp 23.797.657.254,87	Rp 436.293.963,00

Jumlah selisih tersebut merupakan penambahan Pendapatan Pajak Daerah-LO karena pengakuan piutang pajak TA 2019 pada Badan Pendapatan sebesar Rp436.293.963,00,- dan pengurangan karena piutang pajak TA 2018 pada Badan Pendapatan yang telah diakui pada pendapatan pajak daerah-LO tahun 2018 sebesar Rp181.261.129,00

		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
b Pendapatan Retribusi Daerah LO		5.621.543.147,00	4.653.851.733,00
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2019 dan 2018. Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2019 meningkat sebesar Rp967.691.414,00 atau 20,79% dibandingkan Tahun 2018. Nilai Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2019 diakui lebih besar dari Pendapatan Retribusi Daerah LRA TA 2019 sebesar Rp86.424.000,00. Hal ini disebabkan karena perbedaan pengakuan pendapatan, dimana pengakuan pendapatan pada LO berbasis akrual, sedangkan pada LRA berbasis kas. Dalam hal ini selisih antara pendapatan retribusi LRA dengan LO terdiri atas:			
Pendapatan retribusi LO	Rp	5.621.543.147,00	
Pendapatan retribusi LRA	Rp	5.535.119.147,00	
Selisih	Rp	86.424.000,00	
Penjelasan selisih:			
+ Piutang Per 31 Des 2019	Dinas Kesehatan	Rp	-
	Dinas Koperasi	Rp	219.096.000
	Dinas Kominfo	Rp	12.160.000
	Dinas Pariwisata	Rp	40.000.000
- Piutang Per 31 Desember 2018	Dinas Koperasi	-Rp	50.412.000
	Dinas Perhubungan	-Rp	134.420.000
	Rp	86.424.000,00	
c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		Rp 8.903.717.591,01	Rp 5.711.160.313,00
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2019 dan 2018. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2019 meningkat sebesar Rp3.192.557.278,01 atau 55,90% dibandingkan Tahun 2018. Nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2019 dengan LO berbeda sebesar Rp507.786.751,01 yang merupakan pengakuan bagian laba dari investasi permanen pada PDAM dan PT BPR Samudra.			
d Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO		Rp 99.953.896.266,29	Rp 74.782.869.249,39
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun 2019 dan 2018. Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun 2019 naik sebesar Rp25.171.027.016,90 atau 33,65% dibandingkan Tahun 2018. Nilai Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO TA 2019 diakui lebih kecil dari Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA TA 2019 sebesar Rp2.878.009.361,73 dengan rincian sebagai berikut:			
Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	Rp	99.953.896.266,29	
Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LRA	Rp	97.075.886.904,56	
Selisih	Rp	2.878.009.361,73	
Rincian selisih PAD Lainnya LRA dan LO disajikan pada Lampiran.			
2) Pendapatan Transfer			
- Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		Rp 1.217.350.177.100,00	Rp 1.120.389.365.019,00
a Dana Bagi Hasil Pajak-LO		Rp 19.424.119.305,00	Rp 15.596.671.431,00
Jumlah tersebut merupakan Dana Bagi Hasil Pajak LO Tahun 2019 dan 2018. Dana Bagi Hasil Pajak LO Tahun 2019 naik sebesar Rp3.827.447.874,00 atau 24,54% dibandingkan Tahun 2018. Terdapat perbedaan pengakuan Dana Bagi Hasil Pajak LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak LRA sebesar Rp3.222.021.429,00 dimana Dana Bagi Hasil Pajak LO diakui lebih sedikit dari LRA. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:			
Rincian	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	Dana Bagi Hasil Pajak-LRA	Varians
Dana Bagi Hasil Pajak-LO	Rp 19.424.119.305,00	Rp 16.202.097.876,00	Rp 3.222.021.429,00
Jumlah selisih tersebut merupakan penambahan Dana Bagi Hasil Pajak-LO karena pengakuan piutang dana bagi hasil TA 2019 pada PPKD sebesar Rp4.785.800.430,- dan pengurangan karena piutang dana bagi hasil TA 2018 pada PPKD yang telah diakui pada pendapatan Dana Bagi Hasil-LO tahun 2018 sebesar Rp5.943.979.697,00. Selain itu terdapat penyesuaian atas adanya PMK No.20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada TA 2020 dan PMK No.36/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Dalam Rangka Pandemi COVID-19.			
b Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO		Rp 3.643.478.213,00	Rp 1.532.868.878,00
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2019 dan 2018. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2019 meningkat sebesar Rp2.110.609.335,00 atau 137,69% dibandingkan Tahun 2018. Terdapat perbedaan nilai Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO TA 2018 dengan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA TA 2019 dikarenakan adanya PMK No.20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada TA 2020 dan PMK No.36/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Dalam Rangka Pandemi COVID-19.			
c Dana Alokasi Umum-LO		Rp 862.608.266.000,00	Rp 838.100.134.000,00
Jumlah tersebut merupakan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2019 dan 2018. Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2019 meningkat senilai Rp24.508.132.000,00 atau 2,92% dibandingkan Tahun 2018. Tidak terdapat perbedaan nilai Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO TA 2019 dengan Dana Alokasi Umum-LRA TA 2019			
d Dana Alokasi Khusus-LO		Rp 331.674.313.582,00	Rp 265.159.690.710,00
Jumlah tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2019 dan 2018. Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2019 meningkat sebesar Rp66.514.662.972,00 atau 25,08% dibandingkan Tahun 2018. Tidak terdapat perbedaan nilai Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO TA 2019 dengan Dana Alokasi Khusus-LRA TA 2019.			
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		Rp 29.946.867.000,00	Rp 154.706.367.000,00
a Dana Otonomi Khusus-LO		Rp -	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Dana Otonomi Khusus-LO Tahun 2019 dan 2018. Dana Otonomi Khusus-LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 berjumlah nihil. Tidak terdapat perbedaan nilai Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO TA 2019 dengan Dana Otonomi Khusus-LRA TA 2019.			
b Dana Penyesuaian-LO		Rp 29.946.867.000,00	Rp 154.706.367.000,00
Jumlah tersebut merupakan Dana Penyesuaian-LO Tahun 2019 dan 2018. Dana Penyesuaian-LO Tahun 2019 menurun sebesar Rp124.759.500.000 atau 80,64% dibandingkan Tahun 2018. Sesuai dengan Bulek 21 Akuntansi Akrual, Pendapatan dan Beban yang terkait dengan Dana Desa/Nagari senilai Rp166.305.833.000,00 tidak diakui sebagai Pendapatan Transfer LO karena bukan merupakan bagian dari operasional Pemerintah Daerah			

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
- Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 67.930.451.683,00	Rp 61.912.369.565,00
a Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	Rp 67.930.451.683,00	Rp 61.912.369.565,00
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO Tahun 2019 dan 2018. Dibandingkan dengan TA 2018, penerimaan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp6.018.082.118,00 atau 9,72%.		
b Pendapatan Bagi Hasil/Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi -LO	Rp -	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil/Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2019 dan 2018. Tidak terdapat perbedaan nilai Pendapatan Bagi Hasil/Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2019 dengan Pendapatan Bagi Hasil BKK Provinsi-LRA TA 2019.		
3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp 86.315.958.611,00	Rp 72.865.121.833,00
a Pendapatan Hibah-LO	Rp 86.315.958.611,00	Rp 72.865.121.833,00
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2019 dan 2018. Pendapatan Hibah-LO Tahun 2019 meningkat sebesar Rp13.450.836.778,00 atau 18,46% dibandingkan Tahun 2018. Tidak terdapat perbedaan nilai Pendapatan Hibah-LO TA 2019 dengan Pendapatan Hibah LRA TA 2019.		
b Pendapatan Dana Darurat-LO	Rp -	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Darurat-LO Tahun 2019 dan 2018. Pendapatan Dana Darurat-LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 berjumlah nihil. Tidak terdapat perbedaan nilai Pendapatan Dana Darurat-LO TA 2019 dengan Pendapatan Dana Darurat-LRA TA 2019.		
c Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2019 dan 2018. Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2019 sama dengan Tahun 2018 berjumlah nihil. Tidak terdapat perbedaan nilai Pendapatan Lainnya-LO TA 2019 dengan Pendapatan Lainnya LRA TA 2019.		

5.3.2 Beban Laporan Operasional

Rp 1.345.634.129.955,12 Rp 1.428.104.031.410,92

Beban pada Laporan Operasional di Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.345.634.129.955,12. Pada Laporan Realisasi Anggaran, nilai Belanja Operasi dan transfer adalah sebesar Rp1.105.164.932.412,00 sehingga Beban pada LO lebih besar dibanding kan Belanja pada LRA sebesar Rp240.469.197.543,12 yang diantaranya disebabkan karena adanya beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi yang tidak terdapat dalam belanja LRA. Rincian Beban-LO dan perbedaan saldo dengan Belanja LRA dapat diringkas sebagai berikut:

Rincian	Beban-LO	Belanja-LRA	Varians
1) Beban Pegawai	732.973.188.584,00	736.472.798.914,00	- 3.499.610.330,00
2) Beban Persediaan	39.298.920.216,43	38.029.598.953,00	1.269.321.263,43
3) Beban Jasa	204.778.102.417,85	193.807.772.927,00	10.970.329.490,85
4) Beban Pemeliharaan	23.003.536.444,94	23.421.399.950,00	- 417.863.505,06
5) Beban Perjalanan Dinas	45.239.353.710,00	45.239.353.710,00	-
6) Beban Bunga	1.062.481.249,77	1.019.584.696,00	42.896.553,77
7) Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
8) Beban Hibah	52.530.370.138,00	63.511.828.712,00	- 10.981.458.574,00
9) Beban Bantuan Sosial	3.662.594.550,00	176.500.000,00	3.486.094.550,00
10) Beban Penyusutan dan Amortisasi	141.464.248.192,20	-	141.464.248.192,20
11) Beban Transfer	95.649.613.540,71	-	95.649.613.540,71
12) Beban Lain-Lain	5.971.720.911,22	-	5.971.720.911,22
Total	Rp 1.345.634.129.955,12	Rp 1.101.678.837.862,00	243.955.292.093,12

- 1) **Beban Pegawai** Rp 732.973.188.584,00 Rp 722.742.687.093,00
Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai LO Tahun 2019 dan 2018. Beban Pegawai LO Tahun 2019 naik sebesar Rp10.230.501.491,00 dibandingkan Tahun 2018. Nilai Beban Pegawai-LO TA 2019 diakui lebih rendah dari Belanja Pegawai LRA TA 2019 sebesar Rp5.460.514.920,00. Perbedaan ini disebabkan karena adanya Belanja Pegawai LRA yang merupakan bagian dari harga perolehan aset tetap. Rekapitulasi perbedaan pengakuan beban pegawai LO dengan belanja pegawai LRA disajikan pada Lampiran.
- 2) **Beban Persediaan** Rp 39.298.920.216,43 Rp 18.656.273.765,76
Jumlah tersebut merupakan Beban Persediaan LO Tahun 2019 dan 2018. Beban Persediaan LO Tahun 2019 naik sebesar Rp20.642.646.450,67 dibandingkan Tahun 2018. Nilai Beban Persediaan-LO TA 2019 diakui lebih tinggi dari Belanja Persediaan LRA TA 2019 sebesar Rp1.269.321.263,43. Perbedaan ini disebabkan karena sisa persediaan 2019 belum dicatat sebagai beban persediaan, dan pencatatan sisa persediaan 2018, serta adanya nilai persediaan yang dikapitalisir menjadi aset tetap. Rekapitulasi perbedaan pengakuan beban persediaan LO dengan belanja terkait di LRA disajikan pada Lampiran.
- 3) **Beban Jasa** Rp 204.778.102.417,85 Rp 195.536.250.941,19
Jumlah tersebut merupakan Beban Jasa LO Tahun 2019 dan 2018. Beban Jasa LO Tahun 2019 meningkat sebesar Rp9.241.851.476,66 atau 4,72% dibandingkan Tahun 2018. Nilai Beban Jasa-LO TA 2019 diakui lebih rendah dari Belanja Jasa LRA TA 2019 sebesar Rp10.970.329.490,85. Perbedaan ini diakibatkan adanya Belanja Jasa yang Dikapitalisir Sebagai Perunjang Aktiva Tetap. Rekapitulasi perbedaan pengakuan beban jasa LO dengan belanja terkait di LRA disajikan pada Lampiran.
- 4) **Beban Pemeliharaan** Rp 23.003.536.444,94 Rp 29.081.131.634,00
Jumlah tersebut merupakan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2019 dan 2018. Beban Pemeliharaan LO Tahun 2019 menurun sebesar Rp6.077.595.189,06 atau 20,90% dibandingkan Tahun 2018. Nilai Beban Pemeliharaan-LO TA 2019 diakui lebih rendah dari Belanja Pemeliharaan LRA TA 2019 sebesar Rp417.863.505,06. Perbedaan ini disebabkan karena adanya belanja pemeliharaan yang dikapitalisir menjadi aset tetap. Rekapitulasi perbedaan pengakuan beban pemeliharaan LO dengan belanja pemeliharaan di LRA disajikan pada Lampiran.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TA 2019

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
5) Beban Perjalanan Dinas	Rp 45.239.353.710,00	Rp 47.230.181.410,00
Jumlah tersebut merupakan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2019 dan 2018. Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2019 menurun sebesar Rp1.990.827.700,00 atau 4,21% dibandingkan Tahun 2018. Tidak terdapat perbedaan nilai antara Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2019 dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA TA 2019.		
6) Beban Bunga	Rp 1.062.481.249,77	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Beban Bunga LO Tahun 2019 dan 2018. Beban bunga merupakan bunga atas pinjaman kepada PT SMI untuk pembangunan Relokasi RSUD M Zein Paiman. Terdapat perbedaan pencatatan antara Beban Bunga LO dengan LRA sebesar Rp42.896.553,77 karena koreksi atas pengakuan Utang Bunga atas Pinjaman kepada PT. SMI sebesar Rp42.896.553,77. Nilai tersebut merupakan bunga Bulan November dan Desember 2019. Atas nilai tersebut pada LK telah disajikan pada Utang Bunga di Neraca.		
7) Beban Subsidi	Rp -	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Beban subsidi LO Tahun 2019 dan 2018. Tidak terdapat beban subsidi per 31 desember 2018.		
8) Beban Hibah	Rp 52.530.370.138,00	Rp 42.696.231.528,00
Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah LO Tahun 2019 dan 2018. Beban Hibah LO Tahun 2019 meningkat sebesar Rp9.834.138.610,00 atau 23,03% dibandingkan Tahun 2018. Nilai beban hibah LO diakui lebih besar daripada belanja hibah dalam LRA, karena pada beban hibah termasuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang pada LRA dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa. Rekapitulasi perbedaan pengakuan beban hibah LO dengan belanja hibah di LRA disajikan pada Lampiran.		
9) Beban Bantuan Sosial	Rp 3.662.594.550,00	Rp 1.123.750.000,00
Jumlah tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2019 dan 2018. Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2019 meningkat cukup signifikan senilai Rp2.538.844.550,00 dibandingkan Tahun 2018. Terdapat perbedaan antara Beban Bantuan Sosial-LO dengan Belanja Bantuan Sosial LRA sebesar Rp3.486.094.550,00 yang merupakan Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga berupa Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.		
10) Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 141.464.248.192,20	Rp 129.343.674.922,97
Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan dan amortisasi LO Tahun 2019 dan 2018. Beban penyusutan merupakan estimasi beban sebagai akibat penggunaan aset tetap, sedangkan amortisasi merupakan estimasi penggunaan beban dari aktiva tidak berwujud. Beban penyusutan dan amortisasi ini tidak terdapat pada LRA.		
11) Beban Transfer	Rp 95.649.613.540,71	Rp 241.401.772.091,00
Jumlah tersebut merupakan Beban transfer LO Tahun 2019 dan 2018. Beban transfer LO tahun 2019 menurun sebesar Rp145.752.158.550,29 dibandingkan tahun 2018 karena koreksi atas Pendapatan Transfer dan Beban Transfer berupa Dana Desa/Nagari. Sesuai dengan Bulek 21 Akuntansi Akruel, Pendapatan dan Beban yang terkait dengan Dana Desa/Nagari bukan sebagai kinerja Pemkab.		
12) Beban Lain-Lain	Rp 5.971.720.911,22	Rp 292.078.025,00
Jumlah tersebut merupakan Beban lain-lain LO tahun 2019 dan 2018. Terdapat penurunan nilai beban lain-lain dari 2018 ke 2019 sebesar Rp5.679.642.886,22. Beban lain-lain LO merupakan reklasifikasi belanja modal ke ekstrakomptable. Rekapitulasi perbedaan pengakuan beban lain-lain LO disajikan pada Lampiran.		
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp 194.622.432.661,05	Rp 333.643.237.328,83
Jumlah tersebut merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2018. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 menurun sebesar Rp139.020.804.667,78 dibandingkan Tahun 2018. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan Operasi LO dikurangi Beban Operasi LO.		
5.3.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp (373.131.715,45)	Rp -
1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2019 dan 2018. Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2019 dan Tahun 2018 berjumlah Nihil.		
2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 dan 2018. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 dan Tahun 2018 berjumlah Nihil.		
3) Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2019 dan 2018. Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2019 dan Tahun 2018 berjumlah Nihil.		
4) Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 dan 2018. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 dan Tahun 2018 berjumlah Nihil.		
5) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (373.131.715,45)	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 dan 2018. Pada tahun 2019 adanya obat kadaluwarsa pada RSUD M. Zein dan Dinas Kesehatan sebesar Rp373.131.715,45.		
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp (373.131.715,45)	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara Pendapatan Non Operasi dikurangi Beban Non Operasi. Pada Tahun 2019, Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah Rp373.131.715,45.		

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 194.249.300.945,60	Rp 333.643.237.328,83
Jumlah tersebut merupakan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2019 dan 2018. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit Kegiatan Operasional dengan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2019 meningkat sebesar Rp40.778.240.994,00 atau 82,14% dibandingkan Tahun 2018.		

5.3.4 Pos Luar Biasa

1) Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2019 dan Tahun 2018. Tidak ada realisasi Pendapatan Luar Biasa pada Tahun 2019 dan 2018.		
2) Beban Luar Biasa	Rp 1.643.568.300,00	Rp 4.216.685.197,00
Jumlah tersebut merupakan Beban Luar Biasa Tahun 2019 dan 2018. Beban Luar Biasa merupakan Beban dari Belanja Tak Terduga. Terdapat Penurunan Beban Luar Biasa Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp2.573.116.897,00. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Luar Biasa LO Tahun 2019 dengan Belanja Tak Terduga LRA Tahun 2019.		
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp (1.643.568.300,00)	Rp (4.216.685.197,00)
Jumlah Pos Luar Biasa merupakan Pendapatan Luar Biasa dikurang Beban Luar Biasa. Jumlah Pos Luar Biasa Tahun 2019 adalah Rp(1.643.568.300,00). Jumlah ini meningkat sebesar Rp2.573.116.897,00 dibandingkan tahun 2018.		

Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 192.605.732.645,60	Rp 329.426.552.131,83
Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dengan Jumlah Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2019 meningkat sebesar Rp38.617.331.931,11 atau 187,25% dibandingkan Tahun 2018.		

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS**5.5.1 Arus Kas Aktivitas Operasi**

Arus Kas Aktivitas Operasi menggambarkan aliran kas masuk dari sumber-sumber penerimaan yang berhubungan langsung dengan operasional Pemerintah Daerah, seperti penerimaan PAD, dan aliran kas keluar dari pengeluaran/belanja yang berhubungan langsung dengan operasional Pemerintah Daerah, seperti belanja daerah.

1) Arus Masuk Kas	Rp 1.699.011.062.108,43	Rp 1.529.141.850.638,36
Jumlah tersebut merupakan arus masuk kas dari aktivitas operasi selama Tahun anggaran 2019 dan 2018 yang terdiri atas :		
Penerimaan Pajak Daerah	Rp 23.797.657.254,87	Rp 23.751.789.554,97
Penerimaan Retribusi daerah	Rp 5.535.119.147,00	Rp 4.552.508.117,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 8.395.930.840,00	Rp 5.711.160.313,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 97.075.886.904,56	Rp 89.891.066.458,39
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 16.202.097.876,00	Rp 15.596.671.431,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp 3.240.862.550,00	Rp 1.532.868.878,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp 862.608.266.000,00	Rp 838.100.134.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp 331.674.313.582,00	Rp 265.159.090.710,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -
Penerimaan Dana Penyesuaian	Rp 196.252.700.000,00	Rp 154.706.367.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 67.930.451.683,00	Rp 57.274.472.343,00
Pendapatan Bagi Hasil Lain-lain/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah	Rp -	Rp -
Penerimaan Hibah	Rp 86.297.776.271,00	Rp 72.865.121.833,00
Penerimaan Dana Darurat	Rp -	Rp -
Penerimaan Lainnya	Rp -	Rp -
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -
Rp 1.699.011.062.108,43	Rp 1.529.141.850.638,36	
2) Arus Keluar Kas	Rp 1.368.763.947.252,71	Rp 1.311.734.223.993,95
Jumlah tersebut merupakan arus keluar kas dari aktivitas operasi selama Tahun anggaran 2019 dan 2018 yang terdiri atas :		
Pembayaran Pegawai	Rp 727.512.673.664,00	Rp 694.513.936.934,00
Pembayaran Barang	Rp 360.510.348.327,00	Rp 356.413.519.143,95
Pembayaran Bunga	Rp 1.019.584.696,00	Rp 1.926.710.628,00
Pembayaran Subsidi	Rp -	Rp -
Pembayaran Hibah	Rp 15.945.825.725,00	Rp 12.137.850.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	Rp 176.500.000,00	Rp 1.123.750.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	Rp 1.643.568.300,00	Rp 4.216.685.197,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	Rp 2.739.891.708,68	Rp 3.094.131.986,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	Rp 414.001.262,09	Rp 350.981.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp 258.801.553.569,94	Rp 237.956.659.105,00
Pembayaran Keindian Luar Biasa	Rp -	Rp -
Rp 1.368.763.947.252,71	Rp 1.311.734.223.993,95	
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 330.247.114.855,72	Rp 217.407.626.644,41
Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi Tahun 2019 dan 2018. Arus kas bersih sejumlah tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional tanpa mengandalkan sumber dana dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dapat diringkas sebagai berikut:		
Arus Masuk Kas	Rp 1.699.011.062.108,43	Rp 1.529.141.850.638
Arus Keluar Kas	Rp 1.368.763.947.252,71	Rp 1.311.734.223.994
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 330.247.114.855,72	Rp 217.407.626.644

5.5.2 Arus Kas Aktivitas Investasi

Arus Kas Aktivitas Investasi menggambarkan aliran kas masuk dari sumber-sumber penerimaan yang berhubungan dengan investasi Pemerintah Daerah, seperti penjualan aset daerah, dan aliran kas keluar dari pengeluaran/belanja yang berhubungan dengan investasi Pemerintah Daerah, seperti perolehan aset tetap.

1) Arus Masuk Kas	Rp -	Rp -
Jumlah tersebut merupakan arus masuk kas dari aktivitas investasi selama Tahun anggaran 2019 dan 2018 yang terdiri atas :		

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -
Penjualan atas Tanah	Rp -	Rp -
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -
Penjualan Aset Tetap	Rp -	Rp -
Penjualan Aset Lainnya	Rp -	Rp -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 42.000.000,00	Rp -
Penerimaan Pengembalian Investasi Non Permanen	Rp 36.748.700,00	Rp -
2) Arus Keluar Kas	Rp 78.748.700,00	Rp -
Jumlah tersebut merupakan arus keluar kas dari aktivitas investasi selama Tahun anggaran 2019 dan 2018 yang terdiri atas :	Rp 329.204.576.584,00	Rp 273.786.726.595,00
Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -
Perolehan Tanah	Rp 2.213.332.947,00	Rp 2.951.541.480,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp 75.483.262.574,00	Rp 31.894.874.951,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp 105.936.860.332,00	Rp 99.453.363.095,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 141.059.929.431,00	Rp 122.876.995.494,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp 182.191.300,00	Rp 109.951.575,00
Perolehan Aset Lainnya	Rp -	Rp -
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp 4.329.000.000,00	Rp 16.500.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	Rp -	Rp -
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp (329.125.827.884,00)	Rp (273.786.726.595,00)
Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2019 dan 2018. Arus kas bersih sejumlah tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi dapat diringkas sebagai berikut:		
Arus Masuk Kas	Rp 78.748.700	Rp -
Arus Keluar Kas	Rp 329.204.576.584	Rp 273.786.726.595
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-Rp 329.125.827.884	-Rp 273.786.726.595

5.5.3 Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan menggambarkan aliran kas masuk dari sumber-sumber penerimaan yang berhubungan dengan Pendanaan Pemerintah Daerah, seperti pinjaman daerah, dan aliran kas keluar dari pengeluaran/belanja yang berhubungan dengan Pendanaan Pemerintah Daerah, seperti pembayaran pokok pinjaman.

1) Arus Masuk Kas	Rp -	Rp -
Jumlah tersebut merupakan arus masuk kas dari aktivitas pendanaan selama Tahun anggaran 2019 dan 2018 yang terdiri atas :		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp -	Rp -
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya	Rp -	Rp -
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	Rp -	Rp -
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp -	Rp -
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	Rp -	Rp -
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	Rp -	Rp -
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	Rp -	Rp -
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	Rp -	Rp -
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemda Lainnya	Rp -	Rp -
Penerimaan Pinjaman	Rp -	Rp -
2) Arus Keluar Kas	Rp 9.417.890.000,00	Rp 9.417.890.000,00
Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan selama TA 2019 dan 2018 yang terdiri atas :		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp -	Rp -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya	Rp -	Rp -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	Rp -	Rp -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp 9.417.890.000	Rp 9.417.890.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	Rp -	Rp -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	Rp -	Rp -
Pembayaran Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	Rp -	Rp -
Pembayaran Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	Rp -	Rp -
Pembayaran Pinjaman Kepada Pemda Lainnya	Rp -	Rp -
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp (9.417.890.000,00)	Rp (9.417.890.000,00)
Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus kas masuk dengan arus keluar kas dari aktivitas Pendanaan Tahun 2019 dan 2018 yang dapat diringkas sebagai berikut:		
Arus Masuk Kas	Rp -	Rp -
Arus Keluar Kas	Rp 9.417.890.000,00	Rp 9.417.890.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-Rp 9.417.890.000,00	-Rp 9.417.890.000,00

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
5.5.4 Arus Kas Aktivitas Transitoris		
Arus kas masuk mencerminkan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan pemerintah daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018		
1) Arus Masuk Kas	Rp 112.153.725.361,00	Rp 103.475.375.210,44
Jumlah tersebut merupakan arus masuk kas dari aktivitas transitoris selama Tahun anggaran 2019 dan 2018 yang terdiri atas :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	Rp 111.972.458.281,00	Rp 103.346.271.665,44
Penerimaan UP	Rp -	Rp 129.103.545,00
Penerimaan Contra Post	Rp -	Rp -
Penerimaan Lainnya	Rp 181.267.080,00	Rp -
	Rp 112.153.725.361,00	Rp 103.475.375.210,44
2) Arus Keluar Kas	Rp 112.135.543.021,26	Rp 103.346.190.938,44
Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar dari aktivitas transitoris selama Tahun anggaran 2019 dan 2018 yang terdiri atas :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Rp 111.972.458.281,00	Rp 103.346.190.938,44
Pengeluaran UP yang masih ada di Bendahara	Rp 163.084.740,26	Rp -
Koreksi Saldo Bos Tahun sebelumnya	Rp -	Rp -
	Rp 112.135.543.021,26	Rp 103.346.190.938,44
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp 18.182.339,74	Rp 129.184.272,00
Jumlah tersebut merupakan selisih surplus antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas Transitoris Tahun 2019 dan 2018 yang dapat diringkas sebagai berikut:		
Arus Masuk Kas	Rp 112.153.725.361,00	Rp 103.475.375.210,44
Arus Keluar Kas	Rp 112.135.543.021,26	Rp 103.346.190.938,44
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp 18.182.339,74	Rp 129.184.272,00
5.5.5 Saldo Akhir Kas	Rp 16.950.207.818,61	Rp 25.228.628.507,15
Merupakan perhitungan atas kenaikan/penurunan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris dengan saldo awal kas Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:		
Saldo Awal Kas	Rp 25.228.628.507,15	Rp 90.896.434.185,74
Kenaikan/penurunan Kas	Rp (8.278.420.688,54)	Rp (65.667.805.678,59)
Saldo Akhir Kas	Rp 16.950.207.818,61	Rp 25.228.628.507,15

Tidak terdapat perbedaan pengakuan kas pada Laporan Arus Kas dan SilPA LRA.

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas adalah Rp16.950.207.818,61. Jumlah ini berbeda sebesar Rp624.308,00 dengan saldo kas yang terdapat pada neraca daerah, disebabkan oleh Kas Lainnya berupa jasa giro bank pada RSUD, Disdik, dan Dinkes. Saldo Akhir Kas terdiri atas Kas di Kas Daerah sebesar Rp4.403.792.838,78, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp17.803.500,00, Kas di BLUD sebesar Rp6.340.714.371,83, dan Saldo di Bendahara BOS sebesar Rp6.187.897.108,00.

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca dan menggambarkan pergerakan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas Operasional pada Tahun Pelaporan.

Ekuitas Awal	Rp 2.052.644.213.091,89	Rp 1.926.306.723.803,20
Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2019 dan 2018.		
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 192.605.732.645,60	Rp 86.207.119.609,44
Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit laporan Operasional Tahun 2019 dan 2018.		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	Rp (1.185.594.571,35)	Rp 40.130.369.679,25
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2019 terdiri atas :		
Koreksi Nilai Persediaan	5.384.000,00	
Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang	(1.146.164.894,74)	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	150.291.082,00	
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(82.030.398.407,98)	
Koreksi Ekuitas - Aset Lain-lain	83.064.129.961,13	
Koreksi Ekuitas - Penyusutan	(1.574.798.461,23)	
Koreksi Ekuitas - Piutang	(11.369.467.653,66)	
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	9.731.875.114,00	
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(36.748.700,00)	
Koreksi Ekuitas - Extra Comptable	906.000,00	
Koreksi Ekuitas - Utang	(104.848.163,13)	
Koreksi Ekuitas - Amortisasi	0,00	
Koreksi Ekuitas - Setara Kas Lainnya	0,00	
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Penerimaan	1.523.548.824,00	
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Pengeluaran	617.382.438,00	
Koreksi Ekuitas - Kas BLUD	(16.685.711,00)	
Koreksi Ekuitas - Lain-lain	1,28	
Jumlah	(1.185.594.571,35)	
Ekuitas Akhir	Rp 2.244.064.351.166,14	Rp 2.052.644.213.091,89

Jumlah tersebut merupakan ekuitas akhir 2019 dan 2018. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal dengan surplus/defisit LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

5.7 KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Kejadian penting setelah tanggal neraca yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD RSUD dr. M. Zein Painan berdasarkan klaim pelayanan BPJS yang telah diverifikasi oleh pihak BPJS sesuai dengan Surat Pengajuan Nomor 900/128/RSUD-PS/I-2020 tanggal 23 Januari 2020 sebesar Rp4.698.869.900,00;
2. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/09/Pjk-B.Keuda/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan, dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat TA 2019. Bagian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar Rp4.785.800.430,00 terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.855.270.626,00;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp788.182.566,00;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.132.775.577,00;
 - d. Pajak Air Permukaan sebesar Rp9.571.661,00.
3. Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sesuai PMK No.20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada TA 2020 yaitu:
 - 1) Dana Bagi Hasil PBB sebesar Rp1.449.017.107,00;
 - 2) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp5.392.833,00;
 - 3) Dana Bagi Hasil SDA Perikanan sebesar Rp3.677.289,00;
 - 4) Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp35.668.384,00.
 - b. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sesuai PMK No.36/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Dalam Rangka Pandemi COVID-19 yaitu:
 - 1) Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp838.968.059,00;
 - 2) Dana Bagi Hasil PBB sebesar Rp2.051.154.313,00;
 - 3) Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan sebesar Rp59.782.717,00;
 - 4) Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara sebesar Rp163.271.337,00;
 - 5) Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi sebesar Rp5.256.417,00;
 - 6) Dana Bagi Hasil SDA Perikanan sebesar Rp170.627.903,00.

BAB VI

INFORMASI-INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT LAPORAN KEUANGAN

6.1 Kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan

Kegiatan Relokasi RSUD M. Zein Painan dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, lokasi eksisting RSUD M. Zein Painan yang berada pada zona merah rawan tsunami. Kondisi geografis Sumatera Barat yang berada diantara pertemuan dua lempeng benua besar (lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia), patahan (sesar) Semangko, serta dilalui oleh Sirkum Mediterania dengan daratan yang berbukit-bukit atau bergunung-gunung, beresiko menimbulkan terjadinya gempa bumi dan berpotensi untuk terjadi tsunami. Kedua, lokasi eksisting yang berada di jalan Dr. A. Rivai terletak ditengah pemukiman penduduk dan fasilitas umum/sosial yang cukup padat, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan relokasi RSUD ini telah ditempuh sejumlah tahapan, diantaranya studi kelayakan oleh Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta, untuk meneliti Kelayakan Relokasi. Studi Kelayakan yang dilakukan meliputi aspek geografis, sosio-ekonomi, derajat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang telah ada, peraturan dan perundang-undangan, reviu rencana proyek, dan kelayakan keuangan daerah dan proyek. Dalam Laporan Akhir SKB, Lembaga Teknologi Fakultas Teknik UI menyampaikan bahwa pemecahan masalah terkait lokasi dan intensitas bangunan eksisting yang sudah tidak memadai adalah dengan melakukan relokasi rumah sakit untuk mengantisipasi terjadinya bencana (gempa bumi, tsunami, dan kebakaran) serta memudahkan rumah sakit untuk melakukan pengembangan rumah sakit.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga telah melalui tahap dengar pendapat dan pencapaian kesepakatan dengan pihak-pihak terkait. Dari Tokoh Adat dan Tokoh Kenagarian Painan telah memberikan dukungan dan persetujuan terkait upaya relokasi RSUD, sebagaimana dituangkan dalam Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 007/315/PEMB/BPT-PS/2014, tanggal 21 Maret 2014. Dari internal Pemerintah Daerah sendiri, dalam hal ini jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dukungan terhadap upaya relokasi RSUD dinyatakan dalam Fakta Integritas antara Bupati Pesisir Selatan dengan Pejabat Eselon II yang dilakukan pada bulan Maret 2014. Fakta Integritas ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan program Relokasi RSUD M Zein dari lokasi eksisting kelokasi Bukit Kabun Taranak (lokasi yang baru yang telah diuji kelayakannya oleh Lemtek UT).

Untuk pembiayaan relokasi RSUD ini, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyepakati untuk melakukan pinjaman daerah, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pinjaman Daerah, kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan RI. Dalam hal ini, dalam Laporan Akhir SKB yang diterbitkan, Lembaga Teknologi Fakultas Teknik UI juga menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan *cashflow*, angka *Net Present Value*, *Internal Rate of Return*, dan *payback period*, proyek relokasi RSUD dengan dana yang berasal dari pinjaman daerah, layak untuk dijalankan (asumsi proyeksi perhitungan 10 tahun).

Selanjutnya, untuk pelaksanaan pinjaman daerah, telah dibentuk tim khusus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 007/463/Kpts/BPT-PS/2014 tanggal 17 Juli 2014, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pinjaman Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan koordinator Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dari pihak pemberi pinjaman sendiri (PIP), sebelum menyetujui permohonan pinjaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah melakukan verifikasi tersendiri, termasuk melakukan kunjungan lapangan, wawancara dengan pasien dan pengunjung RSUD, serta rencana Pemda dalam penanganan pasien saat relokasi berjalan.

Jumlah pinjaman daerah untuk proyek relokasi ini adalah sebesar Rp. 99.000.000.000,00, yang dibagi atas pekerjaan konstruksi Rp.96.000.000.000 dan Pengadaan Alat Kesehatan senilai Rp.3.000.000.000,00, jangka waktu 5 (lima) tahun, dan tingkat bunga 9.5% pertahun. Pinjaman daerah ini disahkan melalui akta notaris Ujang Iskandar tanggal 23 Juli 2014. Proyek pembangunan fisik RSUD dimulai dengan lelang proyek yang prosesnya didampingi secara hukum oleh Kajari Painan, sebagaimana tertuang dalam Surat Kajari Painan Nomor B-1279/N.3.19/Gp.1/09/2014, tanggal 30 September 2014, tentang Pemenuhan atas Permohonan Bupati Pesisir Selatan untuk Permintaan Tenaga Pendampingan Hukum (*legal assistance*) dalam Proses Lelang Pekerjaan Pembangunan Relokasi RSUD Tipe C dr. M. Zein Painan. Berdasarkan hasil lelang, pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk., yang ditetapkan dalam kontrak Nomor 08/PPK-PB1/Perkim/T-DAU/Pjarkim-PS/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, dengan nilai pekerjaan Rp.94.178.900.000 (sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), jangka waktu 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari kalender, dan target penyelesaian tanggal 10 Juni 2016.

Pencairan pinjaman daerah Tahap I terealisasi pada 05 Agustus 2015 senilai Rp.14.126.835.000 (15% dari kontrak/uang muka). Sedangkan realisasi pencairan pinjaman Tahap II adalah sebesar Rp.18.835.780.000,- (25% dari kontrak dikurangi pengembalian uang muka) pada tanggal 10 Januari 2016. Keseluruhan pencairan pinjaman telah dibayarkan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk sesuai kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 10 Mei 2016, Bupati Pesisir Selatan menyampaikan surat perintah Penghentian Sementara Pelaksanaan Konstruksi Fisik Pembangunan RSUD kepada Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dinyatakan dalam Surat Bupati Nomor 900/199/DPPKAD-PS/2016 tanggal 10 Mei 2016. Dalam hal ini PT SMI merupakan persero yang mengambil alih seluruh aset PIP Kementerian Keuangan sesuai PP Nomor 95 tahun 2015. Perintah penghentian sementara ini terutama disebabkan oleh belum selesainya dokumen AMDAL (analisa dampak lingkungan) serta pertimbangan pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya tahun jamak. Surat Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman dengan mengeluarkan nota Pemberitahuan Perintah Penghentian Sementara Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Relokasi RSUD, pada tanggal 16 Mei 2016, yang ditujukan kepada PPK Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman.

Penghentian sementara seluruh kegiatan konstruksi dilapangan efektif dilaksanakan sejak tanggal 19 Mei 2016. *Progress* kerja fisik pembangunan pada saat penghentian itu adalah lebih kurang 70,3%. Dari total kontrak, realisasi keuangan adalah sebesar Rp32.692.615.000,- (35%), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp33.256.453.168,00 kepada PT Waskita Karya. Dalam Neraca Daerah, kekurangan pembayaran ini diakui sebagai Utang Jangka Pendek kepada PT Waskita Karya. Sedangkan untuk realisasi pinjaman daerah dari PT SMI, diakui sebagai Utang Jangka Panjang.

Rincian pencatatan dan pengakuan transaksi keuangan terkait pekerjaan konstruksi pembangunan relokasi RSUD dalam Neraca TA 2019 adalah sebagai berikut:

No	Rincian	Nilai (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran terkait Konstruksi	
	- Pematangan Lahan	4.037.875.104,00
	- Pembangunan I (PT Waskita Karya)	14.125.245.483,00
	- Pembangunan I (koreksi kurang catat KDP 2015)	1.589.517,00
	- Pembangunan II (PT Waskita Karya)	18.835.780.000,00
	- Manajemen Konstruksi	844.836.884,00
	- Operasional pembangunan	1.698.760.200,00
	- Pembuatan amdal	260.193.000,00
	- Pembuatan animasi	46.540.000,00
	- Pembuatan RTBL	317.369.425,00
	- Biaya Penunjang pembangunan III	118.292.150,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN T.A. 2019

No	Rincian	Nilai (Rp)
	- Manajemen konstruksi	385.590.195,00
	- Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup	49.847.000,00
	Jumlah 1	40.721.918.958,00
2	Pembayaran Bunga Pinjaman kepada PT SMI	
	Realisasi belanja bunga 2015	326.798.951,74
	Realisasi belanja bunga 2016	2.810.847.752,00
	Realisasi belanja bunga 2017	3.103.489.064,00
	Realisasi belanja bunga 2018	1.926.710.628,00
	Realisasi belanja bunga 2019	1.019.584.696,00
	Jumlah 2	9.187.431.091,74
3	Utang kepada Pihak Ketiga (Utang Jangka Pendek) kepada PT Waskita Karya)	
	Pembangunan III (PT Waskita Karya) dengan progress fisik saat perintah penghentian sementara sebesar 70,3% dan diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga	33.256.453.168,00
	Jumlah 3	33.256.453.168,00
	Nilai KDP s.d. 31 Desember 2019 (1 s.d. 3)	83.165.803.217,74
4	Utang Jangka Panjang (kepada PT SMI), yang dapat dirinci sbb:	
	Nilai pinjaman yang telah dicairkan	32.962.615.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman selama tahun 2017	(9.417.890.000,00)
	Pembayaran Pokok Pinjaman selama tahun 2018	(9.417.890.000,00)
	Pembayaran Pokok Pinjaman selama tahun 2019	(9.417.890.000,00)
	Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019	(4.708.945.000,00)
	Jumlah 4	0,00
5	Utang Bunga kepada PT SMI per 31 Desember 2019	42.896.553,77
6	Utang Jangka Pendek Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019	4.708.945.000,00

Akibat permintaan penghentian sementara proyek relokasi, terdapat sisa pinjaman daerah yang belum dicairkan oleh PT SMI sebesar Rp66.037.385.000,-. Nilai tersebut tidak dicatat sebagai piutang daerah.

Untuk kewajiban pembayaran pinjaman kepada PT SMI, dari total Rp32.962.615.000,00 yang telah dicairkan, dapat dirinci dalam Tabel sebagai berikut:

Uraian	Periode				
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
	06 Agustus 2016 s.d 05 Februari 2017				
Grace period 18 bulan					
Pembayaran Pokok tahun 2017		9.417.890.000			
Pembayaran Pokok tahun 2018			9.417.890.000		
Pembayaran Pokok 2019				9.417.890.000	
Estimasi Pembayaran Pokok 2020					4.708.945.000

*Telah lunas pada TA 2020 sebesar Rp32.962.615.000,00, atau senilai yang telah diterima Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan keuangan terhadap LKD Kabupaten Pesisir Selatan TA 2016 serta rekomendasi dari BPK RI, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Pemeriksaan Khusus terkait Perencanaan dan Pembangunan Gedung Baru RSUD M. Zein Painan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dengan Nomor 443/LHP.KS/Insp/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, dilaporkan adanya indikasi penyimpangan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan fisik. Untuk menindaklanjuti hal ini, Bupati Pesisir Selatan mengajukan permohonan audit investigatif kepada BPKP Provinsi Sumatera Barat terhadap Perencanaan dan Pembangunan RSUD Dr. M. Zein Painan melalui surat No. 700/070/Insp/I/2018 tanggal 16 Januari 2018. Surat ini ditembuskan kepada Kepala Cabang Sumbar Divisi Regional I PT Waskita Karya dan Direktur PT SMI Jakarta.

Pelaksanaan Audit investigatif oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat dilakukan melalui Surat Tugas Nomor: ST-063/PW03/5/2018 tanggal 31 Januari 2018, selama 25 hari kerja (30 Januari 2018 s.d. 16 Maret 2018). Kemudian di Tahun 2019 BPKP Sumbar melakukan perpanjangan masa Audit Investigatif melalui Surat Tugas Nomor: ST-55/PW03/5/2019 tanggal 21 Januari 2019 yaitu selama 25 hari kerja (21 Januari 2019 s.d. 29 Maret 2019). Terkait pelaksanaan audit investigatif, BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif dengan Nomor LAINV-316/PW03/5/2019 tanggal 3 September 2019. Atas hal tersebut, Bupati Pesisir Selatan melalui Surat Nomor 700/1581/Insp-PS/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, telah menyampaikan laporan hasil audit kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih lanjut, terkait pinjaman daerah kepada PT SMI, Pemerintah Daerah melalui surat Bupati Nomor 650/017/BPKD-PS/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, mengajukan permohonan amandemen perjanjian investasi Nomor 127 tanggal 23 Juli 2014 antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar masa penarikan dan jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang sedangkan tingkat suku bunga pinjaman diturunkan. Permohonan ini disetujui sebagian oleh PT SMI melalui surat Nomor S-478/SMI/DPI/0517 tanggal 31 Mei 2017. Dalam hal ini perpanjangan masa penarikan pinjaman dari sebelumnya 18 (delapan belas) bulan disetujui menjadi 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak pencairan pinjaman tahap pertama. Namun, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman, penurunan tingkat suku bunga, dan perpanjangan masa tenggang, yang juga diajukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meringankan beban keuangan daerah tidak disetujui oleh PT SMI. Dalam hal ini, meskipun kegiatan relokasi dihentikan sementara, Pemerintah Daerah tetap melaksanakan kewajiban pembayaran pokok hutang dan bunga sebagaimana disepakati dalam perjanjian pinjaman.

Untuk menindaklanjuti persetujuan sebagaimana diatas, PT SMI dan Pemerintah Daerah telah melakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 25 September 2017. Akta perubahan perjanjian pinjaman dibuat dihadapan notaris Pratiwi Handayani, S.H, dengan akta Nomor 13, tanggal 25 September 2017. Pada saat penandatanganan perjanjian ini, Bupati Pesisir Selatan sekaligus menyampaikan kepada Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI bahwa terdapat gugatan dari PT Waskita selaku kontraktor pekerjaan kepada PT Katama selaku pelaksana pekerjaan pondasi terkait pemegang hak cipta pondasi laba-laba. Dalam hal ini, adanya gugatan akan diinvestigasi lebih lanjut oleh BPKP selaku auditor terkait pengaruhnya terhadap keberlanjutan pelaksanaan proyek relokasi RSUD.

Penghentian sementara kegiatan relokasi RSUD M. Zein, dapat memiliki beberapa konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah, baik secara keuangan, maupun non keuangan. Konsekuensi secara keuangan terutama terkait pembayaran pokok hutang dan bunga, sedangkan konsekuensi non

keuangan terutama meliputi tidak tercapainya outcome relokasi RSUD M. Zein. Dapat ditegaskan juga bahwa Pemerintah Daerah selalu bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Pesisir Selatan, termasuk terkait kegiatan relokasi RSUD M. Zein Painan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap proyek relokasi RSUD dari BPKP Sumatera Barat.

6.2 Kebijakan Pengelolaan APBD TA 2020 untuk Penanggulangan dan Penanganan Pandemi Covid-19

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Kepala Daerah diminta melakukan penyesuaian belanja daerah yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal sekurang-kurangnya 50%. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyampaikan penyesuaian APBD TA 2020 kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 900.2/176/BPKD-PS/2020 tanggal 6 Mei 2020.

Secara total penyesuaian APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA 2020 sebagai dampak dari penanggulangan dan penanganan Covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	Anggaran Sebelum Penyesuaian (Rp)	Anggaran Setelah Penyesuaian (Rp)	% Penyesuaian
a	b	c	d	e = (100%-(d/c))
Tahap I - Penyesuaian Pendapatan Daerah				
1	Pendapatan Asli Daerah	156.419.589.082	136.481.364.430	12,75%
2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	1.445.179.320.000	1.265.657.235.746	12,42%
3	Lainnya	185.495.580.610	191.104.696.587	(3,02%)
	Total Pendapatan Daerah	1.787.094.489.692	1.593.243.296.763	10,85%
Tahap II - Penyesuaian Belanja Daerah				
1	Belanja Pegawai	824.846.208.590	804.803.646.766	2,43%
2	Belanja Barang dan Jasa	275.725.119.870	199.250.241.257	27,74%
3	Belanja Modal	424.888.139.409	245.138.044.159	42,31%
4	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000	0,00%
5	Belanja Lainnya	328.463.461.822	410.879.804.580	(25,09%)
	Total Belanja Daerah	1.854.122.929.692	1.660.271.736.763	10,46%
Tahap III - Penghitungan Selisih Lebih/Kurang				
	Selisih Lebih/Kurang Setelah Penyesuaian		(67.028.440.000)	

Tahap IV - Realokasi Setisih Lebih						
Uraian	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Belanja Lainnya (Rp)	Total (Rp)
a	b	c	d	e	f	g=b+c+d+e+f
Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan COVID-19	9.900.000	7.016.579.000	190.000.000		8.444.386.275	15.660.865.275
Penyediaan jaring pengaman sosial					28.800.000.000	28.800.000.000
Penanganan dampak ekonomi					2.705.585.250	2.705.585.250
Total	9.900.000	7.016.579.000	190.000.000	-	39.949.971.525	47.166.450.525

Tahap V - Postur Belanja APBD Setelah Realokasi	
Uraian	Anggaran Setelah Realokasi (Rp)
Pendapatan Daerah	593.243.296.768
Pendapatan Asli Daerah	136.481.364.430
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	1.265.657.235.746
Lainnya	191.104.696.587
Belanja Daerah	804.803.646.766
Belanja Pegawai	804.803.646.766
Belanja Barang dan Jasa	199.250.241.257
Belanja Modal	245.138.044.159
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000
Belanja Lainnya	410.879.804.580
Saluran Dana	67.028.440.000
Pembiayaan	67.028.440.000

Atas penyesuaian APBD tersebut tidak mengganggu kewajiban Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 yang semestinya harus dibayarkan Tahun 2020 ini seperti pekerjaan perpanjangan waktu yang fisiknya sudah selesai dan pembayaran kewajiban pokok dan bunga atas pinjaman kepada PT. SMI.

6.2 Revaluasi Aset Tetap

Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca daerah sehingga sesuai dengan nilai wajarnya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini belum melaksanakan penilaian kembali Barang Milik Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut dikarenakan belum adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah.

6.3 Penghapusan Piutang PBB-P2

Pada TA 2019, Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 970/29/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penghapusan Nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pesisir Selatan, melakukan penghapusan terhadap Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Penghapusan piutang ini dilakukan untuk piutang yang tidak dapat ditagih dari tahun 2003 sampai dengan 2013 dengan nilai total Rp11.343.098.883,00.

Proses penghapusan piutang PBB P2 dimulai dengan tahapan verifikasi oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sejak TA 2017. Pada tahun 2017 terdapat saldo Piutang PBB-P2 senilai Rp16.813.013.859,00. Verifikasi dilakukan terhadap Piutang PBB-P2 yang berumur lebih dari 3 tahun. Verifikasi dilakukan terhadap objek dan subjek pajak untuk mengukur ketertagihan piutang pajak, dengan bekerja sama dengan pemerintah Nagari terkait. Hasil verifikasi kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar usulan penghapusan terhadap Piutang PBB P2. Dalam hal ini dari hasil verifikasi yang dilakukan, disimpulkan bahwa Piutang PBB P2 tahun 2003-2013 yang tercatat dalam neraca daerah tidak dapat ditagih lagi keseluruhannya sehingga perlu dilakukan penghapusan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 kepada Bupati Pesisir Selatan melalui surat Nomor: 900.4/204.BPKD-PS/2018 tanggal 18 Desember 2018, dimana diusulkan dilakukan penghapusan atas Piutang PBB-P2 senilai Rp11.343.098.883,00. Dari total nilai yang diusulkan, terdapat selisih nilai dengan piutang yang tercatat dalam neraca daerah. Nilai piutang PBB P2 tahun 2003-2013 yang tercatat dalam neraca adalah Rp11.232.921.648,00, sedangkan nilai piutang yang diusulkan untuk dihapuskan adalah Rp11.343.098.883,00, atau terdapat selisih sebesar

Rp.110.177.235,00. Nilai piutang PBB P2 yang diusulkan untuk dihapus sebesar Rp11.343.098.883,00 merupakan nilai PBB P2 yang tercatat dalam aplikasi SISMIOP (aplikasi untuk penatausahaan dan pelaporan PBB P2), sehingga terdapat kurang catat piutang sebesar selisih tersebut.

Usulan penghapusan piutang kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan persetujuan penghapusan. Usulan ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 02/DPRD-PS/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Persetujuan Penghapusan Nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Penghapusan atas Piutang PBB-P2 kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 970/29/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penghapusan Nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pesisir Selatan senilai Rp11.343.098.883,00.

Terhadap keputusan Penghapusan Nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Pesisir Selatan ini, telah ditindaklanjuti dalam neraca daerah TA 2019 dengan melakukan penghapusan pencatatan (hapus buku) piutang senilai Rp11.232.921.648,00, dan melakukan penambahan nilai aset ekstrakomptabel senilai Rp11.343.098.883,00 (nilai buku piutang PBB P2 2003-2013 yang tercatat dalam neraca daerah ditambah selisih pencatatan sebesar Rp.110.177.235,00 (Daftar aset ekstrakomptabel terlampir)).

Lebih lanjut, penghapusan piutang PBB P2 yang dilakukan merupakan hapus buku sehingga tidak menghilangkan hak tagih terhadap piutang ini. Pemerintah Daerah, melalui Badan Pendapatan, tetap melanjutkan kegiatan verifikasi dan validasi data piutang PBB P2 (*by name by address*) pada TA 2020 sebagaimana dituangkan dalam RKA TA 2020 Badan Pendapatan. Seperti tahun sebelumnya, kegiatan ini akan dilaksanakan dengan pola kerjasama dengan pemerintah nagari terkait.

6.4 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menerima alokasi Dana Bantuan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-313-2018 tentang Alokasi Dana Bantuan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 April 2018. Penerimaan alokasi ini dianggarkan pada Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan, sedangkan untuk belanja dianggarkan pada belanja modal pada beberapa SKPD.

Terkait penerimaan alokasi BKK, sampai dengan 31 Desember 2019 Pemerintah Daerah belum menerima transfer dana dari Pemerintah Provinsi. Sedangkan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait telah melakukan kontrak kerjasama untuk pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran masing-masing SKPD (pada TA 2018). Dalam hal ini, sebagaimana LKD TA 2018, pengakuan transaksi keuangan terkait BKK meliputi hutang kepada pihak ketiga sesuai kontrak kerjasama dengan pihak ketiga, dan aset terkait sesuai realisasi fisik pembangunan (nilai dan rincian SKPD dijelaskan dalam lampiran LK). Pemerintah Daerah, sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer, tidak melakukan pencatatan terhadap piutang dana transfer BKK dari Pemerintah Provinsi dikarenakan Pemerintah Provinsi tidak melakukan pencatatan terhadap utang terkait (dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi TA 2018).

6.5 Perubahan Kebijakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Dalam Laporan Keuangan Keuangan TA 2019, sesuai Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dilakukan perubahan pengakuan nilai satuan minimum

kapitalisasi aset tetap. Perubahan pengakuan tersebut berlaku untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari sebelumnya senilai sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Ringkasan pencatatan dan pengakuan akun dalam laporan keuangan terkait perubahan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

No	Rincian	Nilai	Ket
1	Penurunan nilai aktiva tetap (nilai per SKPD terlampir) dan Perubahan Dampak Kumulatif Koreksi Aset Tetap	Rp27.185.387.555,00	Neraca, LPE
2	Penurunan nilai akumulasi penyusutan (rekapitulasi selisih per SKPD disajikan pada lampiran)	Rp1.274.810.362,04	Neraca
3	Penambahan nilai aset ekstrakomptabel (nilai per SKPD terlampir)	Rp27.185.387.555,00	Lampiran CaLK

Lebih lanjut, dapat disampaikan juga, terhadap aset ekstrakomptabel belum dilakukan penyusutan pada laporan keuangan TA 2019 ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah belum memiliki aplikasi pendukung untuk pencatatan aset ekstrakomptabel, dan dalam Permendagri tersebut terdapat batas waktu penerapan sampai dengan 2 (tahun) sejak diundangkan.

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang diharapkan dapat memperjelas terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Painan, Juni 2020
BUPATI PESIR SELATAN

H. HENDRAJONI